



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno - Hatta No. 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122

Kota Mungkid 56511 www.magelangkab.go.id

2020



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTORAT

Jl. Soekarno Hatta No 59 ☎ (0293) 788215
Fax (0293) 788122 Kota Mungkid 56511 Website: www.inspektorat.magelang.co.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP) TAHUN 2019 KABUPATEN MAGELANG**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kabupaten Magelang untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Magelang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu perbaikan, namun kelemahan tersebut telah dilakukan perbaikan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) telah diyakini keandalannya.

Kota Mungkid, 20 Maret 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN MAGELANG

MELATI CHAULIYANAH, SE
Perbina Tingkat I
NIP. 19620707 199003 2 004




Kota Mungkid, 23 Maret 2020

Nomor : 069.2/085 / 01.08 /2020
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) Dokumen
Perihal : Penyampaian Dokumen
LKjIP 2019 dan PK 2020.

Kepada :
Yth. 1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional RI
di
JAKARTA

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Magelang Tahun 2019.
2. Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2020.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARAFIN, S.IP

Tembusan :

1. Perwakilan BPKP Provinsi DIY
2. Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Pemerintah Kabupaten Magelang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

LKjIP ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Magelang sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan wujud kerja keras seluruh aparatur pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Magelang dan dukungan instansi terkait serta partisipasi berbagai elemen masyarakat, dunia usaha dan dunia pendidikan yang telah memberikan sumbangsuhnya untuk kemajuan Kabupaten Magelang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja guna perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, 23 Maret 2020


BUPATI MAGELANG,
ZAENAL ARIFIN, S.IP

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2019. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sasaran. Penyusunan Dokumen LKjIP mengacu pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja Tahun 2019 dilakukan pada indikator makro dengan 6 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja serta indikator mikro berjumlah 31 sasaran strategis dengan 166 indikator kinerja.

Capaian kinerja sasaran pada indikator makro Kepala Daerah Tahun 2019 rata-rata kinerja sasaran telah tercapai yaitu sebesar 103,25% dengan kriteria Sangat Tinggi, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 sama dengan capaian kinerja sasaran sebesar 103,25% dengan kriteria Sangat tinggi, hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator makro sasaran strategis telah tercapai bahkan terlampaui, baik pada target tahun 2019 maupun target akhir periode RPJMD pada tahun 2019.

Capaian kinerja sasaran pada indikator mikro Kepala Daerah Tahun 2019 telah tercapai 125,17% dengan kriteria Sangat Tinggi jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 adalah sama dimana capaian kinerja sasaran telah tercapai 125,17% dengan kriteria sangat tinggi, hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator mikro sasaran startegis telah tercapai bahkan terlampaui pada target Tahun 2019 dan target akhir periode RPJMD pada tahun 2019 .

Realisasi anggaran Kabupaten Magelang pada tahun 2019 mencapai 76,04% dengan katagori Tinggi jika dibandingkan dengan serapan tahun sebelumnya sebesar rata-rata 82,94%, maka realisasi realisasi anggaran program menurun sebesar 6,90%.

Tingkat efesiensi kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 6,53%, besaran tingkat efesiensi ini belum mencerminkan efektifitas penggunaan sumberdaya khususnya dalam penggunaan anggaran, perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per kegiatan.

DARTAR ISI

Kata Pengantar	I
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Aspek Strategi Organisasi	3
1. Visi dan Misi	3
2. Kondisi Geografi dan Demografi	6
3. Pembagian Wilayah	8
4. Organisasi Perangkat Daerah	9
E. Isu Strategis Organisasi	13
F. Sistematika	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Ikhtisan Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja Organisasi	50
1. Rumus Pengukuran	50
2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	51
B. Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019	76
C. Prestasi	170
BAB IV PENUTUP	172
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2019 (jiwa).	7
Tabel 1.2	Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Laut se-Kabupaten Magelang .	8
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019 pada Indikator Makro.	17
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019 pada Indikator Mikro.	19
Tabel 2.3	Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.	28
Tabel 2.4	Dukungan Program dan Pendanaan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	36
Tabel 3.1	Interval Nilai, Predikat Penilaian dan Kode warna	51
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Pada Indikator Makro.	52
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Pada Indikator Mikro.	55
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Per Program Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 .	68
Tabel 3.5	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun anggaran 2019 .	76
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	77
Tabel 3.7	Persentase Kemiskinan Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2014-2019	78
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	80
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	81
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	82

Tabel 3.11	Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	84
Tabel 3.12	Penghitungan Opini BPK 'WTP' Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	85
Tabel 3.13	Penghitungan Nilai AKIP Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	87
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Sasaran Strategis VI Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	87
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	88
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Dan Terkontrol Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	91
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kualitas Pembangunan Manusia Yang Semakin Meningkatkan, Dengan Pemerataan Pendidikan Yang Layak, Mutu Pendidikan, Dan Akses Terhadap Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	94
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	97
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	99
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019	101
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	103
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	105
Tabel 3.23	Sasaran Strategis Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan Kab. Magelang Tahun 2019 .	106

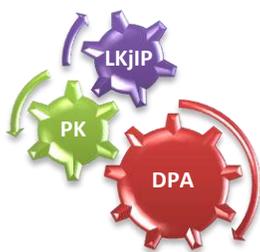
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	108
Tabel 3.25	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Membaiknya Struktur Perkonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	110
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	112
Tabel 3.27	Sasaran Strategis Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat Magelang Tahun 2019 .	113
Tabel 3.28	Sasaran Strategis Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2019	115
Tabel 3.29	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	118
Tabel 3.30	Sasaran Strategis Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Magelang Tahun 2019	119
Tabel 3.31	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	121
Tabel 3.32	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	122
Tabel 3.33	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	124
Tabel 3.34	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung	126

Tabel 3.35	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	128
Tabel 3.36	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	129
Tabel 3.37	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Yang Berorientasi Tata Ruang, Serta Mengurangi Resiko Bencana Alam Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	131
Tabel 3.38	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	133
Tabel 3.39	Capaian Kinerja Sasaran Srategis Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	137
Tabel 3.40	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	138
Tabel 3.41	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	140
Tabel 3.42	Sasaran Strategis Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	143
Tabel 3.43	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	144
Tabel 3.44	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat dan Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2019 .	147

Tabel 3.45	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2019	148
Tabel 3.46	Analisa Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar : 1.1	Peta Kabupaten Magelang.	6
Gambar : 3.1	Penghargaan Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori “Baik Dengan Catatan” Tahun 2019	90
Gambar : 3.2	Penghargaan Kabupaten Layah Anak (KLA) Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019	93
Gambar : 3.3	Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019	102
Gambar : 3.4	Penerimaan Penghargaan Pembina Proklam Tingkat Nasional Pemerintah Kabupaten Magelang.	134
Gambar : 3.5	Penerimaan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia	148
Gambar : 3.6	Penganugerahan BPBD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Predikat Terbaik II Tingkat BPBD Kabupaten/Kota Wilayah Barat dan Top 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019	149
Gambar : 3.7	Top 10 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan judul PANCEN A SIKK (Pantauan Bencana dengan Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten)	150



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya atas penggunaan anggaran wajib dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), penyusunan LKjIP merupakan bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai sasaran strategis daerah. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana arah pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Nawacita diamanatkan pemerintah daerah untuk tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
 - 1. Visi dan Misi
 - 2. Letak Geografi
 - 3. Pembagian Wilayah
 - 4. Organisasi Perangkat Daerah
- E. Isu Strategis Organisasi
- F. Sistematika

kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016

Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32); dan

8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP adalah:

1. Menilai tingkat capaian kinerja sasaran strategis dari program yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis melalui pelaksanaan program.
3. Menyusun strategi agar mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap pelaksanaan program yang akan datang.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk peningkatan kinerja.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

D. Aspek Strategi Organisasi

1. Visi dan Misi

Berpedoman pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 yaitu: “Kabupaten Magelang Yang Maju, Sejahtera Dan Madani“, serta mengingat pesan wasiat Bung Karno tentang doktrin TRI SAKTI Bung Karno, yaitu: (1) Berdaulat di bidang politik, (2) Berdikari di bidang ekonomi, dan (3) Berkepribadian di bidang kebudayaan, serta dengan tetap memperhatikan *motto* Kabupaten Magelang yaitu “Gemah Ripah Iman Cemerlang” atau MAGELANG GEMILANG maka ditetapkan Visi Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Magelang Yang Semakin Semanah” (Sejahtera, Maju dan Amanah)

Semanah semakna dengan “sehati”, sehingga makna semanah dimaksudkan adanya kebersamaan di Kabupaten Magelang antar dan inter pimpinan pemerintahan daerah dan jajarannya beserta segenap komponen masyarakatnya untuk mewujudkan Kabupaten Magelang yang semakin Sejahtera, Maju dan Amanah. Oleh karena itu pernyataan visi tersebut memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun.

Sejahtera, konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera secara sederhana menurut terminologi jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminya kesehatan masyarakat lahir-batin, jasmani-rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas. Adapun secara akademis indikator sejahtera adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin; terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan; tersedianya infrastruktur yang memadai; meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan daerah. Visi Sejahtera ini akan dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama, serta membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.

Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan di dukung kondusivitas daerah. Visi Maju akan dicapai melalui misi meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah serta memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Amanah, konsep amanah secara garis besar adalah menciptakan kerja sama yang baik dengan semua elemen masyarakat. Amanah merupakan kunci kemakmuran masyarakat yang menjadi perekat sosial yang mampu membentuk solidaritas dan jaringan antara lapisan masyarakat. Amanah harus memberikan inisiatif konsep moral, variatif, argumentatif yang bermanfaat dan aktual bagi kehidupan manusia mencakup aspek agama, sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya, sehingga dapat diwujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang menegakkan amanah (*high trust society*). Amanah mengandung pesan kesetiaan, kepercayaan dan kejujuran. Visi Amanah akan dicapai dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan

demokratis, serta meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi merupakan rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi, sehingga secara substansi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan secara administratif tidak menyulitkan pelaksanaannya.

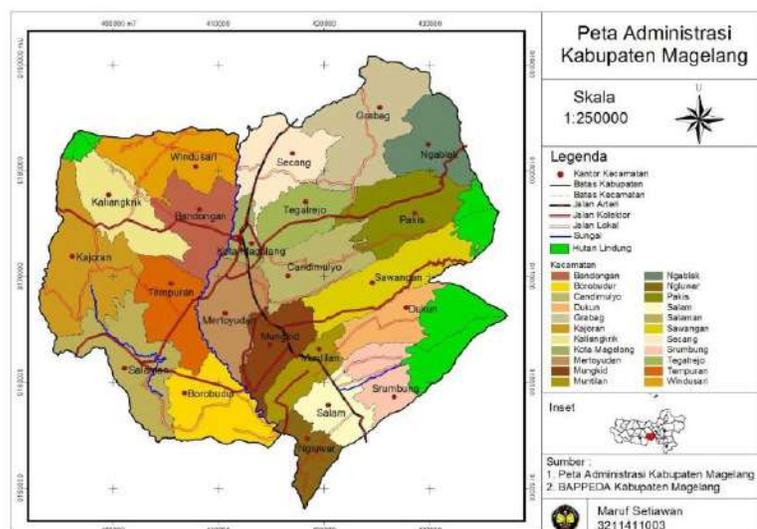
Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
4. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

2. Kondisi Geografi dan Demografi

Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak di antara $110^{\circ} 01' 51''$ dan $110^{\circ} 26' 58''$ Bujur Timur dan diantara $7^{\circ} 19' 13''$ dan $7^{\circ} 42' 16''$ Lintang Selatan.

Berdasarkan letak ini menjadikan Kabupaten Magelang memiliki posisi yang strategis karena keberadaannya di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah sehingga



Gambar : 1.1. Peta Kabupaten Magelang

mudah dicapai dari berbagai arah. Disamping itu Kabupaten Magelang merupakan daerah perlintasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah penduduk Kabupaten Magelang tahun 2018 berdasarkan Buku Kabupaten Magelang tahun Kabupaten Magelang sebanyak: 1.279.625 jiwa, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 – 2018 sebesar 8,27% sedangkan pada tahun 2017-2018 sebesar 0,89%, secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Magelang tahun 2010, 2017 dan 2018

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jumlah Penduduk <i>Population</i>			Laju Penduduk per Tahun <i>Annual Population Rate (%)</i>	
	2010 ¹	2017 ²	2018 ²	2010-2018	2017-2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Salaman	65 852	70 497	71 090	7,95	0,84
2 Borobudur	55 602	59 039	59 476	6,97	0,74
3 Ngluwar	29 857	31 371	31 551	5,67	0,57
4 Salam	44 455	47 513	47 900	7,75	0,81
5 Srumbung	44 782	49 080	49 651	10,87	1,16
6 Dukun	42 960	46 018	46 415	8,04	0,86
7 Muntilan	74 839	80 161	80 845	8,03	0,85
8 Mungkid	68 669	75 076	75 933	10,58	1,14
9 Sawangan	53 705	57 602	58 117	8,22	0,89
10 Candimulyo	45 341	48 840	49 292	8,71	0,93
11 Mertoyudan	104 761	115 670	117 128	11,80	1,26
12 Tempuran	46 395	49 834	50 273	8,36	0,88
13 Kajoran	51 477	53 285	53 476	3,88	0,36
14 Kaliangkrik	52 345	55 658	56 079	7,13	0,76
15 Bandongan	54 539	58 002	58 439	7,15	0,75
16 Windusari	46 298	50 351	50 890	9,92	1,07
17 Secang	74 921	82 565	83 637	11,63	1,30
18 Tegalrejo	53 200	57 907	58 535	10,03	1,08
19 Pakis	52 242	54 443	54 694	4,69	0,46
20 Grabag	81 749	86 526	87 148	6,60	0,72
21 Ngablak	37 927	38 958	39 056	2,98	0,25
Kab. Magelang	1 181 916	1 268 396	1 279 625	8,27	0,89

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, "Kabupaten Magelang Dalam Angka 2019"

3. Pembagian Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Magelang adalah 1.085,73 Km² atau 108.573 Ha kurang lebih 3,34% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS Tahun 2019, alokasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang mencakup luas 86.405 Ha lahan pertanian, yang terdiri dari lahan sawah (*wetland*) seluas 36.862 Ha dan lahan kering seluas 49.543 Ha, adapun peruntukan lahan sawah diantaranya adalah sawah irigasi seluas 27.732 Ha dan tadah hujan (*reservation*) seluas 8.948 Ha.

Wilayah Kabupaten Magelang yang paling luas yaitu Kecamatan Kajoran sebesar 83,41 kilometer persegi. Sedangkan wilayah yang luasnya paling kecil yaitu Kecamatan Ngluwar sebesar 22,44 Km², secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Tabel .1.2

Luas Daerah, Jarak Terdekat/Termudah dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Ketinggian dari Permukaan Laut se-Kab. Magelang

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase Luas	Jarak dari Ibu Kota Kabupaten (Km)	Ketinggian dari Permukaan Laut (mdpl)
1.	Salaman	68,87	6,34	15	208
2.	Borobudur	54,55	5,02	4	235
3.	Ngluwar	22,44	2,07	22	202
4.	S a l a m	31,63	2,91	19	336
5.	Srumbung	53,18	4,90	19	501
6.	D u k u n	53,40	4,92	21	578
7.	Muntilan	28,61	2,64	17	348
8.	Mungkid	37,40	3,44	7	320
9.	Sawangan	72,37	6,67	15	575
10.	Candimulyo	46,95	4,32	17	437
11.	Mertoyudan	45,35	4,18	6	347
12.	Tempuran	49,04	4,52	8	210
13.	Kajoran	83,41	7,68	31	578
14.	Kaliangkrik	57,34	5,28	34	823
15.	Bandongan	45,79	4,22	20	431
16.	Windusari	61,65	5,68	25	525
17.	Secang	47,34	4,36	22	470
18.	Tegalrejo	35,89	3,31	22	478
19.	Pakis	69,56	6,41	29	841
20.	Grabag	77,16	7,11	33	680
21.	Ngablak	43,80	4,03	37	1.378
Total :		1.085,73	100.00		

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2019

Kabupaten Magelang secara administratif dibagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan dengan dusun 2.750 dusun dan Rukun Tetangga (RT) 10.968 RT.

4. Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksanaan, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam badan daerah, dan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam inspektorat.

Perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan mempunyai intensitas tinggi dibentuk kecamatan dan kelurahan.

Dalam rangka membentuk Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas.

Sebagaimana dimatkan dalam Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah dan diamanatkan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Magelang, susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang meliputi :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah berjumlah 18 (delapan belas) terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran;
 6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
 8. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 15. Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub Peternakan dan bidang Kelautan dan Perikanan;
 16. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 17. Dinas Pertanian dan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan; dan
 18. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
- e. Badan Daerah berjumlah 3 (tiga) terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.
- f. Kecamatan berjumlah 21 (dua puluh satu) terdiri dari:
1. Kecamatan Salaman;
 2. Kecamatan Borobudur;

3. Kecamatan Ngluwar;
4. Kecamatan Salam;
5. Kecamatan Srumbung;
6. Kecamatan Dukun;
7. Kecamatan Sawangan;
8. Kecamatan Muntilan;
9. Kecamatan Mungkid;
10. Kecamatan Mertoyudan;
11. Kecamatan Tempuran;
12. Kecamatan Kajoran;
13. Kecamatan Kaliangkrik;
14. Kecamatan Bandongan;
15. Kecamatan Candimulyo;
16. Kecamatan Pakis;
17. Kecamatan Ngablak;
18. Kecamatan Grabag;
19. Kecamatan Tegalrejo;
20. Kecamatan Secang; dan
21. Kecamatan Windusari.

Selain Perangkat Daerah sebagaimana diatas, dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan berjumlah 5 (lima) terdiri dari:

- a. Kelurahan Muntilan pada Kecamatan Muntilan;
- b. Kelurahan Mendut pada Kecamatan Mungkid;
- c. Kelurahan Sawitan pada Kecamatan Mungkid;
- d. Kelurahan Sumberrejo pada Kecamatan Mertoyudan; dan
- e. Kelurahan Secang pada Kecamatan Secang.

Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Magelang adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh Bupati dibantu oleh perangkat-perangkat Pemerintah Kabupaten Magelang yaitu:

- a. Tugas Sekretariat Daerah adalah membantu tugas Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah dengan fungsinya:
 - 1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah daerah;
 - 2) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

- 3) Pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah;
 - 4) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Tugas Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, dengan fungsinya:
- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2) Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - 3) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.
- c. Tugas Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidangnya dengan fungsinya:
- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2) Penyediaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Tugas Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan dengan fungsinya:
- 1) Perumusan kebijakan pemerintah Kecamatan;
 - 2) Penyelenggaraan administrasi pemerintah kecamatan;
 - 3) Pengendalian sumberdaya aparatur, prasarana dan sarana pemerintah Kecamatan;
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Isu Strategis Organisasi

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magelang terdapat 6 (enam) isu strategis yang terdiri dari :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) dan kehidupan beragama
 - a. Perlunya peningkatan kualitas SDM melalui pemberian pendidikan setara dan layak serta peningkatan kompetensi para pendidik;
 - b. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan serta pemenuhan prasarana pelayanan kesehatan;

- c. Perlunya pemberdayaan rakyat miskin untuk meningkatkan kemandirian masyarakat;
 - d. Perlunya penguatan modal sosial dan budaya lokal;
 - e. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana keagamaan;
 - f. Perlunya pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
2. Perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing
- a. Perlunya peningkatan pendapatan masyarakat berbasis Usaha Menengah Kecil Mikro;
 - b. Perlunya peningkatan kemandirian perekonomian daerah yang mampu berdaya saing;
 - c. Perlunya peningkatan pengembangan pertanian (termasuk peternakan dan perikanan), pariwisata dan industri kecil/menengah sebagai sektor unggulan daerah;
 - d. Perlunya revitalisasi pasar tradisional, membangun pusat perdagangan bersama bagi hasil pertanian, peternakan dan produk UMKM, dan membangun jejaring kemitraan dengan pihak lain;
 - e. Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh.
3. Pembangunan prasarana dan sarana daerah
- a. Perlunya pembangunan sarana prasarana jalan, jembatan dan irigasi guna menunjang peningkatan ekonomi masyarakat;
 - b. Perlunya peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang layak dan bantuan stimulan guna peningkatan angka rumah layak huni;
 - c. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan guna peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
 - d. Perlunya upaya pengembangan sumber energi alternatif berupa energi baru terbarukan seperti mikro hidro, *solar cell*, dan panas bumi guna memenuhi layanan pasokan listrik.
4. permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup
- a. Perlunya pelestarian lingkungan hidup dengan adanya perencanaan pembangunan berkelanjutan;
 - b. Perlunya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. Perlunya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

5. Tata kelola pemerintahan
 - a. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik dengan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b. Perlunya percepatan reformasi birokrasi dalam upaya menuju *Good Governance*;
 - c. Perlu peningkatan partisipasi masyarakat melalui optimalisasi pelaksanaan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.
6. Keamanan dan ketenteraman masyarakat
 - a. Perlunya optimalisasi penegakan hukum oleh aparat yang dibantu masyarakat;
 - b. Perlunya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sinergitas pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat.

F. Sistematika

Sistematika penulisan dokumen LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, peta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini diuraikan anggaran jumlah dan realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2019.

C. Prestasi

Sub Bab ini berisi prestasi yang diarah oleh Kabupaten Magelang.

BAB IV PENUTUP

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan keinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran berisikan data pendukung berupa Struktur organisasi, Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja, Realisasi Anggaran Tahun anggaran 2019 dan dokumentasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2019 dan ditetapkan dalam bentuk Dokumen

PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun bersangkutan. Perjanjian Kinerja ini hakikatnya merupakan komitmen dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, Perjanjian Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2019.

Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019 telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang
Tahun 2019 pada Indikator Makro

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
INDIKATOR MAKRO KEPALA DAERAH					
A.	MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama				
	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Agama Yang Semakin Meningkat	1.	Angka Usia Harapan Hidup	70,56	tahun
		2.	Indeks Gini	0,296	indeks
		3.	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,4046	indeks
		4.	Persentase penduduk miskin	8	persen
		5.	IPM	75,94	indeks

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
B.	MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing				
	Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang berdaya Saing dan Berbasis Pada Potensi Lokal Daerah	6.	Pertumbuhan PDRB	6,4 – 7,1	persen
		7.	PDRB per kapita	15,06	Juta Rp
		8.	Laju inflansi	4±1	persen
		9.	Rasio penduduk yang bekerja	97,97	persen
		10.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	38,38	Rp.(juta)
		11.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	37,03	persen
		12.	Nilai tukar petani	106,99	
C	MISI III : Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah				
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah	13.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,0017	
D	MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup				
	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Maksimal dengan Berbasis Kelestarian Lingkungan	14.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	95,66	persen
		15.	Luas Wilayah Industri	0,37	persen
E	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis				
	Meningkatnya Manajemen Sistem Pemerintahan Daerah yang Baik, Modern dan Demokratis	16.	Lama Proses Perijinan (Hari)	9	hari
		17.	Opini BPK 'WTP'	WTP	
		18.	Nilai AKIP	B	
F	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat				
	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Serta Kesadaran dan Kepatuhan Hukum	19.	Angka kriminalitas	1,45	indek

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah tahun 2019, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2019

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2019 pada Indikator Makro terdapat 6 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja. Selain Indikator makro terdapat indikator mikro yang diukur sebagai kinerja Kepala Daerah. Jumlah sasaran strategis pada indikator mikro berjumlah 31 sasaran strategis dengan 166 indikator kinerja sasaran strategis, secara terinci sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang
Tahun 2019 pada Indikator Mikro

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
Indikator Mikro					
A.	MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama				
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan	1	Kasus Kematian Ibu Melahirkan*)	11	kasus
		2	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran *)	6,50	kasus
		3	Persentase Balita Gizi Buruk *)	0,15	persen
		4	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup *)	8,00	Permil
		5	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	persen
		6	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100	persen
		7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	persen
		8	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	90,00	persen
		9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	persen
		10	Cakupan Kunjungan Bayi	95,00	persen
2	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol	11	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1,57	persen
		12	Rasio Akseptor KB	81,50	persen
		13	Cakupan Peserta KB Aktif	80,89	persen
		14	Keluarga Pra Sejahtera	20,18	persen
		15	Keluarga Sejahtera I	14,38	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
3	Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkat, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan	16	APK PAUD	54,54	persen
		17	Angka melek huruf	93,95	persen
		18	Angka rata-rata lama sekolah	10	persen
			Angka Partisipasi Murni :		
		19	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,09	persen
		20	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82,65	persen
		21	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	66,56	persen
			<i>Angka partisipasi kasar</i>		
		22	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	101,84	persen
		23	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	97,56	persen
		24	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	80	persen
			Angka Putus Sekolah:		
		25	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,14	persen
		26	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,57	persen
		27	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,81	persen
			<i>Angka Kelulusan:</i>		
		28	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,98	persen
		29	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,99	persen
		30	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,98	persen
			<i>Rerata Nilai UN :</i>		
		31	Rerata Nilai UN SD/MI	7,75	nilai
32	Rerata Nilai UN SMP/MTs	6,49	nilai		
33	Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK	7,18	nilai		
34	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88	persen		
	<i>Angka Melanjutkan :</i>				
35	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	89,62	persen		
36	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	71,55	persen		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		37	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	86,74	persen
		38	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	91,43	persen
4	Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga	39	Jumlah Organisasi Pemuda	27	organisasi
		40	Jumlah Organisasi Olah Raga	36	organisasi
		41	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	19	kegiatan
		42	Jumlah Kegiatan Olah Raga	24	kegiatan
		43	Lapangan Olah Raga	2	permil
5	Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca	44	Jumlah Perpustakaan	815	unit
		45	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	45335	orang
		46	Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	2,24	persen
6	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	47	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2,56	persen
		48	Rasio KDRT	0,02	persen
		49	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	100	persen
7	Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	50	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	34	unit
		51	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	20	persen
8	Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila	52	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	38	kali
		53	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	18	unit
		54	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	70	persen
9	Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri	55	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	19	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
	dan Berperan Serta dalam Pembangunan	56	Cakupan Kelompok Binaan PKK	39,52	persen
		57	Jumlah LSM	6	LSM
B.	MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing				
1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja	58	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	76,65	persen
		59	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	1,28	persen
		60	Pencari Kerja yang Ditempatkan	54,27	persen
		61	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,02	persen
		62	Keselamatan dan Perlindungan	79	persen
		63	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	100	persen
2	Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal	64	Persentase Koperasi Aktif	78,18	persen
		65	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	106.384	UKM non BPR/LKM UKM
		66	Jumlah BPR/LKM	382	BPR/LKM
		67	Usaha Mikro dan Kecil	98	persen
3	Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah	68	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1.164	investor
		69	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	724.647	Juta rupiah
		70	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	31,19	persen
		71	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	359	milyar rupiah
4	Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat	72	Ketersediaan Pangan Utama Beras	188,10	persen
		73	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	87,50	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan		
1	2	3	4	5		
5	Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.		Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar			
		74	Produktivitas Padi	60,1	Kw/ha	
		75	Produksi Padi	355.676	Ton/th	
		76	Produktivitas Jagung	59,3	Kw/ha	
		77	Produksi Jagung	74.337	Ton/th	
		78	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	20,03	persen	
		79	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	71,84	persen	
		80	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB	7,73	persen	
		81	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	11,97	persen	
		82	Cakupan Bina Kelompok Petani	14,9	persen	
			Produksi Hewan ternak			
		83	Sapi potong	1.862.169	kg	
		84	Kerbau	541	kg	
		85	Kambing	793.265	kg	
		86	Domba	1.115.626	kg	
			Produksi Hewan Unggas			
		87	Ayam Pedaging	9.957.100	ton	
		88	Ayam Ras Petelur	1.019.500	ton	
		89	Ayam Buras	1.239.980	ton	
		90	Itik	94.106	ton	
91	Sapi Perah	746.158	liter			
	Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)					
92	Daging	6,2	gr/kap/h r			
93	Telur	4,65	gr/kap/h r			
94	Susu	0,11	gr/kap/h r			
6	Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui	95	Produksi Perikanan (Benih)	2	juta ekor	
		96	Produksi Perikanan Budidaya	18.000	ton	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
	Tingkat Produksi Perikanan	97	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	263,57	ton
		98	Konsumsi Ikan	15,75	Kg/kap/tahun
		99	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)	2,68	persen
7	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	100	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	9,98	persen
		101	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	89	Juta US\$
		102	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	13,55	persen
8	Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah	103	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	16,83	persen
		104	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	17,95	persen
		105	Pertumbuhan Industri.	3,76	persen
9	Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah	106	Kunjungan Wisata Manca Negara	860.549	orang
		107	Kunjungan Wisata Nusantara	6.594.051	orang
		108	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	6,89	persen
C.	MISI III: Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah				
1	Aksesibilitas Antar Daerah Meningkat dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru	109	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	69,73	persen
		110	Rasio Jaringan Irigasi	30,57	persen
		111	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	67,40	persen
2	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan	112	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	84,20	persen
		113	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	2,45	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
	Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat	114	Rumah Layak Huni (%)	62	persen
3	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan	115	Persentase Pertambangan Berijin	50	persen
		116	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	2,64	persen
4	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan	117	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	3.705.271	orang
		118	Jumlah Ijin Trayek	1069	ijin
		119	Rasio Uji Kir Kendaraan	96,7	persen
		120	Jumlah Terminal Bis	8	terminal
		121	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	32	menit
		122	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji	ada	
		123	Pemasangan Rambu-Rambu	94	persen
D.	MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup				
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam	124	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	>30	persen
		125	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	4	persen
		126	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	0	persen
		127	Luas Kawasan Lindung (ha)	25.886	ha
		128	Luas Kawasan Budidaya (ha)	82,687	Ha
		129	Jumlah IMB yang Dikeluarkan	676	IMB
		130	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah	38	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
			Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital		
2	Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya	131	Persentase Penanganan Sampah	31	persen
		132	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	2,10	persen
		133	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	30	persen
		134	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	1,08	persen
		135	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	2.300.000	m ³
3	Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana	136	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	2.822	ha
		137	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	4,66	persen
E.	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis				
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah	138	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada	
		139	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	
		140	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	
		141	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100	persen
2	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik	142	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	0,44	
		143	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	95,54	
		144	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah	4	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
	dengan Standar Pelayanan Minimal	145	Penegakan PERDA	75	persen
		146	Persentase Peningkatan PAD	12,02	persen
		147	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	
		148	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada	
		149	Buku "PDRB Kabupaten"	ada	
		150	Pengelolaan Arsip Secara Baku	100	persen
		151	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	329	orang
3	Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak	152	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	6/0	penyiaran
		153	Web Site Milik Pemerintah Daerah	Ada	
		154	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	9/3	
4	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Capil	155	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	91,87	persen
		156	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	100	persen
		157	Rasio Pasangan Berakte Nikah	1,80	persen
		158	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	
		159	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	33,83	persen
		160	Penyelesaian Izin Lokasi	100	persen
F.	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat				
1	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat	161	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	12	kegiatan
		162	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	12	kegiatan
2	Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat	163	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	100	persen
		164	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		165	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100	persen
		166	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	100	persen

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2019, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2019

Catatan : *) Indikator Negatif

Perjanjian Kinerja Tahun anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang juga memuat besaran anggaran dalam melaksanakan perjanjian kinerja. Jumlah anggaran pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2019 mengacu pada jumlah perubahan anggaran tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		SUMBER ANGGARAN : - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak - Pendapatan Asli Daerah - Hibah - SILPA
	Urusan Pendidikan		
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	906.521.000	
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	154.281.042.586	
3	Program Pendidikan Non Formal	4.570.915.200	
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	912.155.000	
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	43.374.350.900	
	Urusan Kesehatan		
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	10.259.264.000	
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	21.983.810.973	
8	Program Pengawasan Obat dan Makanan	70.000.000	
9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	191.332.000	
10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.842.953.000	
11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	376.800.000	
12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6.015.646.014	
13	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	251.677.000	
14	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	37.386.340.375	
15	Program pengadaan, peningkatan dan	21.185.510.022	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	perbaikan sarana dan pras.puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya		
16	Program pengawasan dan pengendalian kehatan makanan	21.840.000	
17	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	5.461.900.000	
18	Program Managemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	196.677.614.953	
19	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru- paru dan R.S mata	92.259.575.015	
20	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	4.000.000	
21	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	4.000.000	
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
22	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	68.542.136.000	
23	Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong	8.483.169.000	
24	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan	24.250.894.000	
25	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	50.000.000	
26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	715.540.000	
27	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	16.907.185.000	
28	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya	150.000.000	
29	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	8.583.287.400	
30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	503.629.000	
31	Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi	100.000.000	
32	Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	227.445.000	
33	Program Perencanaan Tata Ruang	300.001.000	
34	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	622.817.000	
35	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	220.000.000	
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
36	Program Pengembangan Perumahan	2.010.536.000	
37	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	8.997.774.050	
38	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	37.210.664.000	
39	Program Lingkungan Sehat Perumahan	4.402.875.650	
	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
40	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	4.440.507.250	
41	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.667.902.055	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
42	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	886.386.625	
43	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	37.327.000	
44	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1.372.804.000	
45	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	417.022.000	
46	Program pendidikan politik masyarakat	120.000.000	
47	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	22.432.500	
	Urusan Sosial		
48	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.714.885.345	
49	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	443.035.000	
50	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	112.623.040	
51	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	56.495.060	
52	Program peningkatan disiplin aparatur	638.167.000	
53	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	3.622.333.860	
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
	Urusan Tenaga Kerja		
50	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	988.012.000	
51	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.242.968.000	
52	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	296.179.000	
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
53	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	304.841.000	
54	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	226.806.220	
55	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	191.298.940	
56	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1.349.374.555	
	Urusan Pangan		
57	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.226.972.275	
	Urusan Pertanahan		
58	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	138.550.000	
59	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	27.271.000	
	Urusan Lingkungan Hidup		
60	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	4.105.077.000	
61	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	14.473.799.860	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
62	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.083.482.000	
63	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	85.406.000	
64	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	142.641.000	
65	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	71.800.000	
66	Program Pengembangan Kapasitas dan kemampuan Laboratorium lingkungan	264.871.000	
67	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan.	3.599.776.000	
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil		
68	Program Penataan Administrasi Kependudukan	6.599.081.500	
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
69	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	8.816.413.745	
70	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	475.432.200	
71	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	702.150.920	
72	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	7.108.025.900	
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
73	Program Keluarga Berencana	7.643.980.125	
74	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	49.446.500	
75	Program pelayanan Kontrasepsi	476.225.000	
76	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	250.843.615	
	Urusan Perhubungan		
75	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	804.808.000	
76	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	245.103.000	
77	Program peningkatan pelayanan angkutan	2.079.676.000	
78	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	691.537.500	
79	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.960.281.425	
	Urusan Komunikasi dan Informatika		
80	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	7.596.437.300	
81	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	125.000.000	
82	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	4.077.839.650	
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
83	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	1.494.915.249	
84	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	533.125.500	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Menengah		
85	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	809.224.000	
86	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	249.501.800	
	Urusan Penanaman Modal		
87	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	203.645.270	
88	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	708.565.900	
89	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	89.135.000	
	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
90	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	456.220.090	
91	Program peningkatan peran serta kepemudaan	463.890.195	
92	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	92.902.690	
93	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	4.984.025.210	
94	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	15.476.043.455	
	Urusan Statistik		
95	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	892.965.000	
	Urusan Kebudayaan		
96	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.347.220.000	
97	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	987.769.000	
98	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2.158.366.000	
	Urusan Perpustakaan		
99	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.046.042.500	
	Urusan Kearsipan		
100	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	30.171.000	
101	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	151.640.000	
102	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	267.090.000	
	URUSAN PILIHAN		
	Urusan Kelautan dan Perikanan		
103	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.862.005.500	
104	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	614.878.650	
105	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	100.000.000	
	Urusan Pariwisata		
106	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.485.090.000	
107	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	8.047.383.465	
108	Program Pengembangan Kemitraan	1.266.700.980	
	Urusan Pertanian		

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
109	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	321.229.650	
110	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	325.806.650	
111	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan	557.500.000	
112	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	11.255.824.926	
113	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	609.248.500	
114	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	494.300.000	
115	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	4.340.178.684	
116	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan	84.691.000	
	Urusan Perdagangan		
117	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2.023.729.685	
118	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	263.930.000	
119	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	657.966.390	
120	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan	1.464.076.500	
121	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	43.093.077.000	
	Urusan Perindustrian		
122	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	982.230.000	
	Urusan Transmigrasi		
123	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	175.160.000	
	Urusan Administrasi Pemerintahan		
124	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.161.011.500	
125	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	502.119.610	
126	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.314.604.840	
127	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	25.924.000	
128	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.570.240.000	
129	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	50.755.000	
130	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	155.855.000	
131	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	18.492.490.715	
132	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	18.149.730.500	
133	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.525.119.950	
	Urusan Pengawasan		
134	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1.089.476.030	
135	Program Peningkatan Profesionalisme	170.041.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		
	Urusan Perencanaan		
136	Program Pengembangan Data /Informasi	1.502.865.000	
137	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.486.968.330	
138	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	199.009.500	
139	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	747.404.800	
140	Program Kerjasama Pembangunan	126.495.000	
141	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	134.436.000	
142	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	199.176.000	
	Urusan Kepegawaian		
143	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.475.406.250	
144	Peningkatan Manajemen Kepegawaian	262.367.240	
	Urusan Kelautan dan Perikanan		
103	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.862.005.500	
104	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	614.878.650	
105	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	100.000.000	
	Urusan Pariwisata		
106	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.485.090.000	
107	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	8.047.383.465	
108	Program Pengembangan Kemitraan	1.266.700.980	
	JUMLAH :	1.055.518.378.307	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, 2019

Untuk mendukung pelaksanaan urusan anggaran APBD Kabupaten Magelang setelah perubahan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 1.055.518.378.307,00 (*Satu trilyun lima puluh lima milyar lima ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah*) anggaran tersebut terdiri dari 108 program untuk mendukung pencapaian kinerja pada 31 sasaran strategis dengan 166 Indikator Kinerja. Sumber pendanaan terdiri dari : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Hibah dan SILPA. Jumlah anggaran tersebut merupakan anggaran untuk mendukung program di tiap urusan, sedangkan 4 program (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur dan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan) yang merupakan urusan seluruh SKPD tidak dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan jumlah anggaran Rp. 97.483.803.337,00 (*Sembilan puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah*). Sehingga keseluruhan total APBD Kabupaten Magelang tahun 2019 sebesar Rp. 1.153.002.181.044,00 (*Satu trilyun seratus lima puluh tiga milyar dua juta seratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah*).

Untuk mengetahui dukungan program dan pendanaan dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja, maka dilakukan pemetaan program dan sasaran strategis terhadap capaian indikator strategis pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4.
Dukungan Program dan Pendanaan Sasaran Strategis
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran	
1	2	3	4	5	6	6	8	
A. MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama								
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan	1	Kasus Kematian Ibu Melahirkan*)	11	kasus	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	5.461.900.000	0,517
						Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	196.677.614.953	18,633
						Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan RS mata	92.259.575.015	8,741
						Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	4.000.000	0,000
						Program Pengawasan Obat dan Makanan	70.000.000	0,007
		2	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran *)	6.50	kasus	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	4.000.000	0,000
						Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	251.677.000	0,024
		3	Persentase Balita Gizi Buruk *)	0.15	persen	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.842.953.000	0,175
						Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	21.840.000	0,002
		4	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup *)	8	Permil	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	191.332.000	0,018
		5	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	persen	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	376.800.000	0,036
		6	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100	persen	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	10.259.264.000	0,972
		7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	persen	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	21.983.810.973	2,083

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	6	8
		8	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	90	persen	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6.015.646.014	0,570
		9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	persen	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	43.751.055.375	4,145
		10	Cakupan Kunjungan Bayi	95	persen	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan praspuskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	21.185.510.022	2,007
2	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol	11	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1,57	persen	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	250.843.615	0,024
		12	Rasio Akseptor KB	81,5	persen	Program Keluarga Berencana	7.643.980.125	0,724
		13	Cakupan Peserta KB Aktif	80,89	persen	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	49.446.500	0,005
		14	Keluarga Pra Sejahtera	20,18	persen	Program pelayanan Kontrasepsi	476.225.000	0,0453
		15	Keluarga Sejahtera I	14,38	persen		476.225.000	
3	Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkat, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan	16	APK PAUD	54,54	persen	Program Pendidikan Anak Usia Dini	906.521.000	0,086
		17	Angka melek huruf	93,95	persen	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	43.374.350.900	4,109
		18	Angka rata-rata lama sekolah	10	Tahun	Program Pendidikan Non Formal	4.570.915.200	0,433
			Angka Partisipasi Murni :					
		19	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,09	persen			
		20	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82,65	persen			
		21	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C	66,56	persen	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	154.281.042.586	14,617
			Angka partisipasi kasar					
		22	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	101,84	persen			
		23	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	97,56	persen			
		24	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	80	persen			
	Angka Putus Sekolah:							

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran			
1	2	3		4	5	6	6	8			
		25	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,14	persen						
		26	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,57	persen						
		27	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,81	persen						
			<i>Angka Kelulusan:</i>								
		28	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,98	persen						
		29	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,99	persen						
		30	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,98	persen						
			<i>Rerata Nilai UN :</i>								
		31	Rerata Nilai UN SD/MI	7,75	nilai						
		32	Rerata Nilai UN SMP/MTs	6,49	nilai						
		33	Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK	7,18	nilai						
		34	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88	persen				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	912.155.000	0,086
			<i>Angka Melanjutkan :</i>								
		35	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	89,62	persen						
36	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	71,55	persen								
37	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	86,74	persen								
38	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	91,43	persen								
4	Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga	39	Jumlah Organisasi Pemuda	27	organisasi	Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda	456.220.090	0,043			
						Program peningkatan peran serta kepemudaan	463.890.195	0,044			
		40	Jumlah Organisasi Olah Raga	36	organisasi	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	4.984.025.210	0,472			
		41	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	19	kegiatan	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	92.902.690	0,009			
		42	Jumlah Kegiatan Olah Raga	24	kegiatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	15.476.043.455	1,466			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	6	8
		43	Lapangan Olah Raga	2	permil	Olahraga		
5	Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca	44	Jumlah Perpustakaan	815	unit	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.046.042.500	0,099
		45	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	45.335	orang			
		46	Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	2,24	persen			
6	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	47	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2,56	persen	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	226.806.220	0,021
		48	Rasio KDRT	0,02	persen	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	304.841.000	0,029
		49	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	100	persen	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	191.298.940	0,018
						Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1.349.374.555	0,128
7	Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	50	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	34	unit	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.714.885.345	0,162
		51	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	20	persen	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	443.035.000	0,042
						Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	112.623.040	0,011
						Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	56.495.060	0,005
						Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	3.622.333.860	0,343
8	Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya,	52	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	38	kali	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2.158.366.000	0,204
		53	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	18	unit	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.347.220.000	0,128

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	6	8
	Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila	54	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	70	persen	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	987.769.000	0,094
9	Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan	55	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	19	persen	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	8.816.413.745	0,835
		56	Cakupan Kelompok Binaan PKK	39,52	persen	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	7.108.025.900	0,673
		57	Jumlah LSM	6	LSM	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	475.432.200	0,045
						Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	702.150.920	0,067
B. MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing								
1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja	58	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	76,65	persen	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	988.012.000	0,094
				1,28		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	175.160.000	0,017
		59	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	54,27	persen	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.242.968.000	0,118
		60	Pencari Kerja yang Ditempatkan	3,02	persen	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	296.179.000	0,028
		61	Tingkat Pengangguran Terbuka	76,65	persen			
		62	Keselamatan dan Perlindungan	79	persen			
		63	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	100	persen			
2	Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal	64	Persentase Koperasi Aktif	78,18	persen	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	1.494.915.249	0,142
		65	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	106.384	UKM non BPR/LKM UKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	533.125.500	0,051
		66	Jumlah BPR/LKM	382	BPR/LKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	809.224.000	0,077
		67	Usaha Mikro dan Kecil	98	persen	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	249.501.800	0,024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	6	8
3	Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah	68	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1.164	investor	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	203.645.270	0,019
		69	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	724.647	Juta rupiah	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	657.966.390	0,062
		70	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	31,19	persen	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	708.565.900	0,067
		71	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	359	milyar rupiah	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	89.135.000	0,008
4	Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat	72	Ketersediaan Pangan Utama Beras	188,1	persen	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.226.972.275	0,116
		73	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	87,5				
5	Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.		Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar					0,000
		74	Produktivitas Padi	60,1	Kw/ha	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	11.255.824.926	1,066
		75	Produksi Padi	355.676	Ton/th	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	321.229.650	0,030
		76	Produktivitas Jagung	59,3	Kw/ha	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	325.806.650	0,031
		77	Produksi Jagung	74.337	Ton/th	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan	557.500.000	0,053
		78	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	20,03	Persen	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	609.248.500	0,058
		79	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	71,84	Persen			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran	
1	2	3		4	5	6	6	8	
		80	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB	7,73	Persen				
		81	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	11,97	Persen				
		82	Cakupan Bina Kelompok Petani	14,9	Persen				
			Produksi Hewan ternak						
		83	Sapi potong	1.862.169	Kg	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	494.300.000	0,047	
		84	Kerbau	541	Kg	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	4.340.178.684	0,411	
		85	Kambing	793.265	Kg				
		86	Domba	1.115.626	Kg				
			Produksi Hewan Unggas						
		87	Ayam Pedaging	9.957.100	Ton	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan	84.691.000	0,008	
		88	Ayam Ras Petelur	1.019.500	Ton				
		89	Ayam Buras	1.239.980	Ton				
		90	Itik	94.106	Ton				
		91	Sapi Perah	746.158	Liter				
	Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)								
92	Daging	6,2	gr/kap/hr						
93	Telur	4,65	gr/kap/hr						
94	Susu	0,11	gr/kap/hr						
6	Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan	95	Produksi Perikanan (Benih)	2	juta ekor	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	614.878.650	0,058	
		96	Produksi Perikanan Budidaya	18.000	Ton			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.862.005.500
		97	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	263,57	Ton				
		98	Konsumsi Ikan	15,75	Kg/kap/tahun				
		99	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)	2,68	Persen				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	6	8
7	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	100	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	9,98	Persen	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	45.049.248.500	4,268
		101	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	89	Juta US\$	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2.023.729.685	0,192
		102	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	13,55	Persen	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	263.930.000	0,025
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima /Asongan	1.464.076.500					0,139		
8	Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah	103	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	16,83	Persen	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	982.230.000	0,093
		104	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	17,95	Persen			
		105	Pertumbuhan Industri.	3,76	Persen			
9	Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah	106	Kunjungan Wisata Manca Negara	860.549	Orang	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	8.047.383.465	0,762
		107	Kunjungan Wisata Nusantara	6.594.051	Orang	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.485.090.000	0,141
		108	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	6,89	Persen	Program Pengembangan Kemitraan	1.266.700.980	0,120
C.	MISI III: Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah							
1	Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk	109	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	69,73	Persen	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	68.542.136.000	6,494
						Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan	24.250.894.000	2,298
						Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	50.000.000	0,005
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	715.540.000	0,068
						Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	220.000.000	0,021
						Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	503.629.000	0,048

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	6	8
	Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru	110	Rasio Jaringan Irigasi	30,57	Persen	Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong	8.483.169.000	0,804
		111	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	67,4	Persen	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	16.907.185.000	1,602
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	8.583.287.400	0,813
						Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	227.445.000	0,022
						Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi	100.000.000	0,009
2	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat	112	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	84,2	Persen	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	37.210.664.000	3,525
		113	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	2,45	Persen	Program Pengembangan Perumahan	2.010.536.000	0,190
		114	Rumah Layak Huni (%)	62	Persen	Program Lingkungan Sehat Perumahan	4.402.875.650	0,417
3	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan	116	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	2,64	Persen			
		4	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang	117	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	3.705.271	Orang	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
118	Jumlah Ijin Trayek			1069	Ijin			
119	Rasio Uji Kir Kendaraan			96,7	Persen			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	6	8
	Perhubungan	120	Jumlah Terminal Bis	8	terminal	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	691.537.500	0,066
						Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	245.103.000	0,023
						Program peningkatan pelayanan angkutan	2.079.676.000	0,197
		121	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	32	Menit	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.960.281.425	0,186
		122	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji	ada				
123	Pemasangan Rambu-Rambu	94	Persen	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	245.103.000	0,023		
D.	MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup							
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam	124	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	>30	Persen	Program Perencanaan Tata Ruang	300.001.000	0,028
		125	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	4	Persen			
		126	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	0	Persen	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	622.817.000	0,059
		127	Luas Kawasan Lindung (ha)	25.886	Ha			
		128	Luas Kawasan Budidaya (ha)	82,687	Ha			
		129	Jumlah IMB yang Dikeluarkan	676	IMB			
		130	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	38	Persen			
2	Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta	131	Persentase Penanganan Sampah	31	Persen	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	14.473.799.860	1,371
		132	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata	2,1	Persen	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	4.105.077.000	0,389

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	6	8
	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya		Air			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	85.406.000	0,008
						Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya	150.000.000	0,014
		133	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	30	Persen	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.083.482.000	0,103
		134	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	1,08	Persen	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan	3.599.776.000	0,341
		135	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	2.300.000	m ³	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	142.641.000	0,014
						Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	71.800.000	0,007
						Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	100.000.000	0,009
3	Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana	136	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	2.822	Ha	Program Pengembangan Kapasitas dan kemampuan Laboratorium lingkungan	264.871.000	0,025
		137	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	4,66	Persen			
E.	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis							
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah	138	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada		Program Pengembangan Data /Informasi	1.502.865.000	0,142
		139	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.486.968.330	0,520
		140	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada		Program Kerjasama Pembangunan	126.495.000	0,012
		141	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100	persen	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	134.436.000	0,013

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran	
1	2	3		4	5	6	6	8	
						Program Perencanaan Sosial dan Budaya	747.404.800	0,071	
						Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	199.176.000	0,019	
						Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	892.965.000	0,085	
						Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	199.009.500	0,019	
2	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	142	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	0,44		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.475.406.250	0,235	
						Peningkatan Manajemen Kepegawaian	262.367.240	0,025	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	4.618.645.000	0,438	
						Program peningkatan disiplin aparaturnya	638.167.000	0,060	
		143	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	95,54			Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	25.924.000	0,002
		144	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah	4			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.525.119.950	0,239
							Program Penataan Daerah Otonomi Baru	155.855.000	0,015
							Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	18.149.730.500	1,720
							Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	50.755.000	0,005
		145	Penegakan PERDA	75		persen	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.570.240.000	0,149
							Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.161.011.500	0,110
		146	Persentase Peningkatan PAD	12,02		persen	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	18.492.490.715	1,752
Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	502.119.610						0,048		
147	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	ada			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1.089.476.030	0,103		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	6	8
						Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	170.041.000	0,016
		148	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.314.604.840	0,219
		149	Buku "PDRB Kabupaten"	ada				
		150	Pengelolaan Arsip Secara Baku	100	persen	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	151.640.000	0,014
		151	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan		329	orang	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	30.171.000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	267.090.000						0,025	
3	Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak	152	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	6/0	penyiaran	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	7.596.437.300	0,720
		153	Web Site Milik Pemerintah Daerah	Ada		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	125.000.000	0,012
		154	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	09-Mar		Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	4.077.839.650	0,386
4	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Capil	155	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	91,87	persen	Program Penataan Administrasi Kependudukan	6.599.081.500	0,625
		156	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	100	persen			
		157	Rasio Pasangan Berakte Nikah	1,8	persen			
		158	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah				
		159	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	33,83	persen	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	138.550.000	0,013
		160	Penyelesaian Izin Lokasi	100	persen	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	27.271.000	0,003
F.	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat							
1	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya	161	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	12	kegiatan	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1.372.804.000	0,130
		162	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	12	kegiatan	Program pendidikan politik masyarakat	120.000.000	0,011
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	886.386.625					0,084		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3		4	5	6	6	8
	Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat					Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	417.022.000	0,040
						Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.667.902.055	0,347
						Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	37.327.000	0,004
						Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	22.432.500	0,002
2	Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat	163	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	100	persen	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	4.440.507.250	0,421
		164	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100	persen	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	8.997.774.050	0,852
		165	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	90	persen			
		166	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	100	persen			
Jumlah :							1.055.518.378.307	100

Sumber : BPPKAD dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2019, data diolah



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Kepala

Daerah Kabupaten Magelang merupakan wujud kewajiban Kepala Daerah Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang untuk tahun 2019 . Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang berusaha konsisten dalam hal pelaporan akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan.

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja Organisasi.
- B. Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja
- C. Prestasi

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

A. Pengukuran Kinerja Organisasi

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 dan dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran strategis, dan juga dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD.

Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis indikator, yaitu : indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

- Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi tanda bintang (*) pada indikator kinerja yang dinilai, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Negatif)} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1.
Interval Nilai, Predikat Penilaian dan Kode warna

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2019 , diolah

2. Capaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja per sasaran strategis pada tahun 2019 dilakukan analisis dengan dilakukan perbandingan antar capaian kinerja dan target kinerja tahun 2019 dan target kinerja hingga akhir periode RPJMD pada tahun 2019, hasil analisa sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Pada Indikator Makro

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Capaian 2019			Akhir RPJMD (2019)	
					Target	Kinerja	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Agama Yang Semakin Meningkat	1 Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	73,39	70,56	73,56	104,25	70,56	104,25
		2 Indeks Gini *)	Indeks	0,316	0,296	0,361	78,04	0,295	77,63
		3 Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	0,4057	0,4046	0,447	110,48	0,4046	110,48
		4 Persentase penduduk miskin *)	Persen	11,23	8	10,67	66,63	8,00	66,63
		5 IPM	Indeks	74,17	75,94	69,87	92,01	75,94	92,01
2	Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang berdaya Saing dan Berbasis Pada Potensi Lokal Daerah	6 Pertumbuhan PDRB	Persen	5,06	6,4 – 7,1	5,30	82,81	6,4 - 7,1	82,81
		7 PDRB per kapita	Juta Rp	25,92	15,06	25,18	167,20	15,06	167,20
		8 Laju inflansi	Persen	2,66	4±1	2,12	147,00	4±1	147,00
		9 Rasio penduduk yang bekerja	persen	96,79	97,97	96,88	98,89	97,97	98,89
		10 Pengeluaran konsumsi rumah tangga	Rp.(juta)	44,72	38,38	40,13	104,56	38,38	104,56
		11 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	persen	47,03	37,03	47,11	127,22	37,03	127,22
		12 Nilai tukar petani		103,31	106,99	102,83	96,11	106,99	96,11
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah	13 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan		0,0029	0,0017	0,0023	135,29	0,0017	135,29
4	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Maksimal dengan Berbasis Kelestarian Lingkungan	14 Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	persen	84,61	95,66	87,89	91,88	95,66	91,88
		15 Luas Wilayah Industri	persen	0,37	0,37	0,37	100,00	0,37	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Capaian 2019			Akhir RPJMD (2019)		
					Target	Kinerja	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	Meningkatkan Manajemen Sistem Pemerintahan Daerah yang Baik, Modern dan Demokratis	16	Lama Proses Perijinan (Hari)	hari	9	9	9	100,00	9	100,00
		17	Opini BPK 'WTP'		WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00
		18	Nilai AKIP		CC	B	B	100,00	B	100,00
6	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Serta Kesadaran dan Kepatuhan Hukum	19	Angka kriminalitas *)	indek	0,26	1,45	2,04	59,31	1,45	59,31
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran :							103,25		103,25	

Sumber : Bappeda dan Litbangda 20 data diolah.

Keterangan : *) Indikator negatif

Berdasarkan tabel di atas dalam capaian kinerja sasaran pada indikator makro kepala daerah tahun 2019 rata-rata kinerja sasaran telah tercapai **103,25%** dengan kriteria sangat tinggi, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 sama dengan capaian kinerja sasaran telah tercapai **103,25%** dengan kriteria sangat tinggi, hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator makro sasaran strategis telah tercapai bahkan terlampaui, baik pada target tahun 2019 maupun target akhir periode RPJMD pada tahun 2019. Akan tetapi target capaian kinerja sasaran pada tahun 2019 masih terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu: Indeks Gini, Presentase penduduk miskin, Pertumbuhan PDRB dan Angka kriminalitas yang memiliki capaian kinerja rendah dengan capaian terhadap target kinerja 59,31%

Secara umum capaian kinerja sasaran Kepala Daerah Kabupaten Magelang pada 6 Sasaran dan 19 indikator Kinerja telah mencapai target kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2019 maupun pada target kinerja akhir periode RPJMD pada tahun 2019, kriteria capaian kinerja dengan katagori sangat tinggi dengan skor $91\% \leq 100\%$.

Capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang tahun Anggaran 2019 pada indikator mikro dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Pada Indikator

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
					Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
A.	MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama									
		Urusan : Kesehatan								
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan	1	Kasus Kematian Ibu Melahirkan*)	kasus	6	11	8,00	127,27	11,00	127,27
		2	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran*)	kasus	5,72	6,5	8,33	71,85	6,50	71,85
		3	Persentase Balita Gizi Buruk *)	persen	0,02	0,15	0,02	186,67	0,15	186,67
		4	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup*)	Permil	6,7	8	8,98	87,75	8,00	87,75
		5	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	persen	100	100	100	100,00	100,00	100,00
		6	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	persen	100	100	100	100,00	100,00	100,00
		7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	persen	100	100	100	100,00	100,00	100,00
		8	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	persen	41	90	100	110,56	90,00	110,56
		9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	persen	88,3	100	95	95,40	100,00	95,40
		10	Cakupan Kunjungan Bayi	persen	98,89	95	97,26	102,38	95,00	102,38
		Rata-rata Capaian Sasaran :						108,19		108,19
2	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol	Urusan: Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
		11	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga *)	persen	1,14	1,57	1,16	126,11	1,57	126,11
		12	Rasio Akseptor KB	persen	73,08	81,5	75,52	92,66	81,5	92,66
		13	Cakupan Peserta KB Aktif	persen	73,08	80,89	75,52	93,36	80,89	93,36

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
						Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
		14	Keluarga Pra Sejahtera *)	persen	21,23	20,18	20,69	97,47	20,18	97,47	
		15	Keluarga Sejahtera I *)	persen	15,29	14,38	14,74	97,50	14,38	97,50	
		Rata-rata Capaian Sasaran :						101,42		101,42	
3	Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkatkan, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan	Urusan: Pendidikan									
		16	APK PAUD	persen	62,64	54,54	59,74	109,53	54,54	109,53	
		17	Angka melek huruf	persen	94,63	93,95	94,63	100,72	93,95	100,72	
		18	Angka rata-rata lama sekolah	persen	7,4	10	7,40	74,00	10,00	74,00	
			Angka Partisipasi Murni :								
		19	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	persen	92,66	97,09	91,32	94,06	97,09	94,06	
		20	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	persen	67,76	82,65	66,32	80,24	82,65	80,24	
		21	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	persen	NA	66,56	NA	NA	66,56	NA	
			<i>Angka partisipasi kasar</i>								
		22	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	persen	105,87	101,84	102,65	100,80	101,84	100,80	
		23	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	persen	88,38	97,56	87,18	89,36	97,56	89,36	
		24	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	persen	NA	80	NA	NA	80,00	NA	
			Angka Putus Sekolah:								
		25	Angka Putus Sekolah SD/MI *)	persen	0,05	0,14	0,05	164,29	0,14	164,29	
		26	Angka Putus Sekolah SMP/MTs *)	persen	0,24	0,57	0,19	166,67	0,57	166,67	
		27	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA *)	persen	NA	0,81	NA	NA	0,81	NA	
			<i>Angka Kelulusan:</i>								
		28	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	persen	100	99,98	99,99	100,01	99,98	100,02	
		29	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	persen	99,91	99,99	100	99,80	99,99	99,80	
		30	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	persen	NA	99,98	NA	NA	99,98	NA	
		<i>Rerata Nilai UN :</i>									

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)	
						Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		31	Rerata Nilai UN SD/MI	nilai	7,03	7,75	6,64	85,68	7,75	85,68
		32	Rerata Nilai UN SMP/MTs	nilai	5,98	6,49	6,11	94,14	6,49	94,14
		33	Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK	nilai	NA	7,18	NA	NA	7,18	NA
		34	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	87,42	88	93,63	106,40	88,00	106,40
			<i>Angka Melanjutkan :</i>							
		35	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	persen	90,72	89,62	97,75	109,07	89,62	109,07
		36	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	persen	79,18	71,55	77,53	108,36	71,55	110,66
		37	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	persen	73,2	86,74	84,21	97,08	86,74	97,08
		38	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	persen	78,28	91,43	84,16	92,05	91,43	92,05
		Rata-rata Capaian Sasaran :						104,01		104,01
4	Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga	Urusan: Kepemudaan dan Olah Raga								
		39	Jumlah Organisasi Pemuda	organisasi	27	27	26	96,30	27	96,30
		40	Jumlah Organisasi Olah Raga	organisasi	35	36	35	97,22	36	97,22
		41	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	kegiatan	20	19	17	89,47	19	89,47
		42	Jumlah Kegiatan Olah Raga	kegiatan	24	24	24	100,00	24	100,00
		43	Lapangan Olah Raga	permil	1,25	2	1,20	60,00	2	60,00
		Rata-rata Capaian Sasaran :						88,60		88,60
5	Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca	Urusan : Perpustakaan								
		44	Jumlah Perpustakaan	unit	797	815	841	103,19	815	103,19
		45	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	76.548	45335	95.965	211,68	45335	211,68
		46	Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	persen	2,24	2,24	2,31	103,13	2,24	103,13
		Rata-rata Capaian Sasaran :						139,33		139,33

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
					Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
		47	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	persen	1,98	2,56	1,65	64,45	2,56	64,45
		48	Rasio KDRT *)	persen	0,023	0,02	0,02	115,00	0,02	115,00
		49	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	persen	75,51	100	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Capaian Sasaran :							93,15		93,15	
7	Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	Urusan : Sosial								
		50	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	unit	39	34	39,00	114,71	34,00	114,71
		51	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	persen	46,32	20	42,13	210,65	20,00	210,65
Rata-rata Capaian Sasaran :							162,68		162,68	
8	Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila	Urusan : Kebudayaan								
		52	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	kali	38	38	38	100,00	38	100,00
		53	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	unit	18	18	18	100,00	18	100,00
		54	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	persen	100	70	100	142,86	70,00	142,86
Rata-rata Capaian Sasaran :							114,29		114,29	
9	Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan	Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
		55	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	persen	20	19	7,53	40,00	19,00	40,00
		56	Cakupan Kelompok Binaan PKK	persen	24,82	39,52	27,39	69,31	39,52	69,31
		57	Jumlah LSM (Bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat)	LSM	4	6	4,00	66,67	6	66,67
Rata-rata Capaian Sasaran :							58,66		58,66	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
					Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B.	MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing									
1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja	Urusan: Ketenagakerjaan								
		58	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	persen	71,28	76,65	74,55	97,26	76,65	97,26
		59	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun*)	persen	2,7	1,28	1,09	114,84	1,28	114,84
		60	Pencari Kerja yang Ditempatkan	persen	42,86	54,27	51,88	95,60	54,27	95,60
		61	Tingkat Pengangguran Terbuka*)	persen	2,91	3,02	3,12	96,69	3,02	96,69
		62	Keselamatan dan Perlindungan	persen	NA	79	NA	NA	79,00	NA
		63	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	persen	100	100	100,00	100,00	100	100,00
		Rata-rata Capaian Sasaran :					84,06		84,06	
2	Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal	Urusan : Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
		64	Persentase Koperasi Aktif	persen	94	78,18	94,00	120,24	78,18	120,24
		65	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	UKM non BPR/LKM UKM	106.600,00	106.384	106.600,00	100,20	106384	100,20
		66	Jumlah BPR/LKM	BPR/LKM	297	382	297,00	77,75	382	77,75
		67	Usaha Mikro dan Kecil	persen	1,15	98	1,15	1,17	98	1,17
		Rata-rata Capaian Sasaran :					74,84		74,84	
3	Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah	Urusan: Penanaman Modal								
		68	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	investor	1.194,00	1.164	2.384	204,81	1.164	204,81
		69	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Juta rupiah	1.976.374,00	724.647	1.976.374	272,74	724.647	272,74
		70	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	persen	31,43	31,19	31,43	100,77	31,19	100,77
		71	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	milyar rupiah	945,69	359	945,69	263,42	359	263,42
		Rata-rata Capaian Sasaran :					210,43		210,43	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
					Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat	Urusan: Ketahanan Pangan								
		72	Ketersediaan Pangan Utama Beras	persen	220,23	188,1	199,50	106,06	188,10	106,06
		73	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah		87,9	87,5	88,00	100,57	87,50	100,57
Rata-rata Capaian Sasaran :							103,32		103,32	
5	Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	Urusan: Pertanian								
		Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar								
		74	Produktivitas Padi	Kw/ha	63,7	60,1	62,79	104,48	60,1	104,48
		75	Produksi Padi	Ton/th	478.266,00	355.676	436.593,00	122,75	355.676	122,75
		76	Produktivitas Jagung	Kw/ha	63,53	59,3	68,92	116,22	59,3	116,22
		77	Produksi Jagung	Ton/th	51.446,00	74.337	41.776,00	56,20	74.337	56,20
		78	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	persen	21,78	20,03	21,78	108,74	20,03	108,74
		79	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	persen	72,11	71,84	72,11	100,38	71,84	100,38
		80	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB	persen	5,68	7,73	5,68	73,48	7,73	73,48
		81	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	persen	17,65	11,97	17,65	147,45	11,97	147,45
		82	Cakupan Bina Kelompok Petani	persen	12,42	14,9	12,42	83,36	14,9	83,36
		Produksi Hewan ternak								
		83	Sapi potong	kg	1.826.011,00	1.862.169	1.862.342	100,01	1.862.169	100,01
		84	Kerbau	kg	693,2	541	693	128,10	541	128,10
85	Kambing	kg	737.749,00	793.265	793.276	100,00	793.265	100,00		
86	Domba	kg	1.043.219,00	1.115.626	1.115.659	100,00	1.115.626	100,00		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)	
					Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Produksi Hewan Unggas							
		87 Ayam Pedaging	ton	9.762,02	9.957.100	9.958.094	100,01	9.957.100	100,01
		88 Ayam Ras Petelur	ton	991,59	1.019.500	1.064.208	104,39	1.019.500	104,39
		89 Ayam Buras	ton	1.168,78	1.239.980	1.240.374	100,03	1.239.980	100,03
		90 Itik	ton	92,3	94.106	95.455	101,43	94.106	101,43
		91 Sapi Perah	liter	731.634,00	746.158	746.220	100,01	746.158	100,01
		Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)							
		92 Daging	gr/kap/hr	5,96	6,2	6,03	97,31	6,2	97,31
		93 Telur	gr/kap/hr	4	4,65	4,06	87,33	4,65	87,33
		94 Susu	gr/kap/hr	0,04	0,11	0,04	39,09	0,11	39,09
		Rata-rata Capaian Sasaran :					98,61		98,61
6	Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan	Urusan: Kelautan dan Perikanan							
		95 Produksi Perikanan (Benih)	juta ekor	2,01	2	2,00	100,00	2,00	100,00
		96 Produksi Perikanan Budidaya	ton	23.097,01	18.000	25.122,84	139,57	18.000,00	139,57
		97 Produksi Perikanan Tangkap (ton)	ton	278,14	263,57	301,00	114,20	263,57	114,20
		98 Konsumsi Ikan	Kg/kap/tahun	19,6	15,75	21,27	135,05	15,75	135,05
		99 Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)	persen	2,29	2,68	2,29	85,45	2,68	85,45
		Rata-rata Capaian Sasaran :					114,85		114,85
7	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	Urusan: Perdagangan							
		100 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	persen	10,85	9,98	10,85	108,72	9,98	108,72
		101 Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	Juta US\$	50,87	89	50,87	57,16	89,00	57,16

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)	
						Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		102	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	persen	3,9	13,55	3,90	28,78	13,55	28,78
Rata-rata Capaian Sasaran :								64,89		64,89
8	Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah	Urusan: Perindustrian								
		103	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	persen	2,95	16,83	2,82	16,76	16,83	16,76
		104	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	persen	19,55	17,95	18,82	104,85	17,95	104,85
		105	Pertumbuhan Industri.	persen	3,7	3,76	3,21	85,37	3,76	85,37
Rata-rata Capaian Sasaran :								96,86		90,40
9	Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah	Urusan: Pariwisata								
		106	Kunjungan Wisata Manca Negara	orang	358.673,00	860.549	361.050	41,96	860.549	41,96
		107	Kunjungan Wisata Nusantara	orang	5.977.422,00	6.594.051	6.150.331	93,27	6.594.051	93,27
		108	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	persen	5,1	6,89	5,15	74,75	6,89	74,75
Rata-rata Capaian Sasaran :								69,99		69,99
C.	MISI III: Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah									
1	Aksesibilitas Antar Daerah Meningkat dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru	Urusan: Pekerjaan Umum								
		109	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	persen	74,17	69,73	74,79	107,26	69,73	107,26
		110	Rasio Jaringan Irigasi	persen	43,68	30,57	65,43	214,03	30,57	214,03
		111	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	persen	65,93	67,4	67,80	100,59	67,40	100,59
Rata-rata Capaian Sasaran :								140,63		140,63
2	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana	Urusan: Perumahan								
		112	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	persen	82,8	84,2	95,21	113,08	84,20	113,08
		113	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	persen	2	2,45	2,16	88,16	2,45	88,16

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)	
						Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat	114	Rumah Layak Huni (%)	persen	80	62	80,00	129,03	62	129,03
Rata-rata Capaian Sasaran :								110,09		110,09
3	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan	Urusan: Energi dan Sumber Daya Mineral								
		115	Persentase Pertambangan Berijin	persen	NA	50	NA	NA	50	NA
		116	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	persen	NA	2,64	NA	NA	2,64	NA
Rata-rata Capaian Sasaran :								NA		NA
4	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan	Urusan: Perhubungan								
		117	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	orang	3.121.745,00	3.705.271	2.373.220,00	64,05	3.705.271	64,05
		118	Jumlah Ijin Trayek	ijin	976	1069	803,00	75,12	1069	75,12
		119	Rasio Uji Kir Kendaraan	persen	88,1	96,7	89,87	92,94	96,7	92,94
		120	Jumlah Terminal Bis	terminal	6	8	6,00	75,00	8	75,00
		121	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	menit	32	32	32,00	100,00	32	100,00
		122	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji		ada	ada	ada	100,00	ada	100,00
		123	Pemasangan Rambu-Rambu	persen	111,72	94	111,72	118,85	94,00	118,85
Rata-rata Capaian Sasaran :								89,42		89,42
D.	MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup									
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam	Urusan: Penataan Ruang								
		124	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	persen	31	>30	39,59	133,33	>30	133,33
		125	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	persen	3,6	4	3,60	90,00	4,00	90,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)	
						Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		126	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	persen	0	0	0,00	100,00	0	100,00
		127	Luas Kawasan Lindung (ha)	ha	25.886,00	25.886	25.886,00	100,00	25.886	100,00
		128	Luas Kawasan Budidaya (ha)	Ha	82,69	82,687	82,69	100,00	82,687	100,00
		129	Jumlah IMB yang Dikeluarkan	IMB	346	676	432	63,91	676	63,91
		130	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	persen	32	38	32	84,21	38	84,21
		Rata-rata Capaian Sasaran :						95,92		97,75
2	Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kesenambungan Sumber Daya	Urusan: Lingkungan Hidup								
		131	Persentase Penanganan Sampah	persen	33,6	31	38,07	122,81	31	122,81
		132	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	persen	4,1	2,1	6,30	300,00	2,10	300,00
		133	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	persen	38,84	30	43,80	146,00	30,00	146,00
		134	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	persen	2,32	1,08	2,32	214,81	1,08	214,81
		135	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	m ³	297.475	2.300.000	297.475,00	12,93	2.300.000	12,93
		Rata-rata Capaian Sasaran :						142,71		159,31
3	Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana	Urusan: Kehutanan								
		136	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	ha	NA	2.822	NA	NA	2,822	NA
		137	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	persen	NA	4,66	NA	NA	4,66	NA
		Rata-rata Capaian Sasaran :						NA		NA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)	
					Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E.	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis								
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah	Urusan: Perencanaan Pembangunan							
138		Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
139		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
140		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
141		Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPd	persen	94,57	100	85,33	85,33	100	85,33
Rata-rata Capaian Sasaran :							96,33		96,33
2	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatkan Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
142		Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk		0,69	0,44	0,66	149,44	0,44	149,44
143		Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk		88,13	95,54	87,82	91,92	95,54	91,92
144		Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah		4	4	4,00	100,00	4	100,00
145		Penegakan PERDA	persen	95,29	75	93,48	124,64	75	124,64
146		Persentase Peningkatan PAD	persen	17,89	12,02	28,33	235,69	12,02	235,69
147		Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		Ada	ada	100,00	100,00	Ada	100,00
Urusan : Statistik									
148		Buku "Kabupaten Dalam Angka"		Ada	ada	ada	100,00	Ada	100,00
149		Buku "PDRB Kabupaten"		Ada	ada	ada	100,00	Ada	100,00
Urusan : Kearsipan									
150		Pengelolaan Arsip Secara Baku	persen	89,77	100	106,52	106,52	100	106,52

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)	
						Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		151	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	orang	901	329	1.151,00	349,85	329	349,85
		Rata-rata Capaian Sasaran :						159,53		159,53
3	Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak	Urusan : Komunikasi dan Informatika								
		152	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	penyiaran	8	6	8,00	133,33	6	133,33
		153	Web Site Milik Pemerintah Daerah		Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
		154	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal		9/3	9/3	9/3	100,00	9/3	100,00
		Rata-rata Capaian Sasaran :						150,90		111,11
4	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Sipil	Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil								
		155	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	persen	96,13	91,87	98,68	107,41	91,87	107,41
		156	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	persen	94,29	100	91,92	91,92	100	91,92
		157	Rasio Pasangan Berakte Nikah	persen	34,26	1,8	46,57	2.587,22	1,8	2.587,22
		158	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	100,00	sudah	100,00
		Urusan : Pertanahan								
		159	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	persen	53,41	33,83	53,41	157,88	33,83	157,88
		160	Penyelesaian Izin Lokasi	persen	100	100	100,00	100,00	100	100,00
		Rata-rata Capaian Sasaran :						608,89		736,11
F.	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat									
1	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat	Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
		161	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	kegiatan	12	12	12,00	100,00	12	100,00
		162	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	kegiatan	12	12	12,00	100,00	12	100,00
		Rata-rata Capaian Sasaran :						100,00		100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
					Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat	Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
		163	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	persen	100	100	98,97	98,97	100	98,97
		164	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	persen	100	100	103,51	103,51	100	103,51
		165	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	persen	86,25	100	100,00	100,00	100	100,00
		166	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	persen	96,66	100	94,00	94,00	100	94,00
Rata-rata Capaian Sasaran :							99,12		99,12	
Rata-Rata Capaian Indiaktor Mikro :							125,17		125,17	

Sumber : Perangkat Daerah terkait dan Bagian Organisasi 2020, data diolah.

Keterangan :

“NA” : Not Available, dimana data tidak tersedia dikarenakan bukan kewenangan kabupaten dan menjadi kewenangan provinsi/pusat

Berdasarkan tabel di atas dalam capaian kinerja sasaran pada indikator mikro Kepala Daerah Tahun 2019 telah melampaui target dengan rata-rata kinerja sasaran telah tercapai 125,17% dengan kriteria sangat tinggi jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 tidak terlalu jauh dimana capaian kinerja sasaran telah tercapai 125,17% dengan kriteria sangat tinggi, hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator mikro sasaran startegis telah tercapai bahkan terlampaui pada target Tahun 2019 dan target akhir periode RPJMD pada tahun 2019 telah terlampaui.

Realisasi anggaran per program Pemerintah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2019 secara detail pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Per Program
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
A	Pelaksanaan Urusan			
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	906.521.000	827.247.050	91,26
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	154.281.042.586	50.404.986.620	32,67
3	Program Pendidikan Non Formal	4.570.915.200	3.789.881.470	82,91
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	912.155.000	866.662.860	95,01
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	43.374.350.900	41.135.011.296	94,84
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	10.259.264.000	6.499.305.394	63,35
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	21.983.810.973	16.950.535.063	77,10
8	Program Pengawasan Obat dan Makanan	70.000.000	67.774.100	96,82
9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	191.332.000	190.707.850	99,67
10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.842.953.000	1.827.738.000	99,17
11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	376.800.000	321.272.500	85,26
12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6.015.646.014	5.780.929.924	96,10
13	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	251.677.000	235.827.480	93,70
14	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	43.751.055.375	38.519.774.589	88,04
15	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pras.puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	21.185.510.022	19.141.007.263	90,35

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
16	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	21.840.000	21.839.775	100,00
17	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	5.461.900.000	2.430.060.009	44,49
18	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	196.677.614.953	141.012.029.811	71,70
19	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata	92.259.575.015	83.780.172.776	90,81
20	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	4.000.000	3.999.680	99,99
21	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	4.000.000	3.999.115	99,98
22	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	68.542.136.000	56.213.375.027	82,01
23	Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong	8.483.169.000	7.289.786.723	85,93
24	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan	24.250.894.000	21.907.624.544	90,34
25	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	50.000.000	46.225.000	92,45
26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	715.540.000	706.530.380	98,74
27	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	16.907.185.000	15.092.520.375	89,27
28	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya	150.000.000	148.865.700	99,24
29	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	8.583.287.400	7.330.608.387	85,41
30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	503.629.000	458.450.574	91,03
31	Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi	100.000.000	98.679.296	98,68
32	Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	227.445.000	224.649.850	98,77
33	Program Perencanaan Tata Ruang	300.001.000	287.794.025	95,93
34	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	622.817.000	579.729.435	93,08
35	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	220.000.000	219.473.915	99,76
36	Program Pengembangan Perumahan	2.010.536.000	1.814.979.130	90,27
37	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	8.997.774.050	8.920.078.479	99,14

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
38	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	37.210.664.000	21.441.314.882	57,62
39	Program Lingkungan Sehat Perumahan	4.402.875.650	3.764.528.171	85,50
40	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	4.440.507.250	3.841.345.353	86,51
41	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.667.902.055	3.463.402.411	94,42
42	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	886.386.625	877.757.465	99,03
43	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	37.327.000	37.306.000	99,94
44	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1.372.804.000	553.174.940	40,30
45	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	417.022.000	392.751.880	94,18
46	Program pendidikan politik masyarakat	120.000.000	117.900.000	98,25
47	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	22.432.500	22.432.500	100,00
48	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.714.885.345	1.628.967.640	94,99
49	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	443.035.000	433.625.615	97,88
50	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	112.623.040	110.284.100	97,92
51	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	56.495.060	49.874.160	88,28
52	Program peningkatan disiplin aparat	638.167.000	546.409.613	85,62
53	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	3.622.333.860	3.611.143.361	99,69
54	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	988.012.000	959.221.480	97,09
55	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.242.968.000	1.186.111.690	95,43
56	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	296.179.000	295.635.800	99,82
57	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	304.841.000	298.419.988	97,89

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
58	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	226.806.220	222.343.260	98,03
59	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	191.298.940	188.994.940	98,80
60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1.349.374.555	1.338.557.486	99,20
61	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.226.972.275	1.175.168.793	95,78
62	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	138.550.000	126.903.320	91,59
63	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	27.271.000	25.274.600	92,68
64	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	4.105.077.000	3.870.899.371	94,30
65	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	14.473.799.860	9.379.221.212	64,80
66	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.083.482.000	1.000.242.943	92,32
67	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	85.406.000	84.018.980	98,38
68	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	142.641.000	139.655.300	97,91
69	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	71.800.000	70.262.900	97,86
70	Program Pengembangan Kapasitas dan kemampuan Laboratorium lingkungan	264.871.000	172.467.704	65,11
71	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan.	3.599.776.000	3.458.072.250	96,06
72	Program Penataan Administrasi Kependudukan	6.599.081.500	6.460.864.298	97,91
73	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	8.816.413.745	8.123.593.339	92,14
74	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	475.432.200	465.328.358	97,87
75	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	702.150.920	673.767.687	95,96
76	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	7.108.025.900	6.800.717.219	95,68
77	Program Keluarga Berencana	7.643.980.125	6.993.878.821	91,50
78	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	49.446.500	49.446.305	100,00
79	Program pelayanan Kontrasepsi	476.225.000	472.744.115	99,27

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
80	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	250.843.615	248.138.290	98,92
81	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	804.808.000	720.514.685	89,53
82	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	245.103.000	241.748.705	98,63
83	Program peningkatan pelayanan angkutan	2.079.676.000	1.752.756.467	84,28
84	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	691.537.500	589.385.070	85,23
85	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.960.281.425	143.307.670	7,31
86	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	7.596.437.300	7.448.256.620	98,05
87	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	125.000.000	119.728.900	95,78
88	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	4.077.839.650	3.665.469.809	89,89
89	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	1.494.915.249	1.334.748.850	89,29
90	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	533.125.500	519.705.785	97,48
91	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	809.224.000	783.826.360	96,86
92	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	249.501.800	248.164.450	99,46
93	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	203.645.270	198.096.830	97,28
94	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	708.565.900	682.393.545	96,31
95	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	89.135.000	87.675.980	98,36
96	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	456.220.090	397.985.455	87,24
97	Program peningkatan peran serta kepemudaan	463.890.195	450.424.910	97,10
98	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	92.902.690	87.132.690	93,79
99	Program Pembinaan dan Pemasaryatan Olahraga	4.984.025.210	4.588.143.040	92,06
100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	15.476.043.455	8.415.247.612	54,38
101	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	892.965.000	861.131.000	96,44

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
102	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.347.220.000	1.332.285.415	98,89
103	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	987.769.000	898.907.737	91,00
104	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2.158.366.000	2.112.982.350	97,90
105	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.046.042.500	971.956.625	92,92
106	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	30.171.000	29.732.420	98,55
107	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	151.640.000	149.392.953	98,52
108	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	267.090.000	262.511.830	98,29
109	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.862.005.500	1.613.943.920	86,68
110	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	614.878.650	612.414.300	99,60
111	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	100.000.000	97.478.800	97,48
112	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.485.090.000	1.421.210.020	95,70
113	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	8.047.383.465	6.394.726.973	79,46
114	Program Pengembangan Kemitraan	1.266.700.980	1.218.363.101	96,18
115	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	321.229.650	294.379.490	91,64
116	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	325.806.650	309.585.555	95,02
117	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan	557.500.000	408.336.230	73,24
118	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	11.255.824.926	7.558.895.340	67,16
119	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	609.248.500	609.224.295	100,00
120	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	494.300.000	487.481.380	98,62
121	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	4.340.178.684	3.998.618.986	92,13
122	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan	84.691.000	84.467.350	99,74
123	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2.023.729.685	1.871.145.791	92,46
124	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	263.930.000	262.331.600	99,39

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
125	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	657.966.390	638.598.850	97,06
126	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan	1.464.076.500	1.186.266.599	81,02
127	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	45.049.248.500	41.799.703.589	92,79
128	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	982.230.000	957.445.245	97,48
129	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	175.160.000	172.477.810	98,47
130	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.161.011.500	1.102.868.410	94,99
131	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	502.119.610	497.884.490	99,16
132	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.314.604.840	1.961.259.398	84,73
133	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	25.924.000	24.131.850	93,09
134	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.570.240.000	1.528.780.219	97,36
135	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	50.755.000	48.536.644	95,63
136	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	155.855.000	47.101.800	30,22
137	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	18.492.490.715	16.358.887.434	88,46
138	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	18.149.730.500	16.313.231.433	89,88
139	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.525.119.950	2.355.279.800	93,27
140	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1.089.476.030	1.038.001.170	95,28
141	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	170.041.000	160.291.460	94,27
142	Program Pengembangan Data /Informasi	1.502.865.000	1.380.271.522	91,84
143	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.486.968.330	5.094.142.715	92,84
144	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	199.009.500	197.823.012	99,40
145	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	747.404.800	721.081.551	96,48
146	Program Kerjasama Pembangunan	126.495.000	122.693.796	96,99

No	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
147	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	134.436.000	126.551.155	94,13
148	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	199.176.000	195.417.900	98,11
149	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.475.406.250	2.136.888.228	86,32
150	Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian	262.367.240	259.305.796	98,83
Sub Jumlah :		1.055.518.378.307	793.083.440.775	75,14
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	21.890.483.585	92,26	92,26
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	54.899.918.307	82,41	82,41
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.794.475.563	96,32	96,32
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.091.697.800	97,50	97,50
Sub Jumlah :		97.483.803.337	83.676.575.255	85,84
Total Anggaran :		1.153.002.181.644	876.760.016.030	76,04

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang 2020, data realisasi keuangan unaudited diolah.

Realisasi anggaran Kabupaten Magelang pada tahun 2019 mencapai rata-rata 76,04% dengan katagori **Sedang** jika dibandingkan dengan serapan tahun sebelumnya sebesar rata-rata 82,94%, maka realisasi realisasi anggaran program menurun sebesar 6,90%. Tingkat capaian terbanyak adalah kriteria Sangat Tinggi (91% % ≤ 100%) dengan jumlah program 111(72,08%) dibandingkan dengan tahun lalu realisasi program tertinggi sebesar 105 (66,46%), maka pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 6 program atau 5,62%. Capaian program Sangat Rendah dengan katagori capaian sedang (≤ 50 %) sebanyak 5 (3,25%), jika dibandingkan dengan serapan anggaran tahun sebelumnya sebanyak 5 (3,16%) program, maka jumlah realisasi anggaran program pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 0,09%, hal ini menunjukkan kinerja serapan anggaran pada tahun 2019 mengalami penurunan. Secara detail rekapitulasi realisasi anggaran per program Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun anggaran 2019

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Jumlah Program
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	111 (72,08%)
2	76% ≤ 90%	Tinggi	30 (19,48%)
3	66 % ≤ 75%	Sedang	4 (2,60%)
4	51% ≤ 65%	Rendah	4 (2,60%)
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	5 (3,25%)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang 2020, data diolah.

B. Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Magelang Tahun 2019, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2019 terhadap indikator makro sejumlah 6 (enam) sasaran strategis dan 19 (Sembilan belas) indikator kinerja serta indikator mikro sejumlah 31 (tiga puluh satu) sasaran strategis dan 166 (seratus enam puluh enam) indikator kinerja. Perjanjian Kinerja didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bupati Magelang Tahun 2019 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang 2014-2019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Magelang. LKjIP ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan target pada tahun V (kelima) dari RPJMD Kabupaten Megelang 2014-2019.

Capaian kinerja Bupati Magelang tahun 2019 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan, evaluasi kinerja dipilah-pilah berdasarkan sasaran strategis pada indikator makro dan indikator mikro.

Evaluasi pencapaian kinerja pada indikator makro per sasaran strategis tahun 2019 pada data kinerja masih menggunakan data penghitungan/estimasi dari Bappeda dan Litbangda, hal ini dilakukan karena data belum secara lengkap dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten magelang sampai batas periode pelaporan, hasil analisa capaian indikator strategis sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis I** : Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Agama Yang Semakin Meningkat

Capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kehidupan Agama Yang Semakin Meningkat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Kepala Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2019 .

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Capaian 2019			Akhir RPJMD (2019)		
			Target	Kinerja	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	73,39	70,56	73,56	104,25	70,56	104,25
2	Indeks Gini *)	indeks	0,316	0,296	0,361	78,04	0,295	77,63
3	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	indeks	0,4057	0,4046	0,447	110,48	0,4046	110,48
4	Persentase penduduk miskin *)	persen	11,23	8	10,67	66,63	8	66,63
5	IPM	indeks	74,17	75,94	69,87	92,01	75,94	92,01
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						90,28		90,28

Sumber : Bappeda dan litbangda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang 2020, data diolah

Rata-rata capaian kinerja sasaran pada sasaran strategis terwujudnya kualitas sumber daya manusia dan kehidupan agama yang semakin meningkat terhadap 5 indikator kinerja hampir mencapai target yang telah ditetapkan di Tahun 2019 sebesar 90,28% dengan capaian sangat tinggi, demikian juga terhadap target akhir RPJMD di tahun 2019 sebesar 90,28% dengan capaian sangat tinggi.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Agama Yang Semakin Meningkat ini didorong oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien;
- b. Ketersediaan dana yang dimanfaatkan secara optimal
- c. Iklim sosial, ekonomi dan politik yang cukup kondusif
- d. Partisipasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder.

Pada pencapaian target kinerja sasaran terdapat satu indikator yaitu indikator persentase penduduk miskin masuk katagori sedang nilai

capaian kinerja 66,63% (Sedang) terhadap target kinerja tahun 2019, demikian pula terhadap target kinerja akhir RPJMD pada tahun 2019 masuk katagori sedang. Jika dilihat perbandingan dengan provinsi dan nasional, selama 5 (lima) tahun terakhir indikator kemiskinan, khususnya persentase angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin secara umum menunjukkan kecenderungan menurun. Pada periode Maret tahun 2019, capaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang lebih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (10,80%), namun masih berada di atas capaian nasional (9,41%). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Persentase Kemiskinan Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional
Tahun 2014-2019

No	Wilayah	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Magelang	12,98	13,07	12,67	12,42	11,23	10,67
2	Prov. Jawa Tengah	13,58	13,58	13,27	13,01	11,32	10,80
3	Nasional	11,25	11,22	10,86	10,64	9,82	9,41

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2020

Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja persentase penduduk miskin adalah:

- a. Data base kemiskinan belum sepenuhnya digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.
- b. Penanggulangan kemiskinan belum memaksimalkan integrasi berbagai sektor dan *stakeholder* yang terkait, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal.
- c. Kenaikan biaya hidup masyarakat seperti kenaikan BBM, listrik, pajak, tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat khususnya kaum petani yang merupakan masyarakat penyumbang penduduk miskin terbesar di Kabupaten Magelang.

Upaya untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magelang adalah :

1. Program kegiatan Perangkat Daerah diarahkan pada sasaran dan lokasi prioritas desa tertinggal.
2. Masih tingginya kemiskinan di daerah perdesaan, sehingga program penanggulangan kemiskinan agar diarahkan di

perdesaan khususnya pemberdayaan di sektor pertanian (*On Farm dan Off Farm Oriented*)

3. Perangkat Daerah Provinsi diharapkan sinergis dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya penanggulangan kemiskinan
4. Tahun 2019 merupakan tahap akhir RPJMD 2014-2019, diharapkan program/kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan HITS (holistik, integratif, tematik, spasial).

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang telah disusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dengan menetapkan strategi: kebijakan ekonomi makro, pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar, pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, dan pembangunan sarana prasarana wilayah. Pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar dimaksud meliputi:

1. Penyediaan dan perluasan akses pangan
2. Perluasan akses kesehatan
3. Perluasan akses layanan pendidikan
4. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha
5. Perluasan akses layanan perumahan
6. Penyediaan air bersih dan sanitasi
7. Perluasan akses layanan tanah
8. Perluasan akses layanan SDA dan lingkungan hidup
9. Peningkatan rasa aman
10. Perluasan akses partisipasi.

Dalam perluasan akses berpartisipasi ini terkandung maksud program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa untuk memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat miskin mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program dan kegiatan pembangunan.

2. **Sasaran Strategis II** : Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang berdaya Saing dan Berbasis Pada Potensi Lokal Daerah
Capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis pada potensi lokal daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Kepala Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2019 .

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Capaian 2019			Akhir RPJMD (2019)		
			Target	Kinerja	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
6	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,06	6,4 – 7,1	5,30	82,81	6,4 - 7,1	82,81
7	PDRB per kapita	Juta Rp	25,92	15,06	25,18	167,20	15,06	167,20
8	Laju inflansi	Persen	2,66	4±1	2,12	147	4±1	147
9	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	96,79	97,97	96,88	98,89	97,97	98,89
10	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	Rp.(juta)	44,72	38,38	40,13	104,56	38,38	104,56
11	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen	47,03	37,03	47,11	127,22	37,03	127,22
12	Nilai tukar petani		103,31	106,99	102,83	96,11	106,99	96,11
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						117,68		117,68

Sumber : Bappeda dan Litbangda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang 2020, data diolah.

Rata-rata capaian kinerja sasaran pada sasaran strategis terwujudnya peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berbasis pada potensi lokal daerah terhadap 7 indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan di Tahun 2019 sebesar 117,68% % dengan capaian sangat tinggi, demikian juga terhadap target akhir RPJMD di tahun 2019 sebesar 117,68 % dengan capaian sangat tinggi.

Pada pencapaian target kinerja sasaran terdapat satu indikator yaitu pertumbuhan PDRB masuk katagori tinggi nilai capaian kinerja 82,81% terhadap target kinerja tahun 2019, demikian pula terhadap target kinerja akhir RPJMD pada tahun 2019 masuk katagori tinggi dengan capaian indikator 82,81%.

Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro, yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat kemajuan ekonomi pada suatu wilayah. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi, semakin baik perekonomian.

3. **Sasaran Strategis III** : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 .

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Capaian			Akhir RPJMD (2019)	
			Target	Kinerja	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	029	017	023	135,29	017	135,29
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :					135,29	017	135,29

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2020

Rata-rata capaian kinerja sasaran pada sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana daerah terhadap 1 indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan di Tahun 2019 sebesar 135,29 % dengan capaian sangat tinggi, demikian juga terhadap target akhir RPJMD di tahun 2019 sebesar 135,29% dengan capaian sangat tinggi.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada Tahun 2019 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai 023 (135,29%) dimana target yang ditetapkan adalah 017. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 dengan target rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 017, maka capaian kinerja Tahun 2019 melampaui target yang ditetapkan mencapai 135,29%.

4. **Sasaran Strategis IV** : Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Maksimal dengan Berbasis Kelestarian Lingkungan

Capaian kinerja sasaran strategis terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal dengan berbasis kelestarian lingkungan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Kepala Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2019 .

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Capaian 2019			Akhir RPJMD (2019)		
			Target	Kinerja	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
14	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	persen	84,61	95,66	87,89	91,88	95,66	91,88
15	Luas Wilayah Industri	persen	0,37	0,37	0,37	100	0,37	100
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :						95,94		95,94

Sumber : Bappeda dan Litbangda 2020 data diolah.

Rata-rata capaian kinerja sasaran pada sasaran strategis terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang maksimal dengan berbasis kelestarian lingkungan terhadap 2 indikator kinerja, telah mencapai target yang telah ditetapkan di Tahun 2019 sebesar 95,94 % dengan capaian sangat tinggi, demikian juga terhadap target akhir RPJMD di tahun 2019 sebesar 95,94 % dengan capaian sangat tinggi.

Wilayah Kabupaten Magelang memiliki cukup banyak sumber air dari mata air yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Pemanfaatannya selama ini dilakukan oleh institusi maupun masyarakat sebagai sumber air bersih yang digunakan masyarakat sehari-hari maupun untuk keperluan pertanian dan peternakan.

Peningkatan cakupan air minum di wilayah perkotaan disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang pelayanan air minum/bersih. Kualitas air secara rutin dibawah pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang sehingga aman untuk konsumen karena memenuhi baku mutu standar kualitas air minum dari Kementerian Kesehatan sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 492/Menkes/Per/IV/2010.

Peningkatan cakupan layanan air minum di wilayah perdesaan banyak dikelola oleh masyarakat baik melalui perpipaan maupun bukan perpipaan, pelayanan air minum perpipaan

diwilayah perdesaan dibangun melalui program PAMSIMAS dan SPAM DAK.

Kegiatan industri di Kabupaten Magelang terdiri dari beraneka macam dan tersebar di banyak kecamatan. Industri kecil dan menengah terbanyak adalah jenis industri kimia, agro dan hasil hutan. Sementara itu, untuk industri besar dan sedang yang terbanyak adalah industri makanan, minuman jadi dan tembakau serta industri macam-macam perhiasan, mainan anak-anak, cinderamata.

Secara spasial, potensi industri berbahan baku batu ada di Kecamatan Muntilan. potensi industri berbahan baku bambu ada di Kecamatan Borobudur, potensi industri sapu rayung ada di Kecamatan Mungkid, dan potensi industri kaleng bekas ada di Kecamatan Salaman. Sementara itu industri berbahan baku ketela berpotensi dikembangkan di Kecamatan Grabag, Mungkid dan Candimulyo dan industri gula kelapa potensial dikembangkan di Kecamatan Candimulyo.

Di Kabupaten Magelang juga terdapat beberapa sentra industri. Sentra industri yang menonjol di antaranya sentra industri kecil, kerajinan pahat batu di Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan, sentra industri makanan dari ketela (slondok) di Desa Sumurarum Kecamatan Grabag, sentra industri makanan jenang dodol krasikan di Desa Gulon Kecamatan Salam, sentra industri makanan dari beras ketan (tape ketan dan wajik) di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan dan Desa Salaman Kecamatan Salaman, industri kerajinan tanduk di Desa Pucang Kecamatan Secang, genting Desa Sidomulyo Kecamatan Salaman, kaleng bekas di Desa Tirtosari Kecamatan Sawangan dan Desa Ngadirejo Kecamatan Salaman, industri mainan anak-anak di Desa Kalijoso Kecamatan Secang, industri kerajinan perak di Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik dan industri kerajinan sangkar burung di Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran.

Peningkatan persaingan dunia industri menuntut peningkatan mutu produk serta fasilitasi pengenalan produk-produk Kabupaten Magelang ke pasar nasional maupun internasional. Oleh karena itu pemerintah daerah harus senantiasa memberikan pembinaan kepada para pelaku industri dan memberikan fasilitas

promosi keluar daerah, Selain itu, kendala lainnya adalah masih terbatasnya teknologi, desain, akses permodalan serta pemasaran IKM. Guna meningkatkan pengembangan usaha kecil pemerintah daerah harus meningkatkan komitmen untuk memfasilitasi industri dan IKM secara optimal. Untuk lebih mengembangkan industri perlu strategi pengembangan lokalitas, sektor, sub sektor dan komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif, antara lain melalui percepatan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

5. **Sasaran Strategis V** : Meningkatkan Manajemen Sistem Pemerintahan Daerah yang Baik, Modern dan Demokratis

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatkan manajemen sistem pemerintahan daerah yang baik, modern dan demokratis, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 .

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Capaian 2019			Akhir RPJMD (2019)	
			Target	Kinerja	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Lama Proses Perijinan (Hari)	9	9	9	100	9	100
17	Opini BPK 'WTP'	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
18	Nilai AKIP	CC	B	CC	100	B	100
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :					100		100

Sumber : Pemerintah Kabupaten Magelang 2020, data diolah.

Rata-rata capaian kinerja sasaran pada sasaran strategis meningkatkan manajemen sistem pemerintahan daerah yang baik, modern dan demokratis terhadap 3 indikator kinerja, telah mencapai target yang telah ditetapkan di Tahun 2019 sebesar 100 % dengan capaian sangat tinggi, demikian juga terhadap target akhir RPJMD di tahun 2019 sebesar 100 % dengan capaian sangat tinggi.

Investasi adalah penanaman modal atau penanaman uang dalam proses produksi dengan membeli gedung-gedung, mesin-mesin, bahan-bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi yang relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudahan itu antara

lain prosedur dan persyaratan, lamanya waktu dan biaya. Terkait kepastian biaya adalah tidak adanya pungutan diluar tarif yang resmi atau tidak ada pungli.

Kemudahan perijinan ini diwadahi dengan pembentukan PTSP (pelayanan perijinan satu pintu), yang diampu oleh DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu). DPM-PTSP diberi tugas untuk melakukan pembenahan seperti kemudahan perizinan, administrasi birokrasi pusat dan daerah, serta sinkronisasi kebijakan. Sinkronisasi perlu dilakukan karena saat ini masih terdapat berbagai regulasi daerah yang masih belum sejalan dengan kebijakan atau regulasi pemerintah pusat.

Persentase lama proses perijinan pada Tahun 2019 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai 9 hari (100%) dimana target yang ditetapkan adalah 9 hari. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 dengan target lama proses perijinan sebesar 9 hari, maka capaian kinerja Tahun 2019 telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 100%.

Opini BPK 'WTP' pada Tahun 2019 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu mencapai WTP (100%) dimana target yang ditetapkan adalah Opini BPK 'WTP'. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 dengan target Opini BPK 'WTP', maka capaian kinerja Tahun 2019 telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 100%.

Penghitungan Opini BPK 'WTP' untuk pengukuran indikator kinerja kualitatif dikonversi menjadi kuantitatif dengan pemberian bobot nilai sebagai berikut :

Tabel 3.12
Penghitungan Opini BPK 'WTP' Kabupaten Magelang
Tahun 2019 .

No.	Kategori Opini	Bobot Nilai
1.	<i>Wajar Tanpa Pengecualian</i>	3
2.	<i>Wajar Dengan Pengecualian</i>	2
3.	<i>Tidak Wajar</i>	1
4.	<i>Tidak Menyatakan Pendapat</i>	0

Penghitungan capaian kinerja : Target = WTP; Realisasi = WTP

Capaian kinerja = $\frac{\text{Jumlah bobot nilai Realisasi}}{\text{Jumlah bobot nilai target}} \times 100$

$$\begin{aligned}
&= WTP/WTP \times 100 \\
&= (3+2+1+0) / (3+2+1+0) \times 100 \\
&= 6/6 \times 100 \\
&= 100\%
\end{aligned}$$

Upaya dalam pengelolaan aset daerah dilakukan melalui optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, *up dating* data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Perwujudan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Magelang dengan diundangkannya PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (mencabut PP Nomor 6 Tahun 2006 jo PP Nomor 38 Tahun 2008), maka Perda Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2011), dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 1037) akan disesuaikan dengan PP dimaksud.

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Magelang diarahkan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magelang serta salah satu faktor dalam pendukung pencapaian Opini BPK menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2016 indikator opini BPK “WTP” belum tercapai mulai tahun 2017 opini BPK “WTP” dapat tercapai. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah daerah dalam mencapai indikator ini adalah:

- Melakukan pelatihan secara berkala bagi petugas penyimpan barang di setiap Perangkat Daerah, dan mengupayakan agar petugas yang sudah terlatih tidak terlalu sering di mutasi.
- Menindaklanjuti Rekomendasi BPK RI,

- Melaksanakan *Action Plan* yang telah dibuat oleh masing-masing bidang berdasarkan hasil rekomendasi BPK RI.

Nilai AKIP Kabupaten Magelang pada Tahun 2019 sebesar 60,10 dengan katagori B, dibandingkan dengan tahun 2019 dengan nilai 59,05 dengan katagori CC mengalami peningkatan sebesar 1,05 point.

Pengukuran indikator kinerja kualitatif dikonversi menjadi kuantitatif dengan pemberian bobot nilai sebagai berikut :

Tabel 3.13
Penghitungan Nilai AKIP Kabupaten Magelang Tahun 2019 .

No.	Nilai SAKIP	Bobot Nilai
1	AA	6
2	A	5
3	BB	4
4	B	3
5	CC	2
6	C	1
7	D	0

Penghitungan capaian kinerja : Target B, Realisasi CC

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Jumlah bobot nilai Realisasi} \times 100}{\text{Jumlah bobot nilai target}} \\
 &= \frac{B}{B} \times 100 \\
 &= \frac{(3+2+1+0)}{(3+2+1+0)} \times 100 \\
 &= \frac{6}{6} \times 100 \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

5. **Sasaran Strategis VI** : Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Serta Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran Strategis VI Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 .

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	Capaian 2019			Akhir RPJMD (2019)	
			Target	Kinerja	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
19 Angka kriminalitas *)	Indek	0,26	1,45	2,04	59,31	1,45	59,31
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis :					59,31		59,31

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020, data diolah.

Rata-rata capaian kinerja sasaran pada sasaran strategis meningkatnya kondusifitas dan keamanan terhadap satu indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan di Tahun 2019 sebesar 59,31 % dengan capaian Rendah, demikian juga terhadap

target akhir RPJMD di tahun 2019 sebesar 59,31 % dengan capaian Rendah.

Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan kewaspadaan dini masyarakat. Indikator capaian untuk meningkatkan kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum adalah angka kriminalitas. Angka kriminalitas tercermin dari banyaknya perkara pidana yang masuk di Polres Magelang.

Evaluasi pencapaian kinerja pada indikator mikro per sasaran strategis Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan

Dalam rangka memperbaiki akses, pemerataan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Magelang diukur dalam 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	4	5	6	7	8	9
1 Kasus Kematian Ibu Melahirkan*)	kasus	6	11	8	127,27	11	127,27
2 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran *)	kasus	5,72	6,5	8	71,85	6,50	71,85
3 Persentase Balita Gizi Buruk *)	persen	0,02	0,15	0	186,67	0,15	186,67
4 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup *)	Permil	6,7	8	9	87,75	8	87,75
5 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	persen	100	100	100	100	100	100
6 Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	persen	100	100	100	100	100	100
7 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	persen	100	100	100	100	100	100
8 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	persen	41	90	100	110,56	90	110,56
9 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	persen	88,3	100	95	95,40	100	95,40
10 Cakupan Kunjungan Bayi	persen	98,89	95	97	102,38	95	102,38
Rata-rata Capaian Sasaran :					108,19		108,19

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa Target Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya mutu pelayanan, akses, dan pemerataan layanan kesehatan pada Tahun 2019 telah tercapai dengan capaian 108,19% (Sangat tinggi), demikian juga dibandingkan dengan akhir masa periode RPJMD (2019) Persentase Capaian Kinerja Urusan Kesehatan sudah diatas target yaitu 108,19% (Sangat tinggi).

Pada tahun 2019 hampir seluruh indikator Sasaran Meningkatnya mutu pelayanan, akses, dan pemerataan layanan kesehatan dapat tercapai dengan katagori sangat tinggi kecuali pada indikator Anagka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup masuk dalam katagori sedang dan angka kematian balita (AKB) per 1.000 kelahiran hidup masuk dalam katagori tinggi. Capaian target pada tahun 2019 sama dengan capaian pada akhir periode RPJMD.

Anggaran pada Sasaran Meningkatnya mutu pelayanan, akses, dan pemerataan layanan kesehatan sebesar Rp 400.356.978.352,00 (*empat ratus miliar tiga ratus lima puluh enam sembilan ratus tujuh puluh delapan tiga ratus lima puluh dua rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 316.786.973.329,00 (*tiga ratus enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga tiga ratus dua puluh sembilan rupiah*) atau sebesar 79,13%.

Faktor pendukung tercapainya pencapaian Sasaran Meningkatnya mutu pelayanan, akses, dan pemerataan layanan kesehatan adalah:

- a. Komitmen dari pemerintah kabupaten untuk memajukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Magelang.
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Ketersediaan anggaran yang cukup, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang maupun anggaran DAK.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya mutu pelayanan, akses, dan pemerataan layanan kesehatan antara lain:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, khususnya untuk pelayanan rujukan berjenjang.
- b. Belum optimalnya peningkatan kompetensi SDM kesehatan untuk mendukung pelayanan pada sarana pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan rujukan.
- c. Masih kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat dan masih rendahnya peran dan dukungan masyarakat dalam pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut antara lain:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan melalui penggalian potensi penganggaran dari berbagai sumber anggaran, untuk peningkatan cakupan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar mutu pelayanan kesehatan;
- b. Pengembangan kualitas sumber daya kesehatan melalui peningkatan kompetensi sesuai dengan profesi dan kompetensinya serta peningkatan jumlah sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui perekrutan sebagai pegawai BLUD Puskesmas;
- c. Peningkatan promosi kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat dan revitalisasi fungsi forum kesehatan desa dalam pengembangan Desa Siaga.

Prestasi yang di bidang pelayanan publik pada pelayanan kesehatan RSUD Muntilan mendapatkan nilai "A-" dari Kementerian PAN RB, penghargaan tersebut menunjukkan kualitas pelayanan pada RSUD Muntilan telah Sangat Baik.



Gambar 3.1. Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik mendapat nilai "A-" dengan kategori "Sangat Baik" Tahun 2019.

Program-program yang dilaksanakan untuk mewujudkan Sasaran Meningkatnya mutu pelayanan, akses, dan pemerataan layanan kesehatan adalah:

- a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Program Pengawasan Obat dan Makanan
- d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
- e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- j. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

- prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
- k. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
- l. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- m. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- n. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata
- o. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- p. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.

2. Sasaran Strategis Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol

Sasaran Strategis Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya penambahan penduduk. Sedangkan Keluarga Sejahtera (KS) adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Tolok ukur keberhasilan sasaran strategis terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang Dan Terkontrol Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	4	5	6	7	8	9	
11	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga *)	persen	1,14	1,57	1	126,11	1,57	126,11
12	Rasio Akseptor KB	persen	73,08	81,5	76	92,66	81,5	92,66
13	Cakupan Peserta KB Aktif	persen	73,08	80,89	76	93,36	80,89	93,36
14	Keluarga Pra Sejahtera *)	persen	21,23	20,18	21	97,47	20,18	97,47
15	Keluarga Sejahtera I *)	persen	15,29	14,38	15	97,50	14,38	97,50
Rata-rata Capaian Sasaran :						101,42		101,42

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2020

Target capaian Kinerja Sasaran terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol pada Tahun 2019 telah tercapai yaitu sebesar 101,42% (sangat baik) demikian juga dengan target RPJMD telah mendekati target capaian dengan hasil 101,42% (sangat baik).

Anggaran Sasaran Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp 8.420.495.240,00 (*delapan miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 7.764.207.531,00 (*tujuh miliar tujuh ratus enam puluh empat dua ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah*) atau sebesar 92,21%.

Penunjang keberhasilan dalam menjalankan Sasaran Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol adalah:

- a. Adanya kerjasama lintas program dan lintas sektor, seperti dengan Dinas Kesehatan dan jajarannya, TNI, Polri, Organisasi Muslimat NU dan Aisyiah.
- b. Norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) sudah melembaga di lapisan masyarakat.
- c. Fasilitas dan akses pelayanan KB semakin mudah.
- d. Sarana komunikasi informasi dan edukasi lebih bervariasi dan tersebar baik melalui media luar ruang maupun media dalam ruang.
- e. Semakin efektifnya program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang dan membaiknya kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi Sasaran Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol adalah:

- a. Kenaikan jumlah pasangan usia subur tidak langsung diikuti dengan kenaikan kesertaan ber KB. Penambahan jumlah PUS tersebut berasal dari dari pengantin baru yang tidak langsung ikut KB karena menginginkan untuk segera mempunyai anak.
- b. Adanya PUS yang *drop out* KB karena ingin punya anak lagi. Ada pula yang usianya telah melebihi 45 tahun dan merasa aman tidak ber-KB padahal masih termasuk subur.
- c. Tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan KB, khususnya laki-laki masih belum optimal.

Alternatif Solusi yang dilakukan :

- a. Peningkatan penyuluhan dan pelayanan KB pada pengantin baru.

- b. Meningkatkan mutu pelayanan KB, melaksanakan tertib Recording Reporting (RR), mengoptimalkan kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) program KKBPK, memfasilitasi penyediaan sarana prasarana pelayanan KB.

Penghargaan Satyalancana Pembangunan (SP) merupakan Tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia yang diberikan kepada seseorang yang berkomitmen, berjasa dan berprestasi dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (**KKBPK**) di Kabupaten Magelang sehingga dapat dijadikan panutan dan teladan bagi orang lain, dalam hal ini Kabupaten Magelang diberikan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten.



Gambar 3.2. Penghargaan Satyalancana Pembangunan (SP)
Penghargaan Satyalancana Wira Karya (SWK)

Program-program yang mendukung pelaksanaan Sasaran Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkontrol adalah:

- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;
- Program Keluarga Berencana;
- Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
- Program pelayanan Kontrasepsi.

3. Sasaran Strategis Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkat, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan

Sasaran Strategis kualitas pembangunan manusia yang semakin meningkat, dengan pemerataan pendidikan yang layak, mutu pendidikan, dan akses terhadap pendidikan dalam mencapai keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis terdiri dari 23 (dua puluh tiga) indikator, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Secara keseluruhan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.17

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kualitas Pembangunan Manusia Yang Semakin Meningkat, Dengan Pemerataan Pendidikan Yang Layak, Mutu Pendidikan, Dan Akses Terhadap Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	4	5	6	7	8	9	
16	APK PAUD	persen	62,64	54,54	59,74	109,53	54,54	109,53
17	Angka melek huruf	persen	94,63	93,95	94,63	100,72	93,95	100,72
18	Angka rata-rata lama sekolah	persen	7,4	10	7,40	74	10	74
	Angka Partisipasi Murni :							
19	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	persen	92,66	97,09	91,32	94,06	97,09	94,06
20	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	persen	67,76	82,65	66,32	80,24	82,65	80,24
21	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	persen	NA	66,56	NA	NA	66,56	NA
	Angka partisipasi kasar							
22	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	persen	105,87	101,84	102,65	100,80	101,84	100,80
23	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	persen	88,38	97,56	87,18	89,36	97,56	89,36
24	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	persen	NA	80	NA	NA	80	NA
	Angka Putus Sekolah:							
25	Angka Putus Sekolah SD/MI *)	persen	0,05	0,14	0,05	164,29	0,14	164,29
26	Angka Putus Sekolah SMP/MTs *)	persen	0,24	0,57	0,19	166,67	0,57	166,67
27	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA *)	persen	NA	0,81	NA	NA	0,81	NA
	Angka Kelulusan:							
28	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	persen	100	99,98	100	100,02	99,98	100,02
29	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	persen	99,91	99,99	99,79	99,80	99,99	99,80
30	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	persen	NA	99,98	NA	NA	99,98	NA

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	
<i>Rerata Nilai UN :</i>								
31	Rerata Nilai UN SD/MI	nilai	7,03	7,75	6,64	85,68	7,75	85,68
32	Rerata Nilai UN SMP/MTs	nilai	5,98	6,49	6,11	94,14	6,49	94,14
33	Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK	nilai	NA	7,18	NA	NA	7,18	NA
34	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	87,42	88	93,63	106,40	88	106,40
<i>Angka Melanjutkan :</i>								
35	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	persen	90,72	89,62	97,75	109,07	89,62	109,07
36	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	persen	79,18	71,55	77,53	108,36	71,55	110,66
37	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	persen	73,2	86,74	84,21	97,08	86,74	97,08
38	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	persen	78,28	91,43	84,16	92,05	91,43	92,05
Rata-rata Capaian Sasaran :						104,14		104,14

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa Target Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kualitas Pembangunan Manusia Yang Semakin Meningkatkan, Dengan Pemerataan Pendidikan Yang Layak, Mutu Pendidikan, Dan Akses Terhadap Pendidikan pada Tahun 2019 telah tercapai, dengan capaian sebesar 104,14% (Sangat tinggi) demikian juga pada capaian dibandingkan target akhir RPMD sebesar 104,14% (Sangat tinggi). Dari indikator - indikator tersebut, tercatat 14 (empat belas) indikator yang capaian kinerja tahunannya telah berhasil melampaui target. Pada indikator yang mengukur tingkat keberhasilan pendidikan pada sekolah SMA/SMK/MA tidak dilakukan pengukuran karena berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan SMA/SMK/MA dilimpahkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi.

Anggaran pada Kinerja Sasaran Strategis Kualitas Pembangunan Manusia Yang Semakin Meningkatkan, Dengan Pemerataan Pendidikan Yang Layak, Mutu Pendidikan, Dan Akses Terhadap Pendidikan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp 303.528.788.023,00 (*tiga ratus tiga miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 180.700.364.551,00 (*seratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*) atau sebesar 59,93%.

Faktor pendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis Kualitas Pembangunan Manusia Yang Semakin Meningkat, Dengan Pemerataan Pendidikan Yang Layak, Mutu Pendidikan, Dan Akses Terhadap Pendidikan adalah:

- a. Keseriusan dari Pemerintah Daerah dalam mendukung urusan pendidikan.
- b. Koordinasi serta kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah terkait.
- c. Adanya regulasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga DAK dan Silpa DAK dapat dimanfaatkan dan dialokasikan dengan baik.
- d. Kerjasama dan peran aktif berbagai stakeholder pendidikan dalam menangani pendidikan di Kabupaten Magelang
- e. Semangat dan etos kerja yang tinggi dari jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis Kualitas Pembangunan Manusia Yang Semakin Meningkat, Dengan Pemerataan Pendidikan Yang Layak, Mutu Pendidikan, Dan Akses Terhadap Pendidikan antara lain:

- a. Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan,
- b. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Kurangnya sarana prasarana pendidikan;
- d. Perubahan peraturan dari pusat yang mempengaruhi teknis pelaksanaan pada tingkat Perangkat Daerah.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut antara lain:

- a. Peningkatan kualitas (mutu), relevansi, dan daya saing pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan yang ada di semua komponen (8 standar nasional pendidikan);
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan Peningkatan mutu pendidikan Penyediaan dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan.
- c. Peningkatan perluasan dan akses layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal dan informal;

- d. Penyesuaian dan keselarasan dengan peraturan dari pusat.
- e. Peningkatan partisipasi stakeholders lain dan masyarakat untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Magelang.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada Sasaran Strategis Kualitas Pembangunan Manusia Yang Semakin Meningkat, Dengan Pemerataan Pendidikan Yang Layak, Mutu Pendidikan, Dan Akses Terhadap Pendidikan untuk mencapai target-target indikator kinerja di atas adalah:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- c. Program Pendidikan Non Formal;
- d. Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

4. Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga

Sasaran Strategis terwujudnya pengembangan pemuda yang berkarakter serta berkesempatan berolahraga memiliki tolok ukur capaian keberhasilannya sebanyak 5 (lima) indikator kinerja dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
39	Jumlah Organisasi Pemuda	organisasi	27	27	26	96,30	27	96,30
40	Jumlah Organisasi Olah Raga	organisasi	35	36	35	97,22	36	97,22
41	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	kegiatan	20	19	17	89,47	19	89,47
42	Jumlah Kegiatan Olah Raga	kegiatan	24	24	24	100	24	100
43	Lapangan Olah Raga	permil	1,25	2	1	60	2	60
Rata-rata Capaian Sasaran :						88,60		88,60

Sumber: Dinas Parawisata dan Olah Raga Kabupaten Magelang, 2020

Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga pada Tahun 2019 hampir tercapai dengan capaian sebesar 88,60% (Sangat tinggi), demikian juga untuk target akhir RPJMD hampir tercapai dengan capaian sebesar 88,60% (Tinggi).

Anggaran pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga sebesar Rp 21.473.081.640,00 (*dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 13.938.933.707,00 (*tiga belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah*) atau sebesar 64,91%.

Permasalahan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga Kepemudaan dan Olahraga adalah Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga di wilayah kecamatan. Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga di wilayah kecamatan.

Peningkatan kinerja pada Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga dilaksanakan melalui program-program pendukung sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
 - b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
 - c. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
 - d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
 - e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
5. Sasaran Strategis Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca

Perhatian pemerintah terhadap keberadaan perpustakaan diharapkan akan semakin meningkat. Ke depan, perpustakaan bukan hanya sebagai tempat untuk menyimpan koleksi buku dan majalah, namun perpustakaan lebih sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut atau tidak. Dalam perpustakaan, selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam

perpustakaan digital, dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer. Sasaran strategis Meningkatnya penguasaan Iptek, dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca memiliki tolok ukur capaian keberhasilan terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	
44	Jumlah Perpustakaan	unit	797	815	841	103,19	815	103,19
45	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	orang	76.548	45335	95.965	211,68	45335	211,68
46	Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	persen	2,24	2,24	2	103,13	2,24	103,13
Rata-rata Capaian Sasaran :						139,33		139,33

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang, 2020

Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca pada Tahun 2019 adalah sebesar 139,33% (Sangat tinggi) hal ini telah diatas target, demikian juga capaian terhadap target akhir RPJMD telah diatas target sebesar 139,33% (Sangat tinggi).

Anggaran untuk mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca pada Tahun 2019 sebesar Rp 1.046.042.500,00 (*satu miliar empat puluh enam juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 971.956.625,00 (*sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) atau sebesar 92,92%.

Faktor pendorong tercapainya indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca adalah:

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan.
- b. Meningkatnya mutu dan jenis layanan perpustakaan.
- c. Meningkatnya jam kunjung pemustaka.
- d. Ketersediaan dana.

- e. Dukungan dan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu perpustakaan.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam mendukung capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca adalah:

- a. Masih rendahnya minat baca masyarakat;
- b. Keterbatasan sarana prasarana perpustakaan daerah, khususnya gedung perpustakaan dan unit armada perpusing;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal;
- d. Keterbatasan tenaga *supporting staff*.

Alternatif solusi dari permasalahan di atas adalah:

- a. Peningkatan minat baca masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan perpustakaan sebagai wahana fungsi penelitian, informasi, pelestarian dan rekreasi;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan daerah, khususnya gedung perpustakaan yang lebih representatif;
- c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan;
- d. Penambahan tenaga *supporting staf* di perpustakaan.

Program yang mendukung untuk pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

6. Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan

Sasaran strategis meningkatnya pemberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan memiliki tolok ukur capaian keberhasilan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.20.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan
dan Peran Perempuan dalam Pembangunan
Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	
47	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	persen	1,98	2,56	2	64,45	2,56	64,45
48	Rasio KDRT *)	persen	0,023	0,02	0	115	0,02	129,17
49	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	persen	75,51	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran :						93,15		97,87

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2020

Target capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan pada Tahun 2019 belum tercapai dengan capaian 97,87% (Sangat Tinggi) demikian juga terhadap target capaian terhadap akhir RPJMD adalah 97,87% (Sangat Tinggi).

Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp 2.072.320.715,00 (*dua miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 2.048.315.674,00 (*dua miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah*) atau sebesar 98,84%.

Penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan selama ini adalah: Keberhasilan penanganan kasus KDRT di Kabupaten karena sudah ada kerjasama dengan lintas sektor, khususnya lembaga hukum yaitu Kepolisian yang menangani P2TP2A dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang permasalahan KDRT.

Penghargaan Kabupaten Layah Anak (KLA) merupakan penghargaan dari Kementerian PPPA kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) se Indonesia atas komitmennya bersama masyarakat dan dunia usaha dalam rangka Pemenuhan Hak-hak Anak (PHA).



Gambar 3.3. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan selama ini adalah: Belum adanya UPT P2TP2A di setiap Kecamatan sehingga kasus yang bisa ditangani adalah yang sudah dilaporkan langsung ke Kantor Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, sedangkan penemuan kasus secara aktif belum dapat dilaksanakan.

Alternatif solusi untuk permasalahan di atas adalah: Pengusulan UPT P2TP2A untuk setiap Kecamatan, sehingga penjangkauan dan penemuan kasus dapat lebih mudah dalam penjangkauan sosialisasi sampai ke tingkat desa.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan adalah :

- a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

7. Sasaran Strategis Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti pembangunan kehidupan beragama. Target pembangunan sosial diarahkan pada pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Berkurangnya kualitas dan kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Tolak ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
50	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	unit	39	34	39	114,71	34	114,71
51	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	persen	46,32	20	46	231,60	20	231,60
Rata-rata Capaian Sasaran :						173,15		173,15

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa Target capaian Kinerja Sasaran Strategis Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin pada Tahun 2019 adalah telah melebihi dari target yang ditetapkan dengan capaian 173,15% (Sangat tinggi) demikian juga dengan terhadap target akhir RPJMD telah mencapai 173,15% (Sangat tinggi).

Anggaran Sasaran Strategis Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp 6.587.539.305,00 (*enam miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 6.380.304.489,00 (*enam miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah*) atau sebesar 96,85%.

Penunjang keberhasilan dalam menjalankan Sasaran Strategis Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin adalah Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan.

Permasalahan yang dihadapi berupa validasi data dilakukan setelah tahun berjalan.

Solusi yang dilakukan pentertiban Pencatatan, pendataan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada Sasaran Strategis Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin adalah:

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- c. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya);
- d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
- e. Program Peningkatan Kehidupan Sosial/ Keagamaan.

8. Sasaran Strategis Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Terwujudnya karakter masyarakat yang berbudaya, beragama serta bermoral berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	4	5	6	7	8	9	
52	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	kali	38	38	38	100	38	100
53	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	unit	18	18	18	100	18	100
54	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	persen	100	70	100	142,86	70	142,86
Rata-rata Capaian Sasaran :						114,29		114,29

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa target capaian kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila pada Tahun 2019 telah tercapai yaitu sebesar 114,29% (Sangat tinggi) demikian juga terhadap capaian akhir RPJMD sebesar 114,29% (Sangat tinggi).

Anggaran kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila pada Tahun 2019 sebesar Rp4.493.355.000,00 (*empat miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp4.344.175.502,00 (*empat miliar tiga ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua rupiah*) atau sebesar 96,7%.

Permasalahan dan kendala dalam melaksanakan Sasaran Strategis Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila adalah Kesadaran masyarakat di dalam ikut memelihara dan mempertahankan benda, situs, dan kawasan cagar budaya masih rendah.

Alternatif solusinya adalah pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya memelihara dan mempertahankan benda, situs, dan kawasan cagar budaya.

Program-program yang mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila adalah:

1. Program Pengembangan Nilai Budaya;
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Sasaran Strategis Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan

Sasaran strategis terwujudnya masyarakat yang sejahtera mandiri dan berperan serta dalam pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk memberi peluang kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan secara partisipatif dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten. Selain itu pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya peningkatan kemampuan untuk membangun diri dan lingkungannya, serta meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan program pembangunan, agar kondisi kehidupannya mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.

Tabel 3.23.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	
55	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	persen	20	19	8	39,63	19	39,63
56	Cakupan Kelompok Binaan PKK	persen	24,82	39,52	27	69,31	39,52	69,31
57	Jumlah LSM (Bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat)	LSM	4	6	4	66,67	6	66,67
Rata-rata Capaian Sasaran :						58,53		58,53

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan pada Tahun 2019 hampir tercapai sebesar 58,53 % (Rendah), sedangkan terhadap capaian akhir RPJMD masih jauh tingkat capaiannya yaitu sebesar 58,53 % (Rendah).

Anggaran untuk mendukung sasaran strategis terwujudnya masyarakat yang sejahtera mandiri dan berperan serta dalam pembangunan pada Tahun 2019 mencapai Rp 17.102.022.765,00 (*tujuh belas miliar seratus dua juta dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 16.063.406.603,00 (*enam belas miliar enam puluh tiga juta empat ratus enam ribu enam ratus tiga rupiah*) atau sebesar 93,93%.

Permasalahan dan kendala pencapaian sasaran strategis terwujudnya masyarakat yang sejahtera mandiri dan berperan serta dalam pembangunan antara lain:

- a. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pedesaan;
- b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program dan kegiatan pembangunan terkait dengan pengentasan kemiskinan;
- c. Belum optimalnya pembinaan PKK

Alternatif solusi terhadap permasalahan - permasalahan di atas antara lain:

- a. Peningkatan peran masyarakat dan pemberdayaan dalam pembangunan;
- b. Peningkatan lembaga perekonomian masyarakat desa melalui pembentukan BUMDesa, mengadvokasi seluruh Kepala desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- c. Peningkatan keterlibatan sektor terkait dalam pembinaan PKK, untuk meningkatkan cakupan pembinaan.

Program-program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- b. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
- d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

9. Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja

Sasaran strategis meningkatnya tingkat kesejahteraan dan partisipasi angkatan kerja dilaksanakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan partisipasi angkatan kerja. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.24.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	4	5	6	7	8	9	
58	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	persen	71,28	76,65	75	97,26	76,65	97,26
59	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun*)	persen	2,7	1,28	1	114,84	1,28	114,84
60	Pencari Kerja yang Ditempatkan	persen	42,86	54,27	52	95,60	54,27	95,60
61	Tingkat Pengangguran Terbuka*)	persen	2,91	3,02	3	96,69	3,02	96,69
62	Keselamatan dan Perlindungan	persen	NA	79	NA	NA	79	NA
63	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	persen	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran :						100,88		100,88

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa target capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja pada Tahun 2019 belum tercapai dengan capaian sebesar 100,88% (Sangat tinggi) demikian juga dengan capaian terhadap target akhir RPJMD mencapai 100,88% (Sangat tinggi Indikator Kinerja “Keselamatan dan Perlindungan” bernilai 0 (nol), hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja yang menjadi Tupoksi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan beralih dari Pemda Kabupaten/Kota ke Provinsi Jateng efektif sejak tahun Januari 2017.

Indikator Kinerja "Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun" sebagai indikator negatif jauh dibawah dari target. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2019 terdapat banyak permasalahan hubungan industrial di perusahaan yang memicu sengketa antara pengusaha dengan pekerja. Namun tetap bisa diselesaikan tingginya angka sengketa itu dengan melakukan penyelesaian baik dengan bipartit (penyelesaian di level perusahaan) maupun tripartit (penyelesaian melalui mediasi dinas).

Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp 2.527.159.000,00 (*dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 2.440.968.970,00 (*dua miliar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*) atau sebesar 96,59%.

Hambatan dan kendala pada Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja antara lain:

- a. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- b. Keterbatasan anggaran untuk pelatihan kerja calon tenaga kerja;
- c. Belum optimalnya usaha kerja sama penempatan dan kesempatan kerja.

Alternatif solusi dari permasalahan di atas adalah:

- a. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja;
- b. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;
- c. Penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

Program-program pembangunan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja yang dilaksanakan adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
- c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

10. Sasaran Strategis Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal

Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Sedangkan Usaha Kecil Menengah adalah istilah yang mengacu pada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus ribu rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Sasaran Strategis Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi lokal. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.25.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	
64	Persentase Koperasi Aktif	persen	94	78,18	94	120,24	78,18	120,24
65	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	UKM non BPR/LKM UKM	106.600	106.384	106.600	100,20	106384	100,20
66	Jumlah BPR/LKM	BPR/LKM	297	382	297	77,75	382	77,75
67	Usaha Mikro dan Kecil	persen	1,15	98	1	1,17	98	1,17
Rata-rata Capaian Sasaran :						74,84		74,84

Sumber: Disdagkop UKM Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan target capaian kinerja Sasaran Strategis Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal pada Tahun 2019 telah diatas target yang ditetapkan sebesar 74,84% (Sedang) demikian juga dengan capaian terhadap target RPJMD 74,84% (Sedang), pada indikator Jumlah Usaha Mikro dan Kecil capaian masih sangat rendah.

Anggaran Sasaran Strategis Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi

Lokal pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp 3.086.766.549,00 (*tiga miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 2.886.445.445,00 (*dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah*) atau sebesar 93.51%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Masih rendahnya pengelolaan manajemen koperasi;
- b. Kurangnya akses permodalan;
- c. Terbatasnya akses dan informasi pasar;
- d. Belum adanya pusat perdagangan bersama/ UMKM Center.

Alternatif solusi dari permasalahan - permasalahan di atas, antara lain:

- a. Pemberian pelatihan administrasi dan manajemen koperasi;
- b. Kemudahan akses ke perbankan;
- c. Bantuan pemerintah untuk mendapatkan akses dan informasi pasar secara lebih luas;
- d. Dibangunnya pusat perdagangan bersama/ UMKM Center.

Program-program yang dilaksanakan Sasaran Strategis Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal adalah:

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
- d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

11. Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah

Sasaran strategis meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi di daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya perekonomian daerah melalui tingkat investasi di daerah. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.26.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	
68	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	investor	1.194	1.164	2.384	204,81	1.164	204,81
69	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Juta rupiah	1.976.374	724.647	1.976.374	272,74	724.647	272,74
70	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	persen	31,43	31,19	31	100,77	31,19	100,77
71	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	milyar rupiah	945,69	359	946	263,42	359	263,42
Rata-rata Capaian Sasaran :						210,43		210,43

Sumber: BPMPSTP Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa target capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi pada Tahun 2019 telah melampaui target yang ditetapkan adalah sebesar 210,43% (Sangat tinggi) demikian pula pada target akhir RPJMD telah dilampaui sebesar 210,43% (Sangat tinggi).

Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.001.346.170,00 (*satu miliar satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 968.166.355,00 (*sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*) atau sebesar 96,69%.

Permasalahan dan kendala pada pelaksanaan Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi antara lain:

- Belum optimalnya kewenangan pelayanan perijinan penanaman modal;
- Belum optimalnya jumlah dan nilai investasi berskala nasional/PMDN;
- Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Alternatif solusi terhadap permasalahan - permasalahan di atas antara lain:

- a. Penyusunan regulasi di bidang pelayanan perijinan penanaman modal yang ramah investor;
- b. Peningkatan iklim investasi di daerah;
- c. Peningkatan pelayanan administrasi investasi.

Program-program pembangunan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
- c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah.

12. Sasaran Strategis Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat

Sasaran strategis Makin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.27.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	4	5	6	7	8	9	
72	Ketersediaan Pangan Utama Beras	persen	220,23	188,1	200	106,06	188,10	106,06
73	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah		87,9	87,5	88	100,57	87,50	100,57
Rata-rata Capaian Sasaran :						103,32		103,32

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat pada Tahun 2019

telah terlampaui yaitu sebesar 103,32% (Sangat baik) demikian juga terhadap target capaian RPJMD sebesar 103,32% (Sangat tinggi).

Anggaran untuk mendukung ketercapaian Sasaran Strategis Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.226.972.275,00 (*satu miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 1.175.168.793,00 (*satu miliar seratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*) atau sebesar 95,78%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Kesulitan dalam mengubah pola konsumsi masyarakat, dari beras ke non beras;
- b. Belum optimalnya upaya - upaya pengamanan pangan.

Alternatif solusinya adalah:

- a. Kampanye dan sosialisasi tentang diversifikasi pangan secara lebih intensif;
- b. Mengoptimalkan upaya-upaya pengamanan pangan, seperti uji kandungan gizi pangan.

Program yang mendukung ketercapaian Sasaran Strategis Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

13. Sasaran Strategis Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan budidaya hayati termasuk bercocok tanam dan pembesaran hewan ternak. Kabupaten Magelang ditinjau dari keadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sangat potensial dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di bidang pertanian. Dengan kondisi topografi dan jenis tanah yang beragam memberikan beragam pula pilihan jenis komoditas pertanian yang dapat dikembangkan.

Sasaran strategis menguatnya kontribusi pertanian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja, dengan pengukuran - pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar								
74	Produktivitas Padi	Kw/ha	63,7	60,1	62,79	104,48	62,79	104,48
75	Produksi Padi	Ton/th	478.266	355.676	436.593	122,75	436.593	122,75
76	Produktivitas Jagung	Kw/ha	63,53	59,3	68,92	116,22	68,92	116,22
77	Produksi Jagung	Ton/th	51.446	74.337	41.776	56,20	41.776	56,20
78	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	persen	21,78	20,03	21,78	108,74	21,78	108,74
79	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	persen	72,11	71,84	72,11	100,38	72,11	100,38
80	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB	persen	5,68	7,73	5,68	73,48	5,68	73,48
81	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	persen	17,65	11,97	17,65	147,45	17,65	147,45
82	Cakupan Bina Kelompok Petani	persen	12,42	14,9	12,42	83,36	12,42	83,36
Produksi Hewan ternak								
83	Sapi potong	kg	1.826.011	1.862.169	1.862.342	100,01	1.862.342	100,01
84	Kerbau	kg	693,2	541	693	128,10	693	128,10
85	Kambing	kg	737.749	793.265	793.276	100	793.276	100
86	Domba	kg	1.043.219	1.115.626	1.115.659	100	1.115.659	100
Produksi Hewan Unggas								
87	Ayam Pedaging	ton	9.762,02	9.957.100	9.958.094	100,01	9.958.094	100,01
88	Ayam Ras Petelur	ton	991,59	1.019.500	1.064.208	104,39	1.064.208	104,39
89	Ayam Buras	ton	1.168,78	1.239.980	1.240.374	100,03	1.240.374	100,03
90	Itik	ton	92,3	94.106	95.455	101,43	95.455	101,43
91	Sapi Perah	liter	731.634	746.158	746.220	100,01	746.220	100,01
Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)								

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	
92	Daging	gr/kap /hr	5,96	6,2	6,03	97,31	6,03	97,31
93	Telur	gr/kap /hr	4	4,65	4,06	87,33	4,06	87,33
94	Susu	gr/kap /hr	0,04	0,11	0,04	39,09	0,04	39,09
Rata-rata Capaian Sasaran :						98,61		98,61

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun 2019 telah melampaui target yaitu sebesar 98,61% (Sangat tinggi) sedangkan capaian terhadap akhir masa RPJMD sebesar 98,61% (Sangat tinggi).

Anggaran pada Sasaran Strategis Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Tahun 2019 adalah sebesar Rp 17.988.779.410,00 (*tujuh belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 13.750.988.625,00 (*tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) atau sebesar 76,44%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada Sasaran Strategis Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat adalah:

- a. Semakin meningkatnya kebutuhan pemenuhan pangan masyarakat;
- b. Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan ke non pertanian;
- c. Rendahnya daya saing produk-produk pertanian;
- d. Rendahnya akses pasar komoditas pertanian bagi petani dan kelompok tani;
- e. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani;
- f. Belum optimalnya pengembangan potensi peternakan.

Alternatif solusi untuk permasalahan-permasalahan di atas antara lain:

- a. Diversifikasi pangan;
- b. Pengetatan aturan/ kebijakan yang terkait dengan izin pengeringan lahan;
- c. Peningkatan kualitas produk-produk pertanian;

- d. Fasilitasi akses pasar untuk komoditas pertanian bagi petani dan kelompok petani;
- e. Penguatan kelembagaan petani;
- f. Mengoptimalkan pengembangan potensi peternakan.

Program - program yang mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan;
- e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
- f. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- g. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
- h. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.

14. Sasaran Strategis Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan

Sumber daya alam berupa air cukup melimpah di wilayah Kabupaten Magelang sehingga sangat berpotensi untuk pengembangan perikanan darat. Kabupaten Magelang mempunyai potensi besar sebagai sentra benih ikan. Jumlah rumah pembenihan ada 5 (lima) Balai Benih Ikan (BBI), yang terdiri dari 3 (tiga) BBI Lokal dan 2 (dua) BBI milik Pemerintah Provinsi dengan didukung 2 (dua) Pasar Ikan Pemerintah Kabupaten dan 10 (sepuluh) pasar desa/ kelompok.

Sasaran strategis Menguatnya struktur ekonomi masyarakat melalui tingkat produksi perikanan memiliki tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.29.
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	
95	Produksi Perikanan (Benih)	juta ekor	2,01	2	2	100	2	100
96	Produksi Perikanan Budidaya	ton	23.097,01	18.000	25.123	139,57	18.000	139,57
97	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	ton	278,14	263,57	301	114,20	263,57	114,20
98	Konsumsi Ikan	Kg/kap/tahun	19,6	15,75	21	135,05	15,75	135,05
99	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)	persen	2,29	2,68	2	85,45	2,68	85,45
Rata-rata Capaian Sasaran :						114,85		114,85

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan pada Tahun 2019 telah tercapai dengan capaian sebesar 114,85% (Sangat tinggi) dan untuk capaian terhadap akhir masa RPJMD telah melalui target sebesar 114,85% (Sangat tinggi).

Anggaran untuk mendukung Sasaran Strategis Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan pada Tahun 2019 sebesar Rp 2.576.884.150,00 (*dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp 2.323.837.020,00 (*dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh rupiah*) atau sebesar 90,18%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah:

- a. Kurang optimalnya usaha pembenihan ikan yang menyediakan benih ikan berkualitas dengan prinsip *Good Breeding Practice*;
- b. Kurangnya akses informasi, teknologi, modal dan pasar serta jaminan kelangsungan usaha perikanan;
- c. Belum dimanfaatkannya sumber daya perikanan secara optimal;
- d. Kurang berkualitasnya produk hasil perikanan karena lemahnya penerapan *Good Handling Practice* dan *Good Manufacturing Practice*.

Alternatif solusinya adalah :

- a. Penyediaan induk ikan berkualitas;
- b. Meningkatkan akses informasi, teknologi, modal dan pasar serta jaminan kelangsungan usaha perikanan;
- c. Mengoptimalkan sumber daya perikanan;
- d. Mengoptimalkan penerapan *Good Handling Practice* dan *Good Manufacturing Practice* untuk meningkatkan kualitas mutu produk hasil perikanan.

Program-program yang mendukung Sasaran Strategis Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan adalah:

- a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- b. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
- c. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar.

15. Sasaran Strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan
Sasaran strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan memiliki tolok ukur capaian keberhasilan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	
100	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	persen	10,85	9,98	11	108,72	9,98	108,72
101	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	Juta US\$	50,87	89	51	57,16	89	57,16
102	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	persen	3,9	13,55	4	28,78	13,55	28,78
Rata-rata Capaian Sasaran :						64,89		64,89

Sumber: Dinas Pedagangan Kabupaten dan Koperasi dan UKM Magelang, 2020

Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan pada Tahun 2019 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 64,89% (Rendah), demikian juga pada pada target akhir tahun RPJMD sebesar 64,89% (Rendah)

Anggaran untuk mendukung Strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp 49.458.951.075,00 (*empat puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp 45.426.097.974,00 (*empat puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah*) atau sebesar 92,52%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai;
- b. Keterbatasan anggaran untuk mengikuti pameran perdagangan internasional;
- c. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan penataan dan pembinaan kepada kelompok pedagang/ usaha informal.

Solusi alternatifnya adalah:

- a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kegiatan ekonomi dan pengembangan perdagangan, terutama revitalisasi pasar tradisional, sehingga mendorong pertumbuhan produk unggulan lokal;
- b. Meningkatkan anggaran untuk mengikuti pameran perdagangan internasional di Jakarta sehingga produk-produk unggulan dari Kabupaten Magelang bisa dikenal;
- c. Meningkatkan anggaran untuk melaksanakan penataan dan pembinaan kepada kelompok pedagang/usaha informal sehingga cakupan pembinaan kelompok pedagang/ usaha informal bisa senantiasa meningkat.

Program-program untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
- c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan;
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan.

16. Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah

Industri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Sektor industri memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Magelang. Sasaran strategis Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber - sumber kekayaan daerah. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	
103	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	persen	2,95	16,83	2,82	16,76	16,83	16,76
104	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	persen	19,55	17,95	18,82	104,85	17,95	104,85
105	Pertumbuhan Industri.	persen	3,7	3,76	3,21	85,37	3,76	85,37
Rata-rata Capaian Sasaran :						68,99		68,99

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, 2020

Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah pada Tahun 2019 telah tercapai yaitu sebesar 68,99% (sedang), sedangkan pada target akhir tahun belum tercapai yaitu sebesar 68,99% (sedang).

Anggaran untuk mendukung Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp 982.230.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp 957.445.245,00 (*sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*) atau sebesar 97,48%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya kapasitas SDM di level manajerial dan menurunnya kualitas SDM terampil di level proses produksi;
- b. Kurangnya daya saing produk industri kecil;
- c. Kurang adanya keterkaitan antar rantai nilai (bahan baku, proses produksi, dan promosi/ pemasaran).

Alternatif solusi pada permasalahan di atas adalah dengan mengembangkan industri kecil berbasis potensi lokal (SDM, bahan baku, dan budaya) dengan pendekatan kearifan lokal.

Program-program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah antara lain adalah:

- a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
- d. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

17. Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah

Pariwisata menjadi salah satu penopang kegiatan ekonomi di Kabupaten Magelang. Sasaran strategis Makin optimalnya pemanfaatan dan pengembangan potensi pariwisata daerah memiliki tolok ukur capaian keberhasilannya sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.32

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	
106	Kunjungan Wisata Manca Negara	orang	358.673	860.549	361.050	41,96	860.549	41,96
107	Kunjungan Wisata Nusantara	orang	5.977.422	6.594.051	6.150.331	93,27	6.594.051	93,27
108	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	persen	5,1	6,89	5	74,75	6,89	74,75
Rata-rata Capaian Sasaran :						69,99		69,99

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah pada Tahun 2019 belum tercapai yaitu sebesar 69,99% (Sedang) demikian juga terhadap capaian RPJMD sebesar 69,99% (Sedang).

Anggaran untuk mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp 10.799.174.445,00 (*sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah*) dengan realisasi Rp 9.034.300.094,00 (*sembilan miliar tiga puluh empat juta tiga ratus ribu sembilan puluh empat rupiah*) atau sebesar 83,66%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah:

- a. Fasilitas yang masih terbatas di obyek wisata berupa sarana transportasi umum menuju obyek wisata;
- b. Minimnya atraksi wisata di obyek wisata.

Alternatif solusi untuk permasalahan di atas antara lain:

- a. Penambahan fasilitas di obyek wisata;
- b. Meningkatkan upaya promosi melalui website, media sosial, dan sejenisnya serta meningkatkan jumlah atraksi wisata

Program - program yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah adalah:

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- c. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

18. Sasaran Strategis Aksesibilitas Antar Daerah Meningkat dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru

Sasaran strategis aksesibilitas antar daerah meningkat dengan dukungan infrastruktur wilayah yang baik serta berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan - kawasan pertumbuhan baru memiliki tolok ukur capaian keberhasilan sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja, dengan capaian sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.33
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1		2	4	5	6	7	8	9
109	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	persen	74,17	69,73	75	107,26	69,73	107,26
110	Rasio Jaringan Irigasi	persen	43,68	30,57	65	214,03	30,57	214,03
111	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	persen	65,93	67,4	68	100,59	67,40	100,59
Rata-rata Capaian Sasaran :						140,63		140,63

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa Target Capaian Sasaran Strategis Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru pada Tahun 2019 telah tercapai dengan capaian 140,63% (Sangat tinggi) demikian juga capaian pada akhir RPJMD juga telah tercapai dengan hasil 140,63% (Sangat tinggi).

Anggaran pada Sasaran Strategis Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru pada Tahun 2019 sebesar Rp 129.656.103.400,00 (*seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh enam juta seratus tiga ribu empat ratus rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 110.604.313.231,00 (*seratus sepuluh miliar enam ratus empat juta tigas ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah*) atau sebesar 85,31%.

Anggaran urusan pekerjaan umum berdasarkan 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi satu dengan urusan penataan ruang, sehingga pada penganggaran Tahun 2019 menjadi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian urusan pekerjaan umum antara lain:

- a. Masih terdapat sarana prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar akses perekonomian di perkotaan dan pedesaan baik secara kualitas dan kuantitas belum memenuhi syarat;
- b. Rawannya kerusakan jalan jalan dan jaringan irigasi akibat bencana alam, khususnya pada musim penghujan;
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan jalan serta irigasi.

Alternatif solusi pada Sasaran Strategis Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru, hendaknya diarahkan pada:

- a. Pembangunan, pemberdayaan, pemerataan, dan aksesibilitas pada infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi;
- b. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan akibat bencana alam;
- c. Peningkatan sosialisasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan jalan serta irigasi.

Program-program pembangunan dalam Sasaran Strategis Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru adalah:

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong
- c. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan
- d. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- f. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- g. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya
- h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- i. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

- j. Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi
- k. Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air
- l. Program Perencanaan Tata Ruang
- m. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- n. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

19. Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat

Penyelenggaraan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan merupakan tanggung jawab pemerintah berdasarkan penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh perkotaan yang didahului proses pendataan dengan melibatkan peran masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengeluarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/498/KEP/25/2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Magelang. Sasaran strategis Terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni memiliki tolok ukur capaian kinerja terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.34.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	persen	82,8	84,2	95	113,08	84,20	113,08
113	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	persen	2	2,45	2	88,16	2,45	88,16
114	Rumah Layak Huni (%)	persen	80	62	80	129,03	62	129,03
Rata-rata Capaian Sasaran :						110,09		110,09

Sumber: Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa Target Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat pada Tahun 2019 telah tercapai dengan capaian sebesar 110,09% (Sangat tinggi), demikian juga capaian akhir RPJMD telah mendekati target yang ditentukan yaitu mencapai 110,09% (Sangat tinggi).

Anggaran pada Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat pada Tahun 2019 sebesar Rp 52.621.849.700,00 (*lima puluh dua miliar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 35.940.900.662,00 (*tiga puluh lima miliar Sembilan ratus empat puluh juta Sembilan ratus ribu enam ratus enam puluh dua rupiah*) atau sebesar 68,30%.

Hambatan dan kendala pada Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat antara lain:

- a. Masih terdapat rumah tangga yang belum bisa mengakses air bersih yang layak dan berkelanjutan;
- b. Masih terdapat rumah tangga belum bisa mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
- c. Masih cukup tinggi angka rumah tidak layak huni.

Alternatif solusi kebijakan pada Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat hendaknya diarahkan pada pemenuhan sarana dan prasarana pemukiman di masyarakat khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, sarana sanitasi dan kebutuhan rumah layak huni dengan prioritas masyarakat miskin, perkotaan dengan padat penduduk dan di pedesaan.

Program-program pendukung yang dilaksanakan pada Sasaran Strategis Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat meliputi:

- a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan;
- b. Program Pengembangan Perumahan;
- c. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- d. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran.

20. Sasaran Strategis Terpenuhiya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan

Sumber daya mineral adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya mineral di Kabupaten Magelang didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian (bahan galian golongan C). Sasaran strategis Terpenuhiya kebutuhan energi masyarakat dan terkelolanya Sumber Daya Alam yang berbasis lingkungan memiliki tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 2 (dua) indikator, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.35.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhiya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	
115	Persentase Pertambangan Berijin	persen	NA	50	NA	NA	50	NA
116	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	persen	NA	2,64	NA	NA	2,64	NA
Rata-rata Capaian Sasaran :						0		0

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2020

Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhiya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan pada Tahun 2019 tidak dilakukan analisa, karena sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

21. Sasaran Strategis Terpenuhiya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan

Transportasi memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas penduduk maupun barang. Sarana transportasi berupa modal angkutan umum maupun kendaraan pribadi dapat menjangkau ke seluruh wilayah kabupaten. Sasaran strategis Terpenuhiya sarana

dan prasarana penunjang perhubungan memiliki tolok ukur keberhasilan sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.36
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	orang	3.121.745	3.705.271	2.373.220	64,05	3.705.271	64,05
118	Jumlah Ijin Trayek	ijin	976	1069	803	75,12	1069	75,12
119	Rasio Uji Kir Kendaraan	persen	88,1	96,7	90	92,94	96,7	92,94
120	Jumlah Terminal Bis	terminal	6	8	6	75	8	75
121	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	menit	32	32	32	100	32	100
122	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji		ada	ada	ada	100	ada	100
123	Pemasangan Rambu-Rambu	persen	111,72	94	112	118,85	94	118,85
Rata-rata Capaian Sasaran :						89,42		89,42

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa target Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan pada Tahun 2019 hampir tercapai dengan capaian sebesar 89,42% (Tinggi), demikian juga dengan capaian akhir RPJMD telah mencapai 89,42% (Tinggi).

Anggaran pada Sasaran Strategis Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp 5.781.405.925,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dengan realisasi anggaran sejumlah Rp 3.447.712.597,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 59,63%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang perhubungan, yang disebabkan karena keterbatasan anggaran.
- b. Terjadinya fenomena penurunan *loadfactor* penumpang pada penggunaan angkutan umum dan terjadi kecenderungan peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, serta banyaknya kendaraan angkutan umum yang tidak masuk terminal.
- c. Tidak tersedianya lahan untuk lokasi terminal di Kecamatan Kaliangkrik dan Kecamatan Sawangan.

Alternatif solusi dari permasalahan di atas adalah:

- a. Penambahan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dengan menggali sumber anggaran diluar ABD Kabupaten;
- b. Perbaikan kualitas pelayanan angkutan umum dan Peningkatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada Sasaran Strategis Terpenuhi Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan adalah :

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;

22. Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam

Sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam memiliki tolok ukur capaian sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja, dengan hasil - hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.37
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Dan
 Kuantitas Pembangunan Yang Berorientasi Tata Ruang, Serta
 Mengurangi Resiko Bencana Alam Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	
124	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	persen	31	>30	40	133,33	>30	133,33
125	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	persen	3,6	4	4	90	4	90
126	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	persen	0	0	0	100	0	100
127	Luas Kawasan Lindung (ha)	ha	25.886	25.886	25.886	100	25.886	100
128	Luas Kawasan Budidaya (ha)	Ha	82,69	82,687	83	100	82,687	100
129	Jumlah IMB yang Dikeluarkan	IMB	346	676	432	63,91	676	63,91
130	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	persen	32	38	32	84,21	38	84,21
Rata-rata Capaian Sasaran :						95,92		95,92

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Yang Berorientasi Tata Ruang, Serta Mengurangi Resiko Bencana Alam pada Tahun 2019 belum tercapai dengan capaian sebesar 86,80% (tinggi) demikian juga dengan target capaian akhir RPJMD 89,82% (tinggi).

Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Yang Berorientasi Tata Ruang, Serta Mengurangi Resiko Bencana Alam pada Tahun 2019 sebesar Rp 129.656.103.400,00 (*seratus dua puluh Sembilan miliar enam ratus lima puluh enam juta seratus tiga ribu empat ratus rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 110.604.313.231,00 (*seratus sepuluh miliar enam ratus empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah*) atau sebesar 85,31%.

Anggaran urusan penataan ruang berdasarkan 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi satu dengan urusan pekerjaan umum, sehingga pada penganggaran Tahun 2019 menjadi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pendorong keberhasilan: saat ini perhitungan luas Ruang Terbuka Hijau adalah berdasarkan luas administratif Desa dan Kelurahan perkotaan. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Magelang didominasi oleh Ruang Terbuka Hijau privat, untuk itu perlu mendorong meningkatnya ruang terbuka hijau yang bisa diakses publik.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Yang Berorientasi Tata Ruang, Serta Mengurangi Resiko Bencana Alam antara lain:

- a. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kepemilikan IMB;
- b. Banyaknya alih fungsi lahan pertanian teknis ke non pertanian tidak berizin.

Solusi alternatif untuk permasalahan di atas, adalah:

- a. Pemberian sosialisasi dan informasi yang lebih intensif kepada masyarakat;
- b. Pentaatan terhadap pelaksanaan peraturan terkait alih fungsi lahan, yang melibatkan lintas Perangkat Daerah terkait.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Yang Berorientasi Tata Ruang, Serta Mengurangi Resiko Bencana Alam adalah:

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong
- c. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan
- d. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- f. Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- g. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya
- h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

- i. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
- j. Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi
- k. Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air
- l. Program Perencanaan Tata Ruang
- m. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- n. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

23. Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya

Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi semua perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya Hidup dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Terciptanya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari serta meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam yang berorientasi pada kesinambungan sumber daya.

Tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja dengan pengukuran sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.38
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	
131	Persentase Penanganan Sampah	persen	33,6	31	38,07	122,81	31	122,81
132	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	persen	4,1	2,1	6,30	300	2,10	300

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	
133	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	persen	38,84	30	43,80	146	30	146
134	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	persen	2,32	1,08	2,32	214,81	1,08	214,81
135	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	m ³	297.475	2.300.000	297.475	12,93	2.300.000	12,93
Rata-rata Capaian Sasaran :						159,31		159,31

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa target Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya Hidup pada Tahun 2019 telah tercapai yaitu sebesar 159,31% (Sangat tinggi), semua indikator kinerja capaiannya sesuai/ melebihi target demikian juga target capaian akhir RPJMD mencapai 159,31% (Sangat tinggi), tetapi masih terdapat 1 indikator yaitu Jumlah daya tampung TPS yang masih sangat rendah dengan capaian 12,93%. Hal tersebut karena pertimbangan tidak jadinya pembangunan TPA regional sebagai penampung akhir sampah. Selain hal tersebut, paradigma pengelolaan sampah juga mulai diarahkan dengan pengurangan dari sumbernya. Desa-desa diharapkan membuat TPS 3R sendiri untuk mengurangi sampah kawasannya.

Anggaran pada Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya Hidup pada Tahun 2019 sebesar Rp 18.578.876.860,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh



Gambar 3.4. Penerimaan Penghargaan Pembina Proklm Tingkat Nasional Pemerintah Kabupaten Magelang.

delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp 13.250.120.583,00 (*tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta seratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah)* atau sebesar 71,32%.

Prestasi tingkat nasional yang dicapai oleh DLH adalah Program Kampung Iklim (ProKlim) tingkat Nasional. Prestasi luar biasa diraih oleh Kabupaten Magelang karena mendapatkan penghargaan di 2 (dua) kampung sekaligus di Tahun 2019 ini. Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah program berlingkup nasional yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Melalui pelaksanaan ProKlim, Pemerintah memberikan penghargaan terhadap masyarakat di lokasi tertentu yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Pelaksanaan ProKlim mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19/2012 tentang Program Kampung Iklim. ProKlim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah minimal setingkat Dusun/Dukuh/RW dan maksimal setingkat Desa/Kelurahan atau yang dipersamakan dengan itu. ProKlim di Kabupaten Magelang pada Tahun 2019 diarahkan untuk memberi prototype contoh pengelolaan lingkungan hidup di Daerah Pedesaan dan Perkotaan.

Penyebab keberhasilan: Masyarakat semakin sadar tentang pentingnya penghijauan terutama untuk menyelamatkan mata air, melalui upaya memasyarakatkan biopori terutama di lahan yang tidak rawan longsor dan koordinasi yang baik oleh tim pemantauan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan baik di daerah di provinsi.

Hambatan dan kendala pada Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya Hidup antara lain:

- a. Masih rendahnya cakupan wilayah pelayanan persampahan;
- b. Pada RPJMD 2014-2019 perhitungan persentase penanganan sampah adalah berdasarkan timbulan sampah perkotaan. Fokus penanganan sampah dilaksanakan di ibu kota kecamatan. Namun demikian, sejak dicanangkannya Perbup Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, penanganan sampah juga dilaksanakan di pedesaan.

c. Rasio TPS yang masih rendah.

Alternatif solusi terhadap permasalahan-permasalahan di atas adalah:

- a. Memperluas cakupan wilayah pelayanan persampahan;
- b. Mendorong penggunaan dana desa untuk mengoptimalkan penanganan sampah;
- c. Memperbanyak jumlah TPS untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan TPA regional yang lebih terintegrasi dan mendorong penggunaan dana desa untuk mengoptimalkan penanganan sampah.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya Hidup adalah :

- a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- c. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- e. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- f. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- g. Program Pengembangan Kapasitas dan kemampuan Laboratorium lingkungan
- h. Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan.

24. Sasaran Srategis Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana

Menurut Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak terpisahkan. Sedangkan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Sasaran srategis terciptanya pengelolaan kawasan hutan yang dapat mengurangi resiko bencana dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Terciptanya pengelolaan

kawasan hutan yang dapat mengurangi resiko bencana. Tolok ukur capaian keberhasilannya terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%), dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.39.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1	2	4	5	6	7	8	9	
136	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	ha	NA	2.822	NA	NA	2,822	NA
137	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	persen	NA	4,66	NA	NA	4,66	NA
Rata-rata Capaian Sasaran :						NA		NA

Tidak dilakukan analisa terhadap Sasaran Strategis Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana, karena sudah menjadi kewenangan provinsi.

25. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah

Sasaran strategis meningkatnya kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik, bebas KKN serta meningkatnya kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan daerah mempunyai tolok ukur capaian kinerja sasaran strategis sebanyak 4 (empat) indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.40

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)	
				Target	Capaian	%	Target	%
1		2	4	5	6	7	8	9
138	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	100	Ada	100
139	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada	Ada	Ada	100	Ada	100
140	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	Ada	Ada	100	Ada	100
141	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	persen	94,57	100	85	85,33	100	85,33
Rata-rata Capaian Sasaran :						96,33		96,33

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa target Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah pada Tahun 2019 hampir tercapai yaitu sebesar 96,33% (Sangat tinggi), Capaian yang sama untuk target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 96,33% (Sangat tinggi). Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Magelang telah patuh dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di tingkat atasnya serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan kerja tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2014-2019 telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD tahun 2014-

2019 merupakan indikator kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah sebesar Rp 8.396.354.630,00 (*delapan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 7.756.407.051,00 (*tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh ribu lima puluh satu rupiah*) atau sebesar 92,38%.

Kebijakan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas kelembagaan perencanaan pada setiap Perangkat Daerah . Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel.

Program-program pembangunan yang mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah Pembangunan adalah :

1. Program Pengembangan Data/ informasi;
 2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
 4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 5. Program Perencanaan Sosial dan Budaya;
 6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
26. Sasaran Strategis Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal

Sasaran strategis terwujudnya kemandirian dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan serta meningkatnya kualitas aparatur daerah, kualitas pelayanan publik dengan Standar Pelayanan Minimal

memiliki tolok ukur capaian keberhasilannya sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja, dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.41

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	
Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
142	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk		0,69	0,44	0,66	149,44	0,44	149,44
143	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk		88,13	95,54	87,82	91,92	95,54	91,92
144	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah		4	4	4	100	4	100
145	Penegakan PERDA	persen	95,29	75	93,48	124,64	75	124,64
146	Persentase Peningkatan PAD	persen	17,89	12,02	28,33	235,69	12,02	235,69
147	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		Ada	Ada	Ada	100	Ada	100
Urusan : Statistik								
148	Buku "Kabupaten Dalam Angka"		Ada	Ada	Ada	100	Ada	100
149	Buku "PDRB Kabupaten"		Ada	Ada	Ada	100	Ada	100
Urusan : Kearsipan								
150	Pengelolaan Arsip Secara Baku	persen	89,77	100	107	106,52	100	106,52
151	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	orang	901	329	1.151	349,85	329	349,85
Rata-rata Capaian Sasaran :						145,81		145,81

Sumber: Sekretariat Daerah, Diskominfo dan Dispuspa Kabupaten Magelang, 2020

Sasaran Strategis Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal diampu oleh 3 urusan yaitu : Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Urusan Statistik dan Urusan Kearsipan. Capaian kinerja pada sasaran strategis pada Tahun 2019 telah melampaui target sebesar 145,81% (Sangat tinggi) demikian juga capaian terhadap target RPJMD telah mencapai 145,81% (Sangat tinggi).

Anggaran pada Sasaran Strategis Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatkan Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal karena adanya perubahan nomenklatur pembagian urusan dalam pencapaian sasaran tersebut, maka pada Tahun 2019 urusan tersebut dibagi menjadi 3 urusan yang terdiri dari:

- a. Urusan pemerintahan, yang terdiri dari 3 (tiga) sub urusan, yaitu:
 - 1) Sub urusan Administrasi Pemerintahan Rp 44.947.851.115,00 (*empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus lima belas rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 40.237.961.478,00 (*empat puluh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah*) atau sebesar 89,52%.
 - 2) Sub urusan Kepegawaian Rp 2.737.773.490,00 (*dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 2.394.134.024,00 (*dua miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu dua puluh empat rupiah*) atau sebesar 87,45%.
 - 3) Sub urusan Pengawasan Rp 1.259.517.030,00 (*satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu tiga puluh rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 1.198.292.630,00 (*satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) atau sebesar 95,14%.
- b. Urusan Statistik Rp 892.965.000,00 (*delapan ratus Sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 861.131.000,00 (*delapan ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah*) atau sebesar 96,44%.
- c. Urusan kearsipan Rp 448.901.000,00 (*empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 441.637.203,00 (*empat ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah*) atau sebesar 93,38%.

Faktor penunjang keberhasilan Sasaran Strategis Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta

Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal adalah:

- a. Adanya koordinasi yang baik dengan para pemangku kepentingan
- b. Upaya tindakan represif non yustisi
- c. Mengutamakan perda prioritas (yang berpengaruh terhadap peningkatan PAD) dan adanya aduan masyarakat

Permasalahan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Sasaran Strategis Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatkan Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal antara lain:

- a. Kurangnya Diklat SDM anggota Satpol PP dan Satlinmas;
- b. Penambahan jumlah personil Polisi Pamong Praja baik PNS maupun tenaga bantu Polisi Pamong Praja.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana, seperti keterbatasan mobil patroli yang dimiliki.

Solusi alternatif untuk permasalahan-permasalahan pada Sasaran Strategis Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatkan Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal, adalah:

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Diklat SDM anggota Satpol PP dan Satlinmas serta penambahan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana, seperti keterbatasan mobil patroli yang dimiliki.
- c. Lebih mengedepankan tindakan represif non yustisi dalam penegakan hukum
- d. Menindaklanjuti dengan upaya tindakan yustisial ke pengadilan
- e. Meningkatkan monitoring, pembinaan dan pengawasan terhadap pemilik usaha (perijinan)

Program-program pembangunan pada Sasaran Strategis Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatkan Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal, yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- b. Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- d. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- e. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah
- f. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- g. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- i. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
- j. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- k. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- l. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

27. Sasaran Strategis Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak

Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih sehingga informasi yang diperoleh bisa dimengerti dan dipahami. Sedangkan informasi adalah segala sesuatu yang mempunyai arti dan nilai bagi penerima informasi. Proses penanganan komunikasi dan penyampaian informasi dilaksanakan melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sasaran Strategis Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak memiliki tolok ukur capaian keberhasilannya sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.42

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	
Urusan : Komunikasi dan Informatika								
152	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	penyiaran	8	6	8	133,33	6	133,33
153	Web Site Milik Pemerintah Daerah		Ada	Ada	Ada	100	Ada	100
154	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal		9/3	9/3	9/3	100	9/3	100
Rata-rata Capaian Sasaran :						111,11		111,11

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak pada Tahun 2019 adalah telah melapui target sebesar 111,11% (Sangat tinggi) hal ini telah diatas target, demikian juga capaian terhadap target akhir RPJMD telah diatas target sebesar 111,11% (Sangat tinggi).

Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang Tahun 2019 Jumlah penyiaran Radio/ TV lokal yang sudah berizin berjumlah 9 penyiaran, yang terdiri dari 8 penyiaran radio dan 1 penyiaran TV lokal. Penyiaran radio yang berizin adalah Gemilang, Pop, Best, Merapi Indah, Fastabic, Unima, Walisongo dan Konco Deso. Sedangkan siaran TV lokal adalah Magelang TV. Untuk penyiaran radio/ tv lokal yang belum berizin masih banyak yang beroperasi, dalam hal ini diharapkan ke depan semua penyiaran radio /tv lokal tersebut bisa difasilitasi untuk memperoleh izin.

Website milik Pemerintah Daerah telah aktif sampai ke desa - desa melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Program pemberdayaan kontributor website dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan bidang IT setiap tahun secara bertahap. Jumlah Surat Kabar Lokal/ Nasional adalah 9/3, yang terdiri dari Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Jawa Pos, Sindo, Wawasan, Magelang Ekspres, Suara Gemilang, Republika, Merapi, Tribun Yogya / Tempo, Kompas dan Metro.

Anggaran untuk mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp 11.799.276.950,00 (*sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp 10.886.574.639 (*sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah*) atau sebesar 92,26%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah terbatasnya akses informasi yang didapat masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia pengelola komunikasi dan informasi.

Alternatif solusinya adalah peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan informasi dan komunikasi, serta penambahan kuantitas jumlah SDM pengelola komunikasi dan informasi.

Program-program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak adalah:

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- b. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
- c. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa.

28. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil

Sasaran strategis Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan capil memiliki tolok ukur capaian keberhasilannya dilaksanakan melalui beberapa indikator kinerja dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.43

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	
155	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	persen	96,13	91,87	98,68	107,41	91,87	107,41
156	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	persen	94,29	100	91,92	91,92	100	91,92
157	Rasio Pasangan Berakte Nikah	persen	34,26	1,8	46,57	2.587,22	1,8	2.587,22
158	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	100	sudah	100
Urusan : Pertanahan								
159	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	persen	53,41	33,83	53	157,88	33,83	157,88
160	Penyelesaian Izin Lokasi	persen	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran :						524,07		524,07

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Sekretariat daerah Kabupaten Magelang, 2020

Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil diampu oleh 2 (dua) urusan yaitu urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Urusan Pertanahan, dengan capaian sasaran strategis pada pada Tahun 2019 telah melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 524,07% (Sangat tinggi) demikian juga dengan capaian pada akhir RPJMD mencapai 524,07% (Sangat tinggi), Capaian yang Sangat tinggi tersebut dikarenakan indikator Rasio pasangan berakate nikah tingkat capaiannya mencapai 2.587,22%.

Anggaran Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil pada Tahun 2019 adalah sebesar sejumlah Rp 165.821.000,00 (*seratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 152.177.920,00 (*seratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*) atau sebesar 91,77%.

Penyebab keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah:

- a. Perekaman jemput bola dan informasi kepada masyarakat untuk perekaman pemula.
- b. Adanya Sosialisasi tentang Pencatatan Perkawinan dengan mengundang Pengurus Gereja, Pure, Wihara dan Penghayat Kepercayaan.
- c. Adanya Sosialisasi tentang Akta Kelahiran dan dampak perkawinan orang tua nya belum dicatat oleh negara.
- d. Mengadakan koordinasi dengan pengurus gereja untuk laporan perkawinan sehingga kita bisa mengarahkan umatnya untuk langsung mencatatkan perkawinan pada Disdukcapil.

Hambatan dan kendala Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah:

- a. Data yang dilaporkan adalah berdasarkan pada data base pelayanan, dan belum seluruh produk (dokumen) akta kelahiran sudah dimasukkan dalam data base, sehingga muncul selisih data yang belum sesuai dengan yang sebenarnya;
- b. Keterbatasan blanko e-KTP dari pusat, sehingga pencetakan e-KTP tidak sesuai standar waktu;

- c. Kesadaran masyarakat dalam membuat dokumen kependudukan yang masih rendah, dimana masyarakat biasanya membuat manakala dibutuhkan.

Alternatif solusi untuk permasalahan di atas adalah:

- Pencatatan data base pada dokumen akta kelahiran lebih awal.
- Pengadaan sarana dan prasarana piranti e-KTP pada Tahun 2019 agar setiap kecamatan bisa melakukan cetak e-KTP;
- Sosialisasi intensif tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

Program yang mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

29. Sasaran Strategis Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat dan Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat

Sasaran strategis Meningkatnya kondusifitas dan keamanan masyarakat, meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, dan Berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada masyarakat memiliki tolok ukur capaian kinerja sebanyak 6 (enam) indikator kinerja, dengan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.44

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	4	5	6	7	8	9
161 Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	kegiatan	12	12	12	100	12	100
162 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	kegiatan	12	12	12	100	12	100
Rata-rata Capaian Sasaran :						100	100

Sumber: kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Masyarakat d pada Tahun 2019 pada focus urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri telah tercapai dengan capaian sebesar 100% (Sangat tinggi) demikian juga dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 100% (Sangat tinggi).

Dalam rangka meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, moral, adat istiadat, budaya, dan keamanan, serta ketertiban berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bagian Hukum telah melaksanakan Fasilitasi RANHAM berupa



Gambar 3.5 Penerimaan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia

pengumpulan data HAM dan data Kabupaten/Kota peduli HAM. Berdasarkan data Kabupaten Kota Peduli HAM tersebut, pada Tahun 2019 Kabupaten Magelang telah mendapatkan anugerah penghargaan atas upaya membina dan mengembangkan Kabupaten Magelang menjadi Kabupaten yang Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan HAM.

Tabel 3.45

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2019

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019			Akhir RPMJD (2019)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	4	5	6	7	8	9
163	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	persen	100	99	98,97	100	98,97
164	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	persen	100	104	103,51	100	103,51
165	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	persen	86,25	100	100	100	100
166	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	persen	96,66	94	94	100	94
Rata-rata Capaian Sasaran :					99,12		99,12

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat pada Tahun 2019 pada fokus urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri hampir tercapai dengan capaian sebesar 99,12% (Sangat tinggi) demikian juga dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 99,12% (Sangat tinggi).

Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat dan Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat pada Tahun 2019 sebesar Rp 10.964.381.430,00 (*sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah*) dengan realisasi sejumlah Rp 8.306.070.549,00 (*delapan miliar tiga ratus enam juta tujuh puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*) atau sebesar 84,88%.



Gambar 3.6. Top 45 Dan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 Tingkat Nasional

“Misteri Calon Pengantin Paseso Merapi (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat)”

Penyebab Keberhasilan Sasaran Strategis Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat dan Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat

adalah :

1. keberhasilan dalam manajemen penanggulangan bencana ditunjang dengan adanya gotong royong/ peran serta pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
2. Penanggulangan Bencana diarahkan pada upaya pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
3. Menekankan pembangunan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dan peringatan dini
4. Penanganan kedaruratan dengan segera yang melibatkan peran serta pemerintah, relawan dan pemerintah desa serta masyarakat.



Gambar 3.7. Top 10 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan judul PANCEN A SIKK (Pantauan Bencana dengan Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten)

Kegagalan dalam penanggulangan bencana karena:

1. Masih kurangnya dokumen atau aturan terkait penanggulangan bencana yang sudah dilegalisasi dan peraturan yang belum disusun sebagai amanat Perda No. 3 Tahun 2014. Peraturan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang yang sudah dilegalikan adalah:
 - a) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - b) Peraturan Bupati no. 18 Tahun 2016 Tentang Rincian Tahapan dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang
 - c) Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2018 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018 -2022.Dokumen yang belum dilegalisasi adalah:

- a) Rencana Kontinjensi Erupsi Merapi
- b) Rencana Kontinjensi Tanah Longsor

Peraturan yang belum selesai di susun adalah:

- a) SOP penanggulangan bencana
- b) Peraturan terkait penanganan pengungsi
- c) Peraturan terkait tata cara pengelolaan bantuan masyarakat

2. Belum terselesaikannya pensertifikatan tanah hunian tetap

Alternatif Solusi adalah:

1. Gotong royong manajemen penanggulangan bencana agar dapat berjalan dengan efektif masih diperlukan pemahaman yang sama antara seluruh pemangku kepentingan, bagaimana mengimplementasikan manajemen penanggulangan bencana yang efektif.
2. Melegalisasi dokumen terkait penanggulangan bencana
3. Segera menyusun peraturan terkait penanggulangan bencana terutama SOP, penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan tatacara pengelolaan bantuan masyarakat.
4. Menyelesaikan pensertifikatan tanah hunian tetap dan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Magelang.

Program-program yang mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat dan Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat adalah:

- a. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- b. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- c. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- d. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- e. Program pengembangan wawasan kebangsaan
- f. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- g. Program pendidikan politik masyarakat
- h. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan sumberdaya maka

perlu dilakukan analisis efesensi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada. Dalam analisis efesensi dilakukan perbandingan antara pencapaian kinerja sasaran strategis dibandingkan dengan prosentase realisasi anggaran untuk yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut.

Penghitungan analisis efesensi dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja dengan tingkat capaian mencapai 100% atau lebih, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis dan capaian kinerja yang tidak mencapai 100% tidak dilakukan analisis efesensi.

Analisa efesensi dapat dilihat pada tabel 3.46 berikut ini :

Tabel 3.46
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2019			Tingkat Efisiensi	
					Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A.	MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama								
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan	1	Kasus Kematian Ibu Melahirkan*)	127,27	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	5.461.900.000	2.430.060.009	44,49	NE
					Program Managemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	196.677.614.953	141.012.029.811	71,70	28,30
					Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan RS mata	92.259.575.015	83.780.172.776	90,81	9,19
					Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	4.000.000	3.999.115	99,98	0,02
					Program Pengawasan Obat dan Makanan	70.000.000	67.774.100	96,82	3,18
		2	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran *)	71,85	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	4.000.000	3.999.680	99,99	NE
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	251.677.000	181.534.330	72,13	NE
		3	Persentase Balita Gizi Buruk *)	186,67	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.842.953.000	1.816.423.000	98,56	1,44
					Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	21.840.000	13.356.775	61,16	38,84
		4	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup *)	87,75	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	191.332.000	190.707.850	99,67	NE
		5	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100,00	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	376.800.000	321.272.500	85,26	14,74
		6	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100,00	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	10.259.264.000	6.499.305.394	63,35	36,65

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2019			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		7	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100,00	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	21.983.810.973	16.950.535.063	77,10	22,90
		8	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	110,56	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6.015.646.014	5.780.929.924	96,10	3,90
		9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	95,40	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	43.751.055.375	38.519.774.589	88,04	NE
		10	Cakupan Kunjungan Bayi	102,32	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan praspuskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	21.185.510.022	19.141.007.263	90,35	9,65
2	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol	11	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	126,11	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	250.843.615	248.138.290	98,92	1,08
		12	Rasio Akseptor KB	92,66	Program Keluarga Berencana	7.643.980.125	6.993.878.821	91,50	NE
		13	Cakupan Peserta KB Aktif	93,36	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	49.446.500	49.446.305	100,00	NE
		14	Keluarga Pra Sejahtera	97,47	Program pelayanan Kontrasepsi	476.225.000	472.744.115	99,27	NE
		15	Keluarga Sejahtera I	97,50		476.225.000	472.744.115	99,27	
3	Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkatkan, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu	16	APK PAUD	109,53	Program Pendidikan Anak Usia Dini	906.521.000	827.247.050	91,26	8,74
		17	Angka melek huruf	100,72	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	43.374.350.900	41.135.011.296	94,84	5,16
		18	Angka rata-rata lama sekolah	74,00	Program Pendidikan Non Formal	4.570.915.200	3.789.881.470	82,91	NE
			Angka Partisipasi Murni :						
		19	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94,06					
20	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	80,24							

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2019			Tingkat Efisiensi	
						Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
	Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan	21	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C	NA						
				<i>Angka partisipasi kasar</i>						
		22	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	100,80		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	154.281.042.586	50.404.986.620	32,67	NE
		23	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	89,36						
		24	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	NA						
				<i>Angka Putus Sekolah:</i>						
		25	Angka Putus Sekolah SD/MI	164,29						
		26	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	166,67						
		27	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	NA						
				<i>Angka Kelulusan:</i>						
		28	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,02						
		29	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,80						
		30	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	NA						
				<i>Rerata Nilai UN :</i>						
		31	Rerata Nilai UN SD/MI	85,68						
		32	Rerata Nilai UN SMP/MTs	94,14						
		33	Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK	NA						
	34	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	106,40	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	912.155.000					
			<i>Angka Melanjutkan :</i>							

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2019			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		35	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	109,07					
		36	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	110,66					
		37	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	97,08					
		38	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	92,05					
4	Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga	39	Jumlah Organisasi Pemuda	96,30	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	456.220.090	397.985.455	87,24	NE
					Program peningkatan peran serta kepemudaan	463.890.195	450.424.910	97,10	NE
		40	Jumlah Organisasi Olah Raga	97,22	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	4.984.025.210	4.588.143.040	92,06	NE
		41	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	89,47	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	92.902.690	87.132.690	93,79	NE
		42	Jumlah Kegiatan Olah Raga	100,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	15.476.043.455	8.415.247.612	54,38	NE
		43	Lapangan Olah Raga	60,00					
5	Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca	44	Jumlah Perpustakaan	103,19	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.046.042.500	971.956.625	92,92	7,08
		45	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	211,68					
		46	Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	103,13					
6	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	47	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	64,45	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	226.806.220	222.343.260	98,03	NE
		48	Rasio KDRT	85,00	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	304.841.000	298.419.988	97,89	NE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2019			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		49	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	100,00	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	191.298.940	188.994.940	98,80	1,20
					Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1.349.374.555	1.338.557.486	99,20	0,80
7	Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	50	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	114,71	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.714.885.345	1.628.967.640	94,99	5,01
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	443.035.000	433.625.615	97,88	2,12
		51	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	210,65	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	112.623.040	110.284.100	97,92	2,08
					Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	56.495.060	49.874.160	88,28	11,72
					Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	3.622.333.860	3.606.769.361	99,57	0,43
8	Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila	52	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	100,00	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2.158.366.000	2.112.982.350	97,90	2,10
		53	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	100,00	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.347.220.000	1.332.285.415	98,89	1,11
		54	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	142,86	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	987.769.000	898.907.737	91,00	9,00
9	Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan	55	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	40,00	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	8.816.413.745	8.123.593.339	92,14	NE
		56	Cakupan Kelompok Binaan PKK	69,31	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	7.108.025.900	6.800.717.219	95,68	NE
		57	Jumlah LSM	66,67	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	475.432.200	465.328.358	97,87	NE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2019			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
					Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	702.150.920	673.767.687	95,96	NE
B.	MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing								
1	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja	58	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	97,26	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	988.012.000	959.221.480	97,09	NE
			Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	175.160.000	172.477.810	98,47	NE		
		59	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	114,84	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.242.968.000	1.186.111.690	95,43	4,57
			Pencari Kerja yang Ditempatkan	95,60	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	296.179.000	295.635.800	99,82	NE
		61	Tingkat Pengangguran Terbuka	96,69					
		62	Keselamatan dan Perlindungan	NA					
63	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	100,00							
2	Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal	64	Persentase Koperasi Aktif	120,24	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	1.494.915.249	1.334.748.850	89,29	10,71
		65	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	100,20	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	533.125.500	519.705.785	97,48	2,52
		66	Jumlah BPR/LKM	77,75	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	809.224.000	783.826.360	96,86	NE
		67	Usaha Mikro dan Kecil	1,17	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	249.501.800	248.164.450	99,46	NE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2019			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah	68	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	204,81	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	203.645.270	198.096.830	97,28	2,72
		69	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	272,74	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	657.966.390	638.598.850	97,06	2,94
		70	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	100,77	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	708.565.900	682.393.545	96,31	3,69
		71	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	263,42	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	89.135.000	87.675.980	98,36	1,64
4	Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat	72	Ketersediaan Pangan Utama Beras	106,06	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.226.972.275	1.175.168.793	95,78	4,22
		73	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	100,57					
5	Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.		Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar						
		74	Produktivitas Padi	104,48	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	11.255.824.926	7.558.895.340	67,16	32,84
		75	Produksi Padi	122,75	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	321.229.650	294.379.490	91,64	8,36
		76	Produktivitas Jagung	116,22	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	325.806.650	309.585.555	95,02	4,98
		77	Produksi Jagung	56,20	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan	557.500.000	408.336.230	73,24	26,76

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2019			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		78	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	108,74	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	609.248.500	609.224.295	100,00	0,00
		79	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	100,38					
		80	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB	73,48					
		81	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	147,45					
		82	Cakupan Bina Kelompok Petani	83,36					
			Produksi Hewan ternak						
		83	Sapi potong	100,01	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	494.300.000	487.481.380	98,62	1,38
		84	Kerbau	128,10	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	4.340.178.684	3.998.618.986	92,13	7,87
		85	Kambing	100,00					
		86	Domba	100,00					
			Produksi Hewan Unggas						
		87	Ayam Pedaging	100,01					
		88	Ayam Ras Petelur	104,39	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan	84.691.000	84.467.350	99,74	NE
		89	Ayam Buras	100,03					
		90	Itik	101,43					
		91	Sapi Perah	100,01					
			Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)						
		92	Daging	97,31					
		93	Telur	87,33					
		94	Susu	39,09					
6	Menguatnya Struktur	95	Produksi Perikanan (Benih)	100,00	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	614.878.650	612.414.300	99,60	0,40

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2019			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan	96	Produksi Perikanan Budidaya	139,57	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.862.005.500	1.613.943.920	86,68	13,32
		97	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	114,20					
		98	Konsumsi Ikan	135,05					
		99	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)	85,45					
7	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	100	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	108,72	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	45.049.248.500	41.799.703.589	92,79	7,21
		101	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	57,16	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2.023.729.685	1.871.145.791	92,46	NE
		102	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	28,78	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	263.930.000	262.331.600	99,39	NE
					Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan	1.464.076.500	1.186.266.599	81,02	18,98
8	Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah	103	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	16,76	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	982.230.000	957.445.245	97,48	NE
		104	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	104,85					
		105	Pertumbuhan Industri.	85,37					
9	Makin Optimalnya Pemanfaatan dan	106	Kunjungan Wisata Manca Negara	41,96	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	8.047.383.465	6.394.726.973	79,46	NE
		107	Kunjungan Wisata Nusantara	93,27	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.485.090.000	1.421.210.020	95,70	NE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2019			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah	108	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	74,75	Program Pengembangan Kemitraan	1.266.700.980	1.218.363.101	96,18	NE
C. MISI III: Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah									
1	Aksesibilitas Antar Daerah Meningkatkan dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru	109	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	107,26	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	68.542.136.000	56.213.375.027	82,01	17,99
					Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan	24.250.894.000	21.907.624.544	90,34	9,66
					Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	50.000.000	46.225.000	92,45	7,55
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	715.540.000	706.530.380	98,74	1,26
					Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	220.000.000	219.473.915	99,76	0,24
					Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	503.629.000	458.450.574	91,03	8,97
		110	Rasio Jaringan Irigasi	214,03	Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong	8.483.169.000	7.289.786.723	85,93	14,07
		111	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	100,59	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	16.907.185.000	15.092.520.375	89,27	10,73
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	8.583.287.400	7.330.608.387	85,41	14,59
					Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	227.445.000	224.649.850	98,77	1,23
Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi	100.000.000				98.679.296	98,68	1,32		
2	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan	112	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	113,08	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	37.210.664.000	21.441.314.882	57,62	NE
		113	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	88,16	Program Pengembangan Perumahan	2.010.536.000	1.814.979.130	90,27	NE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2019			Tingkat Efisiensi					
						Anggaran	Realisasi	%						
1	2	3		4	5	6	7	8	9					
3	Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat	114	Rumah Layak Huni (%)	129,03	Program Lingkungan Sehat Perumahan	4.402.875.650	3.764.528.171	85,50	14,50					
	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan	115	Persentase Pertambahan Berijin	NA										
4	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan	116	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	NA	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	804.808.000	720.514.685	89,53	NE					
		117	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	64,05										
		118	Jumlah Ijin Trayek	75,12										
		119	Rasio Uji Kir Kendaraan	92,94	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	691.537.500	589.385.070	85,23	NE					
		120	Jumlah Terminal Bis	75,00						Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	245.103.000	241.748.705	98,63	NE
										Program peningkatan pelayanan angkutan	2.079.676.000	1.752.756.467	84,28	NE
121	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	100,00	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.960.281.425	143.307.670	7,31	NE							

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2019			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		122	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji	100,00					
		123	Pemasangan Rambu-Rambu	118,85	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	245.103.000	241.748.705	98,63	1,37
D.	MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup								
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam	124	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	133,33	Program Perencanaan Tata Ruang	300.001.000	287.794.025	95,93	4,07
		125	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	90,00					
		126	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	100,00	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	622.817.000	579.729.435	93,08	NE
		127	Luas Kawasan Lindung (ha)	100,00					
		128	Luas Kawasan Budidaya (ha)	100,00					
		129	Jumlah IMB yang Dikeluarkan	63,91					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2019			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		130	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	84,21					
2	Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya	131	Persentase Penanganan Sampah	122,81	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	14.473.799.860	9.379.221.212	64,80	35,20
		132	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	300,00	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	4.105.077.000	3.870.899.371	94,30	5,70
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	85.406.000	84.018.980	98,38	1,62
					Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya	150.000.000	148.865.700	99,24	0,76
		133	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	146,00	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.083.482.000	1.000.242.943	92,32	7,68
		134	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	214,81	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan	3.599.776.000	3.458.072.250	96,06	3,94
		135	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	12,93	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	142.641.000	139.655.300	97,91	NE
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	71.800.000				70.262.900	97,86	NE		
					Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	100.000.000	97.478.800	97,48	NE
3	Terciptanya Pengelolaan	136	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	NA	Program Pengembangan Kapasitas dan kemampuan Laboratorium lingkungan	264.871.000	172.467.704	65,11	NE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2019			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana	137	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	NA					
E.	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis								
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah	138	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	100,00	Program Pengembangan Data /Informasi	1.502.865.000	1.380.271.522	91,84	8,16
		139	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	100,00	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.486.968.330	5.050.879.115	92,05	7,95
		140	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	100,00	Program Kerjasama Pembangunan	126.495.000	122.693.796	96,99	3,01
		141	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPd	85,33	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	134.436.000	126.551.155	94,13	NE
					Program Perencanaan Sosial dan Budaya	747.404.800	682.770.551	91,35	NE
					Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	199.176.000	195.417.900	98,11	NE
					Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	892.965.000	861.131.000	96,44	NE
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	199.009.500	197.823.012	99,40	NE		
2	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat	142	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	149,44	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.475.406.250	2.134.828.228	86,24	13,76
					Peningkatan Manajemen Kepegawaian	262.367.240	259.305.796	98,83	1,17
					Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	4.618.645.000		0,00	NE

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2019			Tingkat Efisiensi	
					Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	dalam Pembangunan serta Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal			Program peningkatan disiplin aparatur	638.167.000	546.409.613	85,62	14,38	
		143	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	91,92	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	25.924.000	24.131.850	93,09	NE
		144	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah	100,00	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.525.119.950	2.355.279.800	93,27	6,73
					Program Penataan Daerah Otonomi Baru	155.855.000	47.101.800	30,22	NE
					Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	18.149.730.500	16.313.231.433	89,88	10,12
					Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	50.755.000	48.536.644	95,63	4,37
		145	Penegakan PERDA	124,64	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.570.240.000	1.528.780.219	97,36	2,64
					Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.161.011.500	1.102.868.410	94,99	5,01
		146	Persentase Peningkatan PAD	235,69	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	18.492.490.715	16.358.887.434	88,46	11,54
					Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	502.119.610	497.884.490	99,16	0,84
		147	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	100,00	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1.089.476.030	948.930.170	87,10	12,90
					Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	170.041.000	133.662.220	78,61	21,39
		148	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	100,00	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.314.604.840	1.961.259.398	84,73	15,27
		149	Buku "PDRB Kabupaten"	100,00					
		150	Pengelolaan Arsip Secara Baku	106,52	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	151.640.000	149.392.953	98,52	1,48
	151	Peningkatan SDM Pengelola	349,85	Program Perbaikan Sistem	30.171.000	29.732.420	98,55	1,45	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2019			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
			Kearsipan		Administrasi Kearsipan				
					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	267.090.000	262.511.830	98,29	1,71
3	Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak	152	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	133,33	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	7.596.437.300	7.449.226.620	98,06	1,94
		153	Web Site Milik Pemerintah Daerah	100,00	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	125.000.000	118.758.900	95,01	4,99
		154	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	100,00	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	4.077.839.650	3.318.589.119	81,38	18,62
4	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Capil	155	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	107,41	Program Penataan Administrasi Kependudukan	6.599.081.500	6.456.205.803	97,83	2,17
		156	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	91,92					
		157	Rasio Pasangan Berakte Nikah	2.587,22					
		158	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	100,00					
		159	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	157,88	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	138.550.000	126.903.320	91,59	8,41
		160	Penyelesaian Izin Lokasi	100,00	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	27.271.000	25.274.600	92,68	7,32
F.	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat								
1	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat	161	Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	100,00	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1.372.804.000	553.174.940	40,30	NE
		162	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	100,00	Program pendidikan politik masyarakat	120.000.000	117.900.000	98,25	1,75
					Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	886.386.625	877.757.465	99,03	0,97
					Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	417.022.000	392.751.880	94,18	5,82
					Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.667.902.055	3.463.402.411	94,42	5,58

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian	Program	Anggaran Tahun 2019			Tingkat Efisiensi
						Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
					Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	37.327.000	37.306.000	99,94	0,06
					Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	22.432.500	22.432.500	100,00	0,00
2	Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat	163	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	98,97	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	4.440.507.250	3.841.345.353	86,51	NE
		164	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	103,51	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	8.997.774.050	8.920.078.479	99,14	NE
		165	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100,00					
		166	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	94,00					
Jumlah :						1.055.518.378.307	793.083.440.775	75,14	7,85

Sumber : Bagian Organisasi, data diolah

Penghitungan efisiensi dilakukan apabila capaian indikator kinerja atau kinerja sasaran $\geq 100\%$ (lebih besar atau sama dengan seratus persen), dimana tingkat efisiensi dihitung 100% (seratus persen) dikurangi persentase realisasi keuangan. Tingkat efisiensi tidak dihitung pada kegiatan yang tidak dilaksanakan atau kegiatan dengan capaian realisasi keuangan sangat rendah.

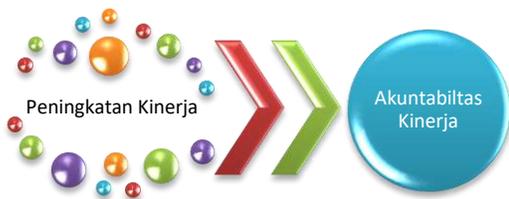
Berdasarkan tabel efisiensi diatas rata-rata efisiensi capaian kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 7,85%, tetapi tingkat efisiensi ini belum mencerminkan efektifitas penggunaan sumberdaya khususnya dalam penggunaan anggaran, perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per kegiatan.

C. Prestasi

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magelang membuahkan hasil berupa prestasi pada beberapa bidang pembangunan, beberapa prestasi dan penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Magelang selama Tahun 2019 antara lain:

1. Penghargaan Satya Lencana Pembangunan (SP), Penghargaan tertinggi /tanda kehormatan dari Presiden yang diberikan kepada Bupati Magelang atas prestasi dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Magelang
2. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Dari BPK RI.
3. Penghargaan Kabupaten Layak Anak kepada Bupati Magelang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan kategori NINDYA.
4. Penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Wakil Presiden Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
6. Penghargaan Nugra Jasadharmas Pustaloka diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB)

7. Penghargaan pengembangan Perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca berupa Nugra Jasadharma Pustaloka tahun 2019 di tingkat Nasional dari Perpustakaan Nasional RI.
8. Penghargaan sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Katagori “Baik” Tahun 2019 dai Kemenpan RB bagi DPMPSTSP kabupaten Magelang.
9. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklam) Daerah tingkat nasional, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
10. Penghargaan sebagai pembina Proklam dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
11. Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM
12. TOP Pembina BUMD dari Majalah Top Business bersama Asia Business Research Center
13. Penghargaan “TOP 25 kinerja Bupati terbaik Tahun 2019”. dari Seven Media Asia penyelenggara Seven Media Government Awards 2019.
14. Top 10 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan judul PANCEN A SIKK (Pantauan Bencana dengan Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten
15. Juara ke-2 Tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Award tahun 2019
16. Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Magelang meraih Juara 2 dalam Lomba Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan Arsiparis Teladan
17. Radio Gemilang 96.8 FM Kabupaten Magelang, mendapat penghargaan dari sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) terbaik se Jawa Tengah versi Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID).



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi serta dalam rangka mewujudkan *good governance* pada instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja atas akuntabilitas dilihat dari capaian kinerja organisasi maupun dilihat dari pemanfaatan sumberdaya termasuk didalamnya dalam pemanfaatan anggaran

P
e
n
u
t
u
p

Capaian kinerja sasaran pada indikator makro kepala daerah tahun 2019 rata-rata kinerja sasaran telah terlampaui yaitu tercapai 103,25% dengan kriteria sangat tinggi, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 sama dengan capaian kinerja sasaran telah tercapai 103,25% dengan kriteria sangat tinggi, hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator makro sasaran strategis telah tercapai bahkan terlampaui, baik pada target tahun 2019 maupun target akhir periode RPJMD pada tahun 2019.

Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2019 pada indikator mikro telah melampaui target dengan rata-rata kinerja sasaran telah tercapai 125,17% dengan kriteria sangat tinggi jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2019 tidak terlalu jauh dimana capaian kinerja sasaran telah tercapai 125,17% dengan kriteria sangat tinggi, hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator mikro sasaran startegis telah tercapai bahkan terlampaui pada target Tahun 2019 dan target akhir periode RPJMD pada tahun 2019 telah terlampaui.

Realisasi anggaran Kabupaten Magelang pada tahun 2019 mencapai rata-rata 76,04% dengan katagori Tinggi jika dibandingkan dengan serapan tahun sebelumnya sebesar rata-rata 82,94%, maka realisasi realisasi anggaran program menurun sebesar 6,90%. Tingkat capaian terbanyak adalah kriteria Sangat Tinggi (91% % ≤ 100%) dengan jumlah program 111(72,08%) dibandingkan dengan tahun lalu realisasi program tertinggi sebesar 105 (66,46%), maka pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 6 program atau 5,62%. Capaian program

Sangat Rendah dengan katagori capaian sedang ($\leq 50\%$) sebanyak 5 (3,25%), jika dibandingkan dengan serapan anggaran tahun sebelumnya sebanyak 5 (3,16%) program, maka jumlah realisasi anggaran program pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 0,09%, hal ini menunjukkan kinerja serapan anggaran pada tahun 2019 mengalami penurunan.

Tingkat efesiensi kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 7,85%, tetapi tingkat efesiensi ini belum mencerminkan efektifitas penggunaan sumberdaya khususnya dalam penggunaan anggaran, perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per kegiatan.

Dalam penyusunan dokumen dijumpai permasalahan atau kendala, baik yang bersifat teknis maupun non teknis diantaranya :

1. Terlalu banyaknya sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019, sehingga menyulitkan dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan data.
2. Masih banyaknya indikator kinerja sasaran strategis yang bersifat *output* dan berubah rumus pengukurannya, sehingga menyulitkan dalam proses analisa.
3. Kesulitan di dalam mengumpulkan data kinerja dari SKPD, terutama capaian kinerja yang bersifat makro, dan diperlukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Badan Pusat Statistik.

Alternatif solusi dari permasalahan di atas antara lain :

1. Menyederhanakan jumlah sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
2. Menyusun indikator kinerja tingkat kabupaten minimal bersifat *outcome* serta memastikan rumus penghitungan indikator tidak berubah-ubah dan lebih terukur dengan menerapkan pola *Cascading*.
3. Meningkatkan fungsi koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam perolehan dan pengolahan indikator makro.

Harapan kami untuk tahun-tahun mendatang LKjIP Kabupaten Magelang selain berfungsi untuk mengukur keberhasilan dan atau kegagalan dalam menjalankan misi dan sasaran strategis organisasi, juga dapat digunakan sebagai upaya memacu usaha peningkatan kinerja dan pelayanan publik, dan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki keputusan dan kebijakan dari pemerintah.

Demikian LKjIP Kabupaten Magelang yang menggambarkan capaian kinerja sasaran srategis dan indikator kinerja utama dan pada tahun 2019 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magelang.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.I.P.

Jabatan : BUPATI MAGELANG

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Kota Mungkid, 4 November 2019



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
A	MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama			
	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Agama Yang Semakin Meningkat			
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
	1.	Angka Usia Harapan Hidup	70,56	tahun
	2.	Indeks Gini	0,296	indeks
	3.	Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,4046	indeks
	4.	Persentase penduduk miskin	8	persen
	5.	IPM	75,94	indeks
B	MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing			
	Terwujudnya Peningkatan Perekonomian Daerah yang berdaya Saing dan Berbasis Pada Potensi Lokal Daerah			
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
	6.	Pertumbuhan PDRB	6,4 – 7,1	persen
	7.	PDRB per kapita	15,06	Juta Rp
	8.	Laju inflansi	4±1	persen
	9.	Rasio penduduk yang bekerja	97,97	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
	ASPEK DAYA SAING				
		10.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	38,38	Rp.(juta)
		11.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	37,03	persen
		12.	Nilai tukar petani	106,99	
C	MISI III : Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah				
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Daerah				
	ASPEK DAYA SAING				
		13.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0 17	
D	MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup				
	Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Maksimal dengan Berbasis Kelestarian Lingkungan				
	ASPEK DAYA SAING				
		14.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	95,66	persen
		15.	Luas Wilayah Industri	0,37	persen
E	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis				
	Meningkatkan Manajemen Sistem Pemerintahan Daerah yang Baik, Modern dan Demokratis				
	ASPEK DAYA SAING				
		16.	Lama Proses Perijinan (Hari)	9	hari
		17.	Opini BPK 'WTP'	WTP	
		18.	Nilai AKIP	B	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
F	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat			
	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat Serta Kesadaran dan Kepatuhan Hukum			
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
		19.	Angka kriminalitas	1,45

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS					
ASPEK PELAYANAN UMUM					
A.	MISI I : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama				
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan, Akses, dan Pemerataan Layanan Kesehatan	Urusan : Kesehatan			
		1.	Kasus Kematian Ibu Melahirkan	11	kasus
		2.	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran	6,50	kasus
		3.	Persentase Balita Gizi Buruk	0,15	persen
		4.	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	8	Permil
		5.	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	persen
		6.	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100	persen
		7.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	persen
		8.	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	90	persen
		9.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	persen
10.	Cakupan Kunjungan Bayi	95	persen		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
2.	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dan Terkontrol	Urusan: Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
		11.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	1,57	persen
		12.	Rasio Akseptor KB	81,50	persen
		13.	Cakupan Peserta KB Aktif	80,89	persen
		14.	Keluarga Pra Sejahtera	20,18	persen
		15.	Keluarga Sejahtera I	14,38	persen
3.	Kualitas Pembangunan Manusia yang Semakin Meningkat, dengan Pemerataan Pendidikan yang Layak, Mutu Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan	Urusan: Pendidikan			
		16.	APK PAUD	54,54	persen
		17.	Angka melek huruf	93,95	persen
		18.	Angka rata-rata lama sekolah	10	persen
		Angka Partisipasi Murni :			
		19.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,09	persen
		20.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82,65	persen
		21.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	66,56	persen
		Angka partisipasi kasar			
		22.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	101,84	persen
		23.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	97,56	persen
		24.	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	80	persen
		Angka Putus Sekolah:			
		25.	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,14	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		26.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,57	persen
		27.	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,81	persen
		Angka Kelulusan:			
		28.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,98	persen
		29.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,99	persen
		30.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99,98	persen
		Rerata Nilai UN :			
		31.	Rerata Nilai UN SD/MI	7,75	nilai
		32.	Rerata Nilai UN SMP/MTs	6,49	nilai
		33.	Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK	7,18	nilai
		34.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88	persen
		Angka Melanjutkan :			
		35.	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	89,62	persen
		36.	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMU/SMK/MA	71,55	persen
		37.	Persentase ruang kelas sesuai SNP SD/SDLB/MI	86,74	persen
		38.	Persentase ruang kelas sesuai SNP SMP/MTS	91,43	persen
4.	Terwujudnya Pengembangan Pemuda yang Berkarakter serta Berkesempatan Berolah Raga	Urusan: Kepemudaan dan Olah Raga			
		39.	Jumlah Organisasi Pemuda	27	organisasi
		40.	Jumlah Organisasi Olah Raga	36	organisasi
		41.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	19	kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		42.	Jumlah Kegiatan Olah Raga	24	kegiatan
		43.	Lapangan Olah Raga	2	permil
5.	Meningkatnya Penguasaan Iptek, dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca	Urusan : Perpustakaan			
		44.	Jumlah Perpustakaan	815	unit
		45.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	45335	orang
		46.	Rasio Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	2,24	persen
6.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		47.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2,56	persen
		48.	Rasio KDRT	0,02	persen
		49.	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	100	persen
7.	Berkurangnya Kualitas dan Kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	Urusan : Sosial			
		50.	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	34	unit
		51.	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	20	persen
8.	Terwujudnya Karakter Masyarakat yang Berbudaya, Beragama serta Bermoral Berdasarkan Nilai-Nilai	Urusan : Kebudayaan			
		52.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	38	kali
		53.	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	18	unit

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
	Pancasila	54.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	70	persen
9.	Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera Mandiri dan Berperan Serta dalam Pembangunan	Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
		55.	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	19	persen
		56.	Cakupan Kelompok Binaan PKK	39,52	persen
		57.	Jumlah LSM	6	LSM
B.	MISI II: Membangun Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing				
1.	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan dan Partisipasi Angkatan Kerja	Urusan: Ketenagakerjaan			
		58.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	76,65	persen
		59.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	1,28	persen
		60.	Pencari Kerja yang Ditempatkan	54,27	persen
		61.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,02	persen
		62.	Keselamatan dan Perlindungan	79	persen
		63.	Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	100	persen
2.	Membaiknya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Sektor Basis Ekonomi Lokal	Urusan : Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
		64.	Persentase Koperasi Aktif	78,18	persen
		65.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	106.384	UKM non BPR/ LKM UKM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		66.	Jumlah BPR/LKM	382	BPR/LKM
		67.	Usaha Mikro dan Kecil	98	persen
3.	Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Tingkat Investasi di Daerah	Urusan: Penanaman Modal			
		68.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1.164	investor
		69.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	724.647	Juta rupiah
		70.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	31,19	persen
		71.	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	359	milyar rupiah
4.	Makin Baiknya Ketersediaan Kebutuhan Pokok Menuju Swasembada Pangan yang Disertai Dengan Tersedianya Instrumen Jaminan Pangan pada Tingkat Masyarakat	Urusan: Ketahanan Pangan			
		72.	Ketersediaan Pangan Utama Beras	188,10	persen
		73.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah	87,50	
5.	Menguatnya Kontribusi Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	Urusan: Pertanian			
		Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar			
		74.	Produktivitas Padi	60,1	Kw/ha
		75.	Produksi Padi	355.676	Ton/th
		76.	Produktivitas Jagung	59,3	Kw/ha
		77.	Produksi Jagung	74.337	Ton/th
		78.	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	20,03	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		79.	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB ADHB (%)	71,84	persen
		80.	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB/ADHB	7,73	persen
		81.	Kontribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB	11,97	persen
		82.	Cakupan Bina Kelompok Petani	14,9	persen
		Produksi Hewan ternak			
		83.	Sapi potong	1.862.169	kg
		84.	Kerbau	541	kg
		85.	Kambing	793.265	kg
		86.	Domba	1.115.626	kg
		Produksi Hewan Unggas			
		87.	Ayam Pedaging	9.957.100	ton
		88.	Ayam Ras Petelur	1.019.500	ton
		89.	Ayam Buras	1.239.980	ton
		90.	Itik	94.106	ton
		91.	Sapi Perah	746.158	liter
		Angka Konsumsi Protein Hewani (Gr/Kap/Hari)			
		92.	Daging	6,2	gr/kap/hr

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		93.	Telur	4,65	gr/kap/hr
		94.	Susu	0,11	gr/kap/hr
6.	Menguatnya Struktur Ekonomi Masyarakat Melalui Tingkat Produksi Perikanan	Urusan: Kelautan dan Perikanan			
		95.	Produksi Perikanan (Benih)	2	juta ekor
		96.	Produksi Perikanan Budidaya	18.000	ton
		97.	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	263,57	ton
		98.	Konsumsi Ikan	15,75	Kg/kap/tahun
		99.	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian (%)	2,68	persen
7.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	Urusan: Perdagangan			
		100.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	9,98	persen
		101.	Ekspor Bersih Perdagangan (Juta US\$)	89	Juta US\$
		102.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	13,55	persen
8.	Makin Optimalnya Pemanfaatan Aset dan Produk Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Sebagai Sumber-Sumber Kekayaan Daerah	Urusan: Perindustrian			
		103.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	16,83	persen
		104.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	17,95	persen
		105.	Pertumbuhan Industri.	3,76	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
9.	Makin Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah	Urusan: Pariwisata			
		106.	Kunjungan Wisata Manca Negara	860.549	orang
		107.	Kunjungan Wisata Nusantara	6.594.051	orang
		108.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	6,89	persen
C.	MISI III: Meningkatkan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah				
1.	Aksesibilitas Antar Daerah Meningkat dengan Dukungan Infrastruktur Wilayah yang Baik serta Berkembangnya Aktivitas Produksi dan Mampu Membuka Isolasi Daerah serta Membentuk Kawasan-Kawasan Pertumbuhan Baru	Urusan: Pekerjaan Umum			
		109.	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	69,73	persen
		110.	Rasio Jaringan Irigasi	30,57	persen
		111.	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	67,40	persen
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Layak dan Lingkungan Sehat, Berkurangnya Permukiman Kumuh, dan Tersedianya Sarana Air Bersih yang Mendukung Kualitas Hidup Masyarakat	Urusan: Perumahan			
		112.	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	84,20	persen
		113.	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	2,45	persen
		114.	Rumah Layak Huni (%)	62	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
3.	Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat dan Terkelolanya Sumber Daya Alam yang Berbasis Lingkungan	Urusan: Energi dan Sumber Daya Mineral			
		115.	Persentase Pertambangan Berijin	50	persen
		116.	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	2,64	persen
4.	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Perhubungan	Urusan: Perhubungan			
		117.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	3.705.271	orang
		118.	Jumlah Ijin Trayek	1069	ijin
		119.	Rasio Uji Kir Kendaraan	96,7	persen
		120.	Jumlah Terminal Bis	8	terminal
		121.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	32	menit
		122.	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Kabupaten/Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (Empat Ribu) Kendaraan Wajib Uji	ada	
123.	Pemasangan Rambu-Rambu	94	persen		
D.	MISI IV: Memanfaatkan dan Mengelola Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup				
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pembangunan yang Berorientasi Tata Ruang, serta Mengurangi Resiko Bencana Alam	Urusan: Penataan Ruang			
		124.	Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Per Satuan Luas Wilayah Target	>30	persen
		125.	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	4	persen
		126.	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	0	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	2	3		4	5
		127.	Luas Kawasan Lindung (ha)	25.886	ha
		128.	Luas Kawasan Budidaya (ha)	82,687	Ha
		129.	Jumlah IMB yang Dikeluarkan	676	IMB
		130.	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	38	persen
2.	Terciptanya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari serta Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berorientasi pada Kestinambungan Sumber Daya	Urusan: Lingkungan Hidup			
		131.	Persentase Penanganan Sampah	31	persen
		132.	Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air	2,10	persen
		133.	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UKL-UPL	30	persen
		134.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	1,08	persen
		135.	Jumlah Daya Tampung TPS (M ³)	2.300.000	m ³
3.	Terciptanya Pengelolaan Kawasan Hutan yang Dapat Mengurangi Resiko Bencana	Urusan: Kehutanan			
		136.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	2.822	ha
		137.	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	4,66	persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan		
1	2	3	4	5		
E.	MISI V: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Demokratis					
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas KKN serta Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Daerah	Urusan: Perencanaan Pembangunan				
		138.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada		
		139.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada		
		140.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada		
		141.	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100	persen	
2.	Terwujudnya Kemandirian dan Kemampuan Masyarakat dalam Pembangunan serta Meningkatkan Kualitas Aparatur Daerah, Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
		142.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	0,44		
		143.	Cakupan Petugas Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	95,54		
		144.	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah	4		
		145.	Penegakan PERDA	75	persen	
		146.	Persentase Peningkatan PAD	12,02	persen	
		147.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada		
		Urusan : Statistik				
		148.	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada		
		149.	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5
		Urusan : Kearsipan		
		150. Pengelolaan Arsip Secara Baku	100	persen
		151. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	329	orang
3.	Meningkatnya Hubungan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak	Urusan : Komunikasi dan Informatika		
		152. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	6	penyiaran
		153. Web Site Milik Pemerintah Daerah	Ada	
		154. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	9/3	
4.	Meningkatnya Pelayanan dan Administrasi Kependudukan Cakil	Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil		
		155. Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	91,87	persen
		156. Rasio Bayi Berakte Kelahiran	100	persen
		157. Rasio Pasangan Berakte Nikah	1,80	persen
		158. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	
		Urusan : Pertanahan		
		159. Persentase Luas Lahan Bersertifikat	33,83	persen
		160. Penyelesaian Izin Lokasi	100	persen
F.	MISI VI: Meningkatkan Keamanan dan Ketentraman Masyarakat			
1.	Meningkatnya Kondusifitas dan Keamanan Masyarakat, Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat	Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
		161. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	12	kegiatan
		162. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	12	kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	
2.	Berkurangnya Resiko Bencana yang Berdampak pada Masyarakat	Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
		163.	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	100	persen
		164.	Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100	persen
		165.	Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100	persen
		166.	Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	100	persen

PROGRAM DAN ANGGARAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
	Urusan Pendidikan		SUMBER ANGGARAN : - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus - Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak - Pendapatan Asli Daerah - Hibah - SILPA
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	906.521.000	
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	154.281.042.586	
3	Program Pendidikan Non Formal	4.570.915.200	
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	912.155.000	
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	43.374.350.900	
	Urusan Kesehatan		
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	10.259.264.000	
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	21.983.810.973	
8	Program Pengawasan Obat dan Makanan	70.000.000	
9	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	191.332.000	
10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.842.953.000	
11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	376.800.000	
12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6.015.646.014	
13	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	251.677.000	
14	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	37.386.340.375	
15	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pras.puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	21.185.510.022	
16	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	21.840.000	
17	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	5.461.900.000	
18	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat	196.677.614.953	
19	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/jiwa/paru-paru dan R.S mata	92.259.575.015	
20	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	4.000.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
21	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	4.000.000	
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
22	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	68.542.136.000	
23	Program Pembangunan Drainase/Gorong gorong	8.483.169.000	
24	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan	24.250.894.000	
25	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	50.000.000	
26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	715.540.000	
27	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi.Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	16.907.185.000	
28	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya	150.000.000	
29	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	8.583.287.400	
30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	503.629.000	
31	Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi	100.000.000	
32	Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air	227.445.000	
33	Program Perencanaan Tata Ruang	300.001.000	
34	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	622.817.000	
35	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	220.000.000	
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
36	Program Pengembangan Perumahan	2.010.536.000	
37	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	8.997.774.050	
38	Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan	37.210.664.000	
39	Program Lingkungan Sehat Perumahan	4.402.875.650	
	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
40	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	4.440.507.250	
41	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.667.902.055	
42	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	886.386.625	
43	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	37.327.000	
44	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1.372.804.000	
45	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	417.022.000	
46	Program pendidikan politik masyarakat	120.000.000	
47	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	22.432.500	
	Urusan Sosial		
48	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.714.885.345	
49	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	443.035.000	
50	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	112.623.040	
51	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	56.495.060	
52	Program peningkatan disiplin aparatur	638.167.000	
53	Program Peningkatan Kehidupan Sosial / Keagamaan	3.622.333.860	
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
	Urusan Tenaga Kerja		
50	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	988.012.000	
51	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.242.968.000	
52	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	296.179.000	
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
53	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	304.841.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
54	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	226.806.220	
55	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	191.298.940	
56	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1.349.374.555	
	Urusan Pangan		
57	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.226.972.275	
	Urusan Pertanahan		
58	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	138.550.000	
59	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	27.271.000	
	Urusan Lingkungan Hidup		
60	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	4.105.077.000	
61	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	14.473.799.860	
62	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.083.482.000	
63	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	85.406.000	
64	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	142.641.000	
65	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	71.800.000	
66	Program Pengembangan Kapasitas dan kemampuan Laboratorium lingkungan	264.871.000	
67	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan.	3.599.776.000	
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil		
68	Program Penataan Administrasi Kependudukan	6.599.081.500	
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
69	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	8.816.413.745	
70	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	475.432.200	
71	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	702.150.920	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
72	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	7.108.025.900	
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
73	Program Keluarga Berencana	7.643.980.125	
74	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	49.446.500	
75	Program pelayanan Kontrasepsi	476.225.000	
76	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	250.843.615	
	Urusan Perhubungan		
75	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	804.808.000	
76	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	245.103.000	
77	Program peningkatan pelayanan angkutan	2.079.676.000	
78	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	691.537.500	
79	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.960.281.425	
	Urusan Komunikasi dan Informatika		
80	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	7.596.437.300	
81	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	125.000.000	
82	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	4.077.839.650	
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
83	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	1.494.915.249	
84	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	533.125.500	
85	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	809.224.000	
86	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	249.501.800	
	Urusan Penanaman Modal		

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
87	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	203.645.270	
88	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	708.565.900	
89	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	89.135.000	
	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		
90	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	456.220.090	
91	Program peningkatan peran serta kepemudaan	463.890.195	
92	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	92.902.690	
93	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	4.984.025.210	
94	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	15.476.043.455	
	Urusan Statistik		
95	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	892.965.000	
	Urusan Kebudayaan		
96	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.347.220.000	
97	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	987.769.000	
98	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2.158.366.000	
	Urusan Perpustakaan		
99	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.046.042.500	
	Urusan Kearsipan		
100	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	30.171.000	
101	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	151.640.000	
102	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	267.090.000	
	URUSAN PILIHAN		
	Urusan Kelautan dan Perikanan		
103	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.862.005.500	

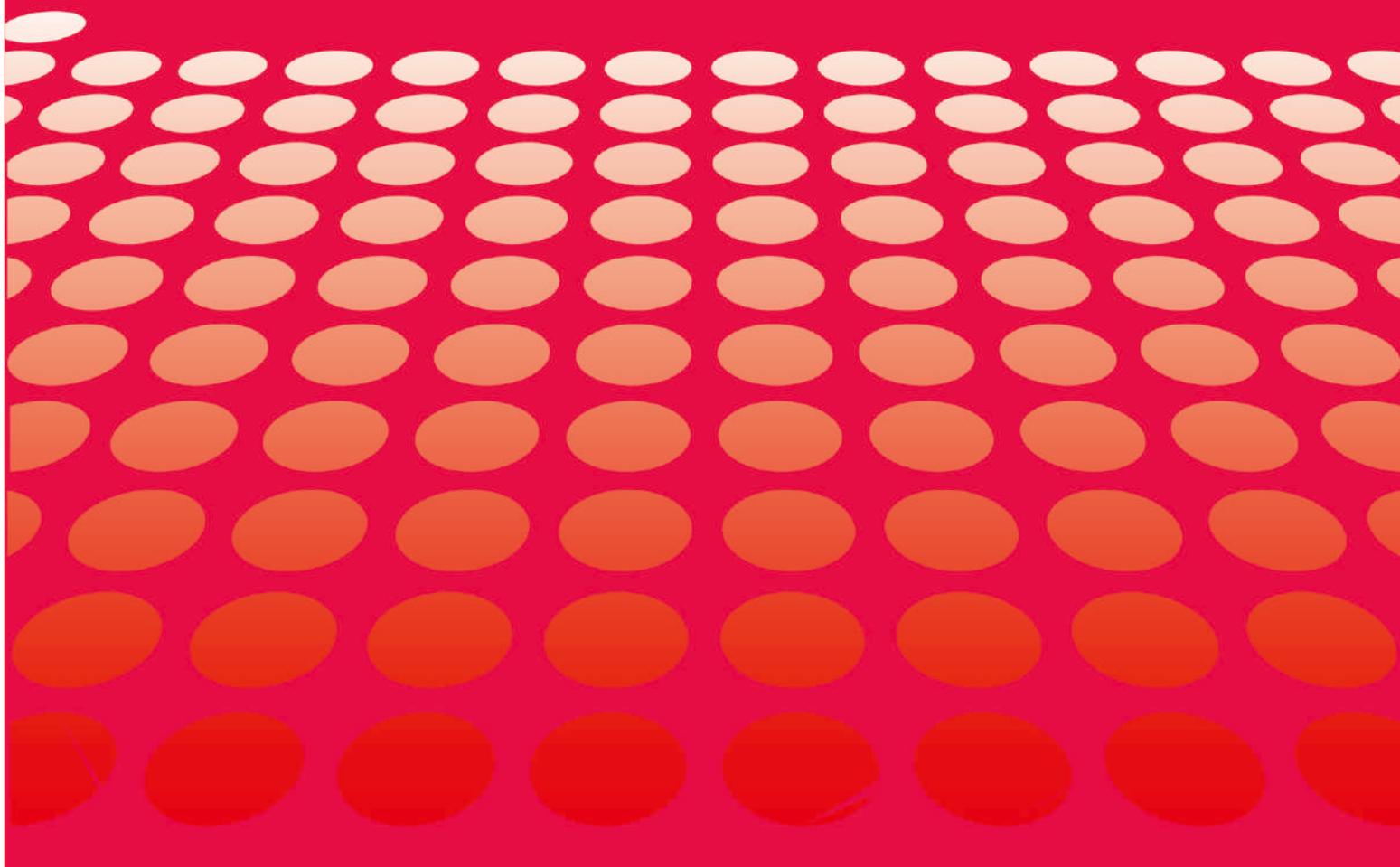
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
104	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	614.878.650	
105	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	100.000.000	
	Urusan Pariwisata		
106	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.485.090.000	
107	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	8.047.383.465	
108	Program Pengembangan Kemitraan	1.266.700.980	
	Urusan Pertanian		
109	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	321.229.650	
110	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	325.806.650	
111	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan	557.500.000	
112	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	11.255.824.926	
113	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	609.248.500	
114	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	494.300.000	
115	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	4.340.178.684	
116	Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan	84.691.000	
	Urusan Perdagangan		
117	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2.023.729.685	
118	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	263.930.000	
119	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri	657.966.390	
120	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan	1.464.076.500	
121	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan	43.093.077.000	
	Urusan Perindustrian		
122	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	982.230.000	
	Urusan Transmigrasi		

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
123	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	175.160.000	
	Urusan Administrasi Pemerintahan		
124	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.161.011.500	
125	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	502.119.610	
126	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.314.604.840	
127	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	25.924.000	
128	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah	1.570.240.000	
129	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	50.755.000	
130	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	155.855.000	
131	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	18.492.490.715	
132	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	18.149.730.500	
133	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.525.119.950	
	Urusan Pengawasan		
134	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1.089.476.030	
135	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	170.041.000	
	Urusan Perencanaan		
136	Program Pengembangan Data /Informasi	1.502.865.000	
137	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.486.968.330	
138	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	199.009.500	
139	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	747.404.800	
140	Program Kerjasama Pembangunan	126.495.000	
141	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	134.436.000	
142	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	199.176.000	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Urusan Kepegawaian		
143	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.475.406.250	
144	Peningkatan Manajemen Kepegawaian	262.367.240	
	Urusan Kelautan dan Perikanan		
103	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.862.005.500	
104	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	614.878.650	
105	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar	100.000.000	
	Urusan Pariwisata		
106	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.485.090.000	
107	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	8.047.383.465	
108	Program Pengembangan Kemitraan	1.266.700.980	
	JUMLAH :	1.055.518.378.307	

Kota Mungkid, 4 November 2019





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
2020